



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 merupakan kelanjutan atas tahapan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 berakhir pada tahun 2015, sedangkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun 2017 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2017 merupakan tahun ketiga periodisasi RPJMD III (Tahun 2015-2019) dengan arah pembangunan adalah Terwujudnya SDM yang berkualitas, Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing, Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai, Terwujudnya Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 disusun dengan berlandaskan pada : (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 mengacu pada : 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 3) Direktif Presiden; 4) hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015; dan 5) hasil evaluasi RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015. Selain itu, dokumen ini juga diselaraskan dengan dokumen lainnya antara lain: pencapaian target SPM, SDGs, RAD daerah dsb. Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 didorong agar sinergis dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment*, mendukung Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 bernilai strategis dan penting, karena : 1) Merupakan instrumen pelaksanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahun 2010-2015 dengan RPJMD 2016-2021; 2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; 3) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD dan RPJPD; 4) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD; dan 6) Sebagai acuan bagi SKPD di Kabupaten Rembang dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu :

- 1) Perencanaan dari bawah (bottom up)→ Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Rembang secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016, Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2016 dan Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2016.
- 2) Perencanaan dari atas (top down)→ Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang, yang tertuang dalam berbagai dokumen nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun 2017. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.
- 3) Perencanaan Partisipatif→ Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan, utamanya keikutsertaan dalam Forum Musrenbang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan Tinggi, Perusda/BUMD, Perbankan, Organisasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga Donor.
- 4) Perencanaan Teknokratik→ Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2017, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2012; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Rembang; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.
- 5) Perencanaan Politik→ Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang didukung oleh DPRD.

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2017 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 - 2016;
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 (khusus diatur dalam ketentuan peralihan);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 juga mendasarkan pada berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional di antaranya : 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Sustainability (SDGs) di Indonesia; 3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 4) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 6) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 7) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 8) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 10) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

1.3. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.
- BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah yang berisi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta permasalahan pembangunan daerah.
- BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi perekonomian nasional dan daerah tahun 2015, perkiraan tahun 2016 serta tantangan dan prospek ekonomi daerah tahun 2017) serta arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah).
- BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017**
Memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, tujuan pembangunan tahun kedua RPJMD 2016-2021, kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritas pembangunan daerah dan prioritas program tahun 2017 serta memperhatikan Visi Misi KDH dan WKDH terpilih meskipun belum ditetapkan dalam RPJMD 2016 - 2021.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Memuat rencana kerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2017 terdiri dari dua kelompok urusan kewenangan yaitu urusan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, kewenangan pilihan serta program di luar urusan wajib dan pilihan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 adalah untuk:

- a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan sinkronisasi dengan RKP Tahun 2017 serta RKPD Provinsi Tahun 2017 ke dalam Rencana Program kegiatan prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2017.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam rangka pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan Renja SKPD di Kabupaten Rembang.
- b. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang guna menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.



BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN
LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN
LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°00' LS. Batas - batas administratif wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) dan yang paling sempit Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Rembang Dalam Angka, 2014

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313 Ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 Ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 2.210 Ha (7,58%), pengairan 1/2 teknis 3.594 Ha (12,32%), pengairan sederhana 2.569 Ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 Ha (71,29%).

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8,34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 % , ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata - rata sebesar 23^oC, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33^oC. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata - rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa embung, bendung, cek dam, dan sungai. Beberapa embung besar yang mensuplai ketersediaan air baku yaitu : Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Panohan dan Embung Grawan. Sedangkan sungai besar yang ada antara lain sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 cek dam dan 293 daerah irigasi. dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang teraliri air sepanjang tahun.

Berdasar peruntukannya luas wilayah di Kabupaten Rembang secara umum dapat dibedakan menjadi lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Luas terbesar adalah lahan bukan sawah sebesar 39.938 ha, diikuti lahan bukan pertanian seluas 32.412 ha dan lahan sawah seluas 29.058. Secara rinci luasan peruntukan lahan perkecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2015 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sumber	2.950	2.614	2.109	7.673	7,57%
2.	Bulu	1.835	2.646	5.759	10.240	10,10%
3.	Gunem	1.269	3.966	2.785	8.020	7,91%
4.	Sale	1.789	2.636	6.289	10.714	10,57%
5.	Sarang	2.413	3.903	2.817	9.133	9,01%
6.	Sedan	2.101	3.237	2.626	7.964	7,85%
7.	Pamotan	2.244	4.232	1.680	8.156	8,04%
8.	Sulang	2.036	4.051	2.367	8.454	8,34%
9.	Kaliori	3.661	1.579	910	6.150	6,06%
10.	Rembang	3.103	1.696	1.082	5.881	5,80%
11.	Pancur	1.167	2.734	693	4.594	4,53%
12.	Kragan	2.306	2.807	1.053	6.166	6,08%
13.	Sluke	1.023	1.949	787	3.759	3,71%
14.	Lasem	1.161	1.888	1.455	4.504	4,44%
	JUMLAH	29.058	39.938	32.412	101.408	100,00%

Sumber: Bappeda Kab. Rembang, 2015 (data diolah)

Meskipun berdasarkan peruntukan lahan, lahan bukan sawah merupakan sebagian besar lahan di Kabupaten Rembang, namun sektor pertanian dalam arti luas menyumbang PDRB ADHK terbesar yaitu sebesar 43,75% pada tahun 2013. Kontribusi terbesar berasal dari sub sektor tanaman bahan makanan, kemudian berturut - turut sub sektor perikanan, tanaman perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Secara menyeluruh Wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi :

a. Tanah alluvial

Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.

b. Tanah Regosol

Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai dan digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.

c. Tanah Gromosol

Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua dan meliputi 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

d. Tanah Mediteran Merah Kuning

Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput

Disamping itu Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain : batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat, dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang. Kandungan tanah ini menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian, yang terdiri bahan galian berupa batu gamping, pasir kwarsa, clay dan sebagainya. Dengan potensi yang cukup besar maka beberapa pabrik semen telah dan sedang mengajukan permohonan perijinan untuk membuka usaha di Kabupaten Rembang.

Pada aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan

yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan, yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pada aspek kewilayahan maka terbagi atas struktur ruang dan pola ruang. Pada struktur ruang terbagi atas hirarki sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Rembang berfungsi dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan tujuan pemerataan pembangunan yaitu pusat-pusat kegiatan dapat secara efektif berperan sampai di tingkat lokal (pusat perdesaan). Hirarki sistem pusat kegiatan diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung dengan keterkaitan desa dan kota (*rural-urban linkage*) yaitu :

- a. Pusat Kegiatan hirarki I, merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat-pusat ini meliputi Perkotaan Rembang. Pusat ini akan melayani beberapa kawasan.
- b. Pusat Kegiatan hirarki II, merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan pada waktu ke depan dipromosikan menjadi PKL, meliputi Perkotaan Lasem, Perkotaan Pamotan dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Kegiatan Hirarki III, merupakan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Satuan kawasan pengembangan ini identik dengan wilayah Kecamatan. Pusat-pusat kegiatan satuan kawasan ini meliputi semua pusat-pusat Kecamatan.

Tabel 2.3
Hirarki Pusat-Pusat Kegiatan
Kabupaten Rembang Tahun 2015

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Fungsi Pusat Kegiatan
1	PKL	Rembang	Pusat pemerintahan Kecamatan Rembang, Pusat permukiman, Pusat transportasi wilayah, Pusat perdagangan dan jasa, Pusat pengembangan industri, Pusat pengembangan perikanan dan kelautan, Pusat pariwisata.
2	PKLp	Lasem	Pusat pemerintahan Kecamatan Lasem, Pusat pengembangan perdagangan dan jasa, Pusat transportasi wilayah, Pusat permukiman, Pusat perikanan dan kelautan, Pengembangan pertanian, Pengembangan industri, Pengembangan pertambangan, Pengembangan pariwisata.

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Fungsi Pusat Kegiatan
3	PKLp	Pamotan	Pusat pemerintahan Kecamatan Pamotan, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan pertambangan, Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan.
4	PKLp	Kragan	Pusat pemerintahan Kecamatan Kragan, Pusat permukiman, Pengembangan perikanan dan kelautan, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan industri dan pertambangan.
5	PPK	Sulang	Pusat pemerintahan Kecamatan Sulang, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian.
6	PPK	Sluke	Pusat pemerintahan Kecamatan Sluke, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan perikanan dan kelautan, Pengembangan perhubungan laut, Pengembangan pertambangan, Pengembangan industri, Pengembangan pariwisata.
7	PPK	Kaliori	Pusat pemerintahan Kecamatan Kaliori, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan perikanan dan kelautan, Pengembangan industri, Pengembangan pariwisata.
8	PPK	Pancur	Pusat pemerintahan Kecamatan Pancur, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan pertambangan.
9	PPK	Sumber	Pusat pemerintahan Kecamatan Sumber, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan. Pengembangan industri berbasis pertanian.
10	PPK	Bulu	Pusat pemerintahan Kecamatan Bulu, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan industri berbasis pertanian, Pengembangan pariwisata, Pengembangan pertambangan.

No.	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Fungsi Pusat Kegiatan
11	PPK	Gunem	Pusat pemerintahan Kecamatan Gunem, Pusat permukiman, Pengembangan pertambangan dan industri berbasis pertambangan, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan industri berbasis pertanian, Pengembangan pariwisata.
12	PPK	Sedan	Pusat pemerintahan Kecamatan Sedan, Pusat permukiman, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan pertambangan, Pengembangan industri berbasis pertanian.
13	PPK	Sale	Pusat pemerintahan Kecamatan Sale, Pusat permukiman, Pengembangan pertambangan dan industri berbasis pertambangan, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan pariwisata.
14	PPK	Sarang	Pusat pemerintahan Kecamatan Sarang, Pusat permukiman, Pengembangan perikanan dan kelautan, Pengembangan pertanian dan kehutanan, Pengembangan industri, Pengembangan pariwisata, Pengembangan pertambangan.

Sumber: Bappeda Kab. Rembang, 2015 (data diolah)

Pembentuk hirarki sistem pusat kegiatan melalui pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi :

- a. pengembangan sistem prasarana transportasi darat terdiri atas pengembangan jaringan jalan; pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan; dan pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian.
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi laut yaitu pengembangan pelabuhan Rembang dan Terminal Sluke di wilayah pantai Kecamatan Sluke sebagai pelabuhan Pengumpan.
- c. pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
- d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir, dan mengembangkan ekowisata.

Kawasan lindung tersebut meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sedangkan rencana kawasan budidaya adalah untuk mengoptimalkan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Rembang mempunyai potensi Kawasan budidaya seluas 155.865 Ha meliputi :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi yang terbagi dalam 2 KPH, yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo dengan luas 21.458 Ha yang terletak di Kecamatan Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, Sale, dan Sarang.
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat yang diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial dan ekonomi seluas 8.837 Ha yang terletak di Kecamatan Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, Sale, Sedan, Sarang, Kragan, Lasem, Pancur, Sluke, dan Pamotan.
3. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 69.516 Ha dengan rincian kawasan pertanian lahan basah seluas 29.058 Ha, dan kawasan pertanian lahan kering 39.938 Ha yang terletak pada semua kecamatan.
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas utama berupa mangga, cabe dan melon seluas 1.804 Ha yang terletak pada semua kecamatan.
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama berupa tebu dan tanaman kelapa seluas 3.983 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kaliori, Sulang, Pamotan, Sarang, Kragan, Lasem, Sale, Sedan, Pancur, Gunem, Bulu, dan Sluke.
 - d. Kawasan peruntukan peternakan dengan komoditas utama berupa sapi, kambing, ayam dan itik yang terletak pada semua kecamatan.
4. Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap yang terletak di sepanjang pantai Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang, serta kawasan perikanan budidaya yang terletak di Kecamatan Bulu, Pamotan, Sale, Kragan, Rembang, Kaliori, dan Sulang.
5. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara seluas 27.628 Ha yang terletak di Kecamatan Gunem, Sale, Bulu, Sedang, Sarang, Pamotan, Lasem, Sumber, Pancur, Sluke dan Kragan.
 - b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak pada semua kecamatan.
6. Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan mikro. Kawasan industri besar seluas 869 Ha meliputi kawasan industri Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, kawasan industri Sluke yang terletak di Desa Trahan, Leran dan Sendang Mulyo, dan kawasan industri pertambangan.

7. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya, dan pengembangan wisata buatan.
8. Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
9. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil berupa pengembangan kawasan pulau-pulau kecil yang terdiri dari Pulau Gede dan Pulau Marongan, dan
10. Kawasan peruntukan budidaya lainnya terdiri dari kawasan pertahanan keamanan dan kawasan bumi perkemahan Karang Sari Park di Kecamatan Sulang seluas 20 Ha.

Kabupaten Rembang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah bagian timur juga mempunyai tingkat kerawanan bencana. Kerawanan bencana tersebut dapat diindikasikan dari frekuensi kejadian bencana alam pada kurun waktu 2010-2014 yang semakin meningkat, terutama kejadian bencana banjir dan tanah longsor, yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di berbagai sektor. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Rembang dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4
Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 - 2014

No.	Frekuensi Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana	Kejadian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Banjir	-	-	3	26	45
2.	Longsor	5	3	8	27	29
3.	Abrasi	-	-	1	2	2
4.	Puting Beliung	5	1	3	7	4
5.	Kebakaran	-	4	13	8	11

Sumber: BPBD Kab. Rembang, 2015

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana abrasi, kawasan rawan bencana puting beliung dan kawasan rawan bencana kebakaran serta kawasan rawan bencana kekeringan. Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Dan kejadian bencana per kecamatan pada tahun 2014 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Kejadian Bencana Per Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Kecamatan	Kejadian Bencana				
		Banjir	Longsor	Abrasi	Puting Beliung	Kebakaran
1.	Sumber	-	2 Desa	-	1 Desa	2 Kejadian
2.	Bulu	-	2 Desa	-	-	-
3.	Gunem	-	1 Desa	-	-	1 Kejadian
4.	Sale	-	2 Desa	-	-	-
5.	Sarang	1 Desa	-	1 Desa	-	-

No	Kecamatan	Kejadian Bencana				
		Banjir	Longsor	Abrasi	Puting Beliung	Kebakaran
6.	Sedan	2 Desa	5 Desa	-	-	2 Kejadian
7.	Pamotan	-	-	-	-	1 Kejadian
8.	Sulang	-	-	-	-	1 Kejadian
9.	Kaliori	16 Desa	1 Desa	-	2 Desa	4 Kejadian
10.	Rembang	-	-	-	2 Desa	2 Kejadian
11.	Pancur	-	4 Desa	-	-	-
12.	Kragan	15 Desa	-	3 Desa	-	-
13.	Sluke	-	6 Desa	-	-	1 Kejadian
14.	Lasem	9 Desa	1 Desa	-	2 Desa	1 Kejadian

Sumber: BPBD Kab. Rembang, 2015

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2014 sebanyak 616.901 (angka sementara). Pada tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Rembang sebanyak 315.012 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 312.209 jiwa, sehingga rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sebesar 99,11% yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Rembang tahun 2014 lebih kecil dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang cukup besar merupakan modal dasar sumberdaya yang diharapkan akan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2014

No	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Sumber	33.589	33.801	34.230	34.439	34.528
2.	Bulu	25.649	25.808	26.140	26.292	26.358
3.	Gunem	22.774	22.972	23.268	23.457	23.546
4.	Sale	35.810	36.127	36.573	36.901	37.042
5.	Sarang	60.256	60.976	61.777	62.472	62.809
6.	Sedan	51.240	51.729	52.309	52.872	53.094
7.	Pamotan	43.968	44.260	44.727	45.107	45.231
8.	Sulang	36.824	37.157	37.670	37.959	38.109
9.	Kaliori	38.683	39.040	39.604	39.891	40.052
10.	Rembang	84.246	85.294	86.485	87.431	87.924
11.	Pancur	27.413	27.702	28.069	28.342	28.474
12.	Kragan	58.417	59.103	59.955	60.541	60.862
13.	Sluke	26.649	26.866	27.211	27.423	27.518
14.	Lasem	46.996	47.383	47.987	48.368	48.540
	JUMLAH	592.514	598.218	606.005	611.495	614.087

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Jumlah penduduk yang cukup besar merupakan modal dasar sumberdaya yang diharapkan akan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

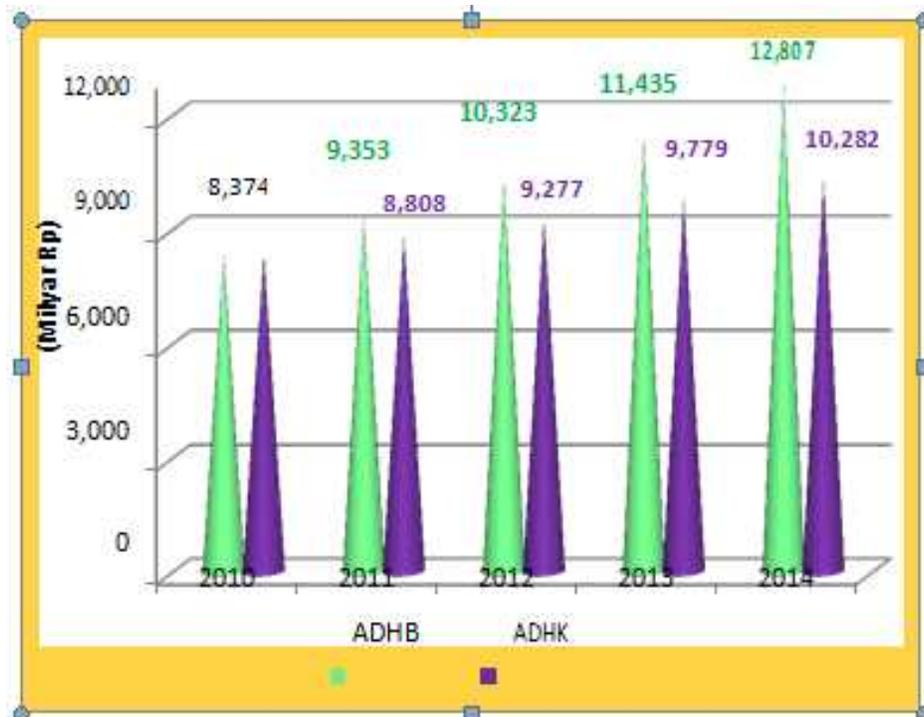
2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Mulai tahun 2014 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010. Pada tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Rembang mencapai 12,807 trilyun rupiah, naik 12,00 persen dari tahun sebelumnya. Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB kabupaten. Pada tahun 2014 lapangan usaha pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang yaitu sebesar 30,23 persen, disusul lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,80 persen. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,03 persen. lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 0,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2014 mencapai 5,15 persen, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2014 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu tumbuh 17,90 persen, kemudian lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 17,16 persen, dan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 15,04 persen.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
PDRB Kabupaten Rembang, 2010-2014 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Kab. Rembang 2015

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2010)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.817.198	2.939.405	3.042.784	3.171.162	2.992.145
Pertambangan dan penggalan	272.862	265.176	276.356	291.766	310.768
Industri pengolahan	1.456.976	1.525.025	1.693.227	1.863.046	2.143.284
Pengadaan Listrik dan Gas	6.272	7.120	7.925	8.734	9.202
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.395	5.457	5.449	5.438	5.546
Konstruksi	626.240	667.530	708.583	677.378	776.630
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.222.456	1.299.711	1.310.768	1.351.958	1.406.725
Transportasi dan Pergudangan	304.815	318.345	339.534	375.321	414.922
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	254.382	270.421	284.037	302.419	336.232
Informasi dan Komunikasi	91.957	102.700	112.697	124.070	145.366
Jasa Keuangan dan Asuransi	333.652	348.945	362.871	383.295	407.252
Real Estate	85.569	91.186	94.743	99.192	105.521
Jasa Perusahaan	19.335	21.336	22.547	26.308	28.189
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	367.808	376.447	380.889	384.053	386.622
Jasa Pendidikan	264.568	313.253	365.529	423.906	486.880
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.245	84.275	94.361	102.304	120.619
Jasa lainnya	167.816	171.970	174.863	188.600	206.282
PDRB	8.373.547	8.808.303	9.277.163	9.778.950	10.282.184

Sumber : Rembang Dalam Angka, 2015

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Rembang masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selama 5 tahun

terakhir, sumbangan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu diatas 30 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, serta lapangan usaha Konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen, lebih lengkapnya ada di Tabel berikut:

Tabel 2.8
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Rembang Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2010 (%) Tahun 2010-2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.64	33.37	32.80	32.43	29.10
Pertambangan dan penggalan	3.26	3.01	2.98	2.98	3.02
Industri pengolahan	17.40	17.31	18.25	19.05	20.84
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
Konstruksi	7.48	7.58	7.64	6.93	7.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.60	14.76	14.13	13.83	13.68
Transportasi dan Pergudangan	3.64	3.61	3.66	3.84	4.04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.04	3.07	3.06	3.09	3.27
Informasi dan Komunikasi	1.10	1.17	1.21	1.27	1.41
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.98	3.96	3.91	3.92	3.96
Real Estate	1.02	1.04	1.02	1.01	1.03
Jasa Perusahaan	0.23	0.24	0.24	0.27	0.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.39	4.27	4.11	3.93	3.76
Jasa Pendidikan	3.16	3.56	3.94	4.33	4.74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.91	0.96	1.02	1.05	1.17
Jasa lainnya	2.00	1.95	1.88	1.93	2.01
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

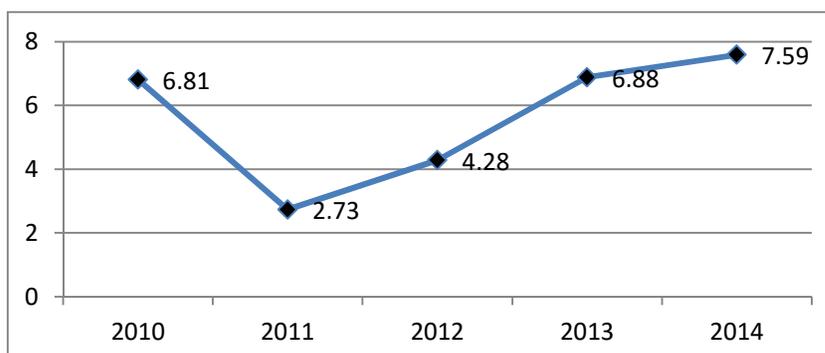
Sumber: Rembang Dalam Angka, 2015

2.1.2.2. Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan angka inflasi di Kabupaten Rembang cukup baik karena berada pada angka di bawah dua digit. Pada tahun 2010 cukup tinggi yaitu 6,81. Tapi kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2011 yaitu mencapai 2,73. Ditahun 2012 dan 2013 inflasi di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan berturut-turut adalah 4,28 dan 6,88. Inflasi Kabupaten Rembang tertinggi dicapai pada tahun 2014 yang lalu sebesar 7,59. Laju inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu lima tahun selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Laju Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

2.1.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB merupakan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi pada satu wilayah tanpa memperhatikan status kepemilikan faktor produksi apakah dimiliki oleh warga setempat atau warga daerah lain. Dengan demikian kita harus cermat jika memperhatikan khususnya PDRB perkapita. Jika memperhatikan perkembangan PDRB perkapita tersebut di atas terlihat bahwa keadaannya selalu naik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dikarenakan produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Rembang tidak hanya dimiliki oleh warga Rembang saja tetapi sebagian juga dimiliki oleh penduduk di luar Kabupaten Rembang, sehingga PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat Rembang. PDRB perkapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya. Selama tahun 2010-2014 perkembangan PDRB per kapita adhb maupun adhk selalu meningkat. PDRB per kapita Rembang tahun 2014 cukup melesat mencapai 20,9 juta rupiah (adhb), naik

48 persen dari tahun 2010 yang hanya 14,1 juta rupiah. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014

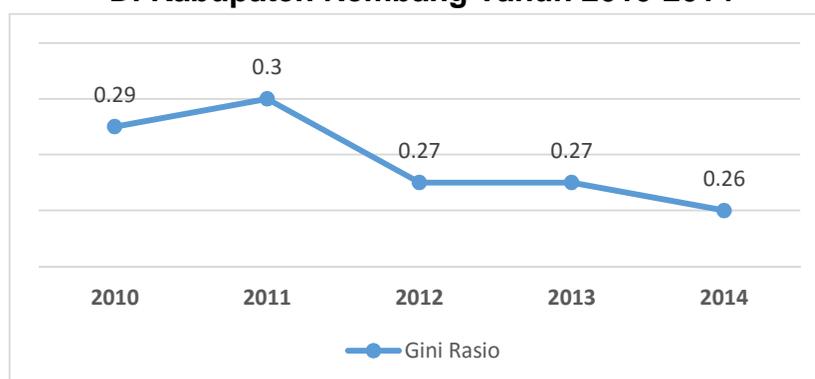


Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

2.1.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 < G < 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Berikut adalah tren penurunan Gini Rasio di kabupaten Rembang Tahun 2010-2014:

Gambar 2.3
Tren Penurunan Gini Rasio
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang adalah semakin rendah atau dengan kata lain distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang semakin merata. Walaupun semua rumah tangga baik miskin maupun kaya mengalami kenaikan kesejahteraan, terdapat kecenderungan dimana golongan bawah (1-40 % terendah), konsumsinya mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas (60 % teratas), yaitu golongan menengah dan golongan kaya.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan antar warga masyarakat, mengurangi ketimpangan atau meredam tren kenaikan ketimpangan di kabupaten Rembang tidak bisa diterjemahkan kedalam pengendalian (control atau targeting) dari ketimpangan dalam outcome (seperti pendapatan atau konsumsi), tetapi fokus pada mengurangi ketimpangan dalam opportunity karena akan cenderung mengabaikan *effort, hardwork, dan talent* dari individu.

Fokus pemerintah dimasa mendatang adalah meningkatkan *equality of opportunity* dan Redistribusi sistem perpajakan yang progresif, dimana penerimaan pajak digunakan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan meningkatkan *equality of opportunity* dilakukan agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui *equality of opportunity* dalam pendidikan semua jenjang, serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Rembang adalah dengan memastikan anggaran pemerintah dialokasikan lebih optimum selain untuk mengurangi kemiskinan juga memasikan *equality of opportunity* di sektor-sektor yang terkait peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) agar semua warga negara, tak terkecuali, tanpa ter-halangi oleh status sosial ekonomi, dapat memperoleh opportunity yang sama dalam memperoleh pendidikan (semua jenjang) dan pelayanan kesehatan.

2.1.2.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu. Dari perhitungan yang telah dilakukan, Indeks Williamson secara umum di Kabupaten Rembang cenderung stabil stagnan dari 0,203 pada tahun 2011 menjadi 0,207 pada tahun 2013, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten masih berada di level yang rendah. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Rembang selalu berupaya menurunkan Indeks Williamson agar mencapai angka ideal melalui intervensi kebijakan spasial dan mendasarkan pada karakteristik khusus setiap wilayah.

2.1.2.6. Kemiskinan

2.1.2.6.1. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan tren menurun. Meskipun garis kemiskinan setiap tahun terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui intervensi Program peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan Program penurunan beban pengeluaran penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Rembang pada tahun 2010 sebanyak 138.496 jiwa (23,41%) dengan garis kemiskinan Rp. 217.846,-

menurun 10.496 jiwa (7,5%) pada tahun 2013 menjadi 128.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 284.160,-, menurun lagi menjadi 199.988 jiwa atau sebesar 19,50% pada tahun 2014 dengan garis kemiskinan Rp. 299.503,-.

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

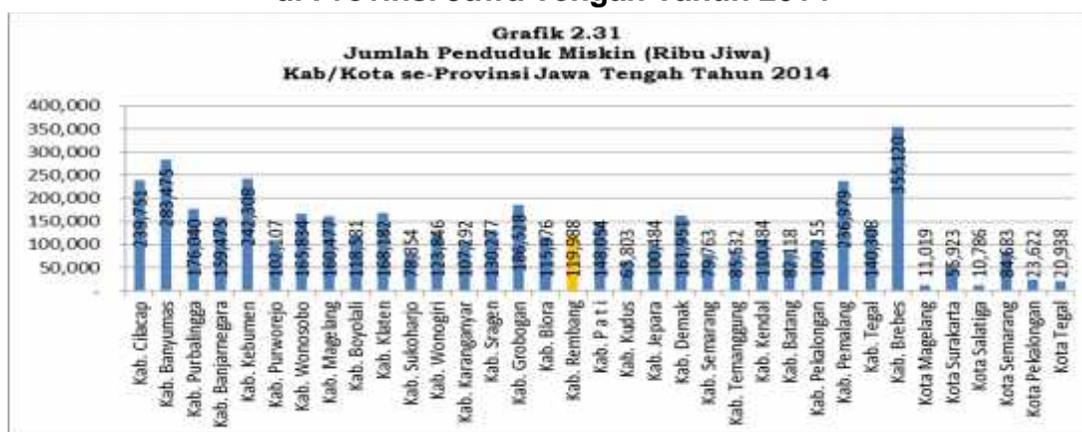
Tabel 2.10
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Rembang
Dalam 4 Tahun Terakhir (2010-2014)

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2010	138.496	23,41	217.846
2011	140.400	23,71	240.859
2012	129.900	21,88	266.303
2013	128.000	20,97	284.160
2014	199.988	19.50	299.503

Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 masih tergolong tinggi (19,50%) apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten sekitar, termasuk apabila dibandingkan dengan Angka kemiskinan Nasional (10,96%) dan Provinsi Jawa Tengah (13,58%). Penyebab terbesar masih tingginya angka kemiskinan antara lain besarnya beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan inflasi serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten dalam mengintervensi penyebab kemiskinan. Adapun posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014



Sumber: TKPKD Prov. Jawa Tengah, 2015

2.1.2.6.2. Persebaran Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan

Berdasarkan jumlah rumah tangga miskin dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Rembang sesuai dengan hasil PPLS 2011 yang diolah TNP2K Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran 20% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, terbagi menjadi 3 kategori kemiskinan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dilihat dari wilayah per kecamatan, Kabupaten Rembang memiliki 8 kecamatan kemiskinan tinggi, 5 kecamatan kemiskinan sedang dan 1 kecamatan kemiskinan rendah. Kecamatan kategori kemiskinan tinggi (persentase rumah tangga miskin diatas 26,23 %) meliputi Kecamatan Gunem, Pamotan, Bulu, Sedan, Sarang, Pancur, Sluke dan Sulang. Kecamatan kategori kemiskinan sedang (persentase rumah tangga miskin diatas 13,35% dan dibawah 26,23 %) meliputi Kecamatan Sumber, Sale, Lasem, Kragan dan Kaliori. Kecamatan kategori kemiskinan rendah (persentase rumah tangga miskin dibawah 13,35%) yaitu Kecamatan Rembang, selengkapnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Rumah tangga Miskin di Kabupaten Rembang
Menurut Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin (SM+M)	Jumlah Rumah Tangga	Presentase RT Miskin (%)
1	Sumber	2.322	9.329	24,89
2	Bulu	2.443	7.125	34,15
3	Gunem	2.218	6.318	35,11
4	Sale	2.426	9.932	24,43
5	Sarang	5.194	16.684	31,13
6	Sedan	4.497	14.206	31,66
7	Pamotan	4.172	12.211	34,17
8	Sulang	2.795	10.212	27,37
9	Kaliori	2.049	10.726	19,10
10	Rembang	2.430	23.317	10,42
11	Pancur	2.313	7.596	30,45
12	Kragan	3.465	16.176	21,42
13	Sluke	2.118	7.394	28,64
14	Lasem	2.452	13.039	18,81
	Jumlah	40.894	164.265	-

Sumber: TKPKD Prov. Jawa Tengah,

Desa yang merupakan zona merah karena memiliki kemiskinan tinggi yang tersebar di 40 desa pada 8 Kecamatan memerlukan intervensi program penanggulangan kemiskinan yang spesifik disesuaikan dengan kondisi penyebab kemiskinan masing-masing desa. Untuk desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani akan diintervensi melalui program subsidi benih, subsidi pupuk, bantuan alsintan dan sebagainya. Data Rumah Tangga Miskin prioritas 1 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Desa/Kelurahan Prioritas 1 Penanggulangan Kemiskinan
Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jml RTM (SM+M)
1	Sumber	Sumber	267
2	Grawan	Sumber	203
3	Tlogotunggal	Sumber	217
4	Sekarsari	Sumber	225
5	Sendangmulyo	Bulu	521
6	Pasedan	Bulu	448
7	Tegaldowo	Gunem	391
8	Tahunan	Sale	234
9	Mrayun	Sale	242
10	Bancang	Sale	219
11	Sale	Sale	193
12	Sumbermulyo	Sale	235
13	Tengger	Sale	193
14	Ukir	Sale	268
15	Lodanwetan	Sarang	483
16	Bonjor	Sarang	476
17	Tawangrejo	Sarang	385
18	Sumbermulyo	Sarang	417
19	Kalipang	Sarang	367
20	Karas	Sedan	526
21	Sambong	Sedan	398
22	Pamotan	Pamotan	617
23	Kaliombo	Sulang	410
24	Meteseh	Kaliori	224
25	Sidomulyo	Kaliori	154
26	Sendangagung	Kaliori	159
27	Pengkol	Kaliori	213
28	Turusgede	Rembang	176
29	Padaran	Rembang	195
30	Kasreman	Rembang	212
31	Mondoteko	Rembang	155
32	Waru	Rembang	194
33	Sumberjo	Rembang	192
34	Doropayung	Pancur	374
35	Tuyuhan	Pancur	300
36	Ngasinan	Kragan	271
37	Woro	Kragan	325
38	Sumurtawang	Kragan	286
39	Labuhan Kidul	Sluke	439
40	Selopuro	Lasem	391

Sumber: TKPKD Prov. Jawa Tengah, 2013

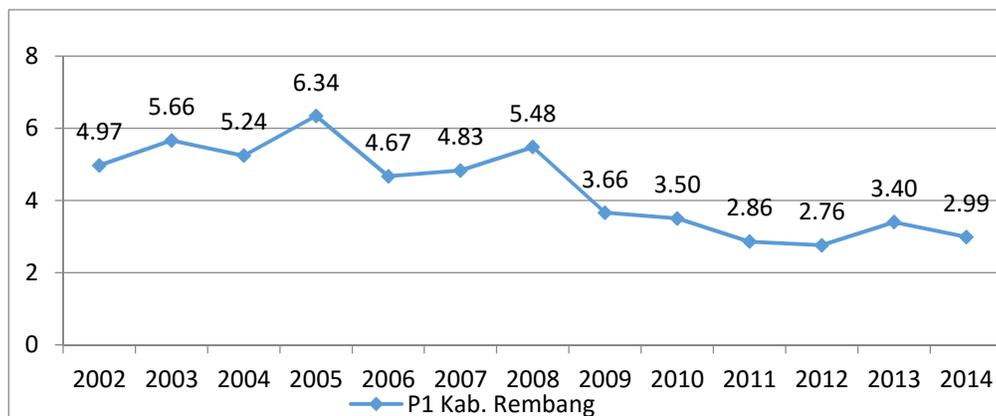
2.1.2.6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dari tahun 2002-2008 menunjukkan trend yang fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 6,34 selanjutnya kembali tinggi pada tahun 2008 sebesar 5,48 baru pada kurun waktu tahun 2009-2012 memiliki tren yang menurun. Selain pada tahun- tahun tersebut, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Rembang mengalami tren penurunan sampai puncaknya yaitu di tahun 2012 yang mempunyai nilai indeks kedalaman kemiskinan terendah selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 2,76.

Tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang ini memperlihatkan bahwa program kegiatan penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang yaitu semakin kecilnya kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun demikian pada tahun 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,40. Pada tahun selanjutnya indeks kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 0,41% menjadi 2,99%.

Pada Gambar berikut ditampilkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2002–2014.

Gambar 2.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang Tahun 2002-2014

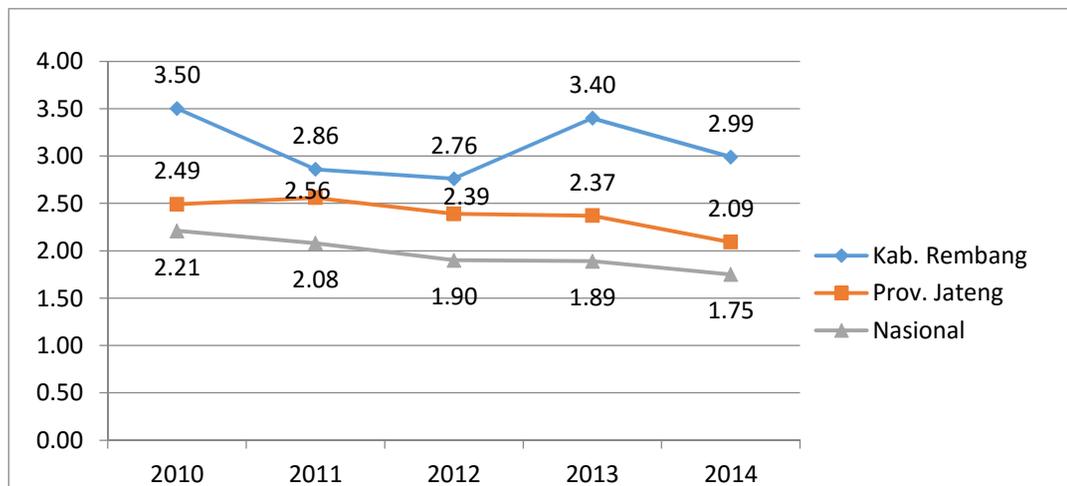


Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 2,99% lebih tinggi dibandingkan P1 Provinsi Jawa Tengah (2,09%) dan Nasional (1,75%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang masih jauh di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp 299.503/kapita/bulan. Pada Gambar 2.5 ditampilkan perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada kurun waktu 2010-2014.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin serta pengurangan beban pengeluaran penduduk/rumah tangga miskin melalui bantuan sosial. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat diturunkan.

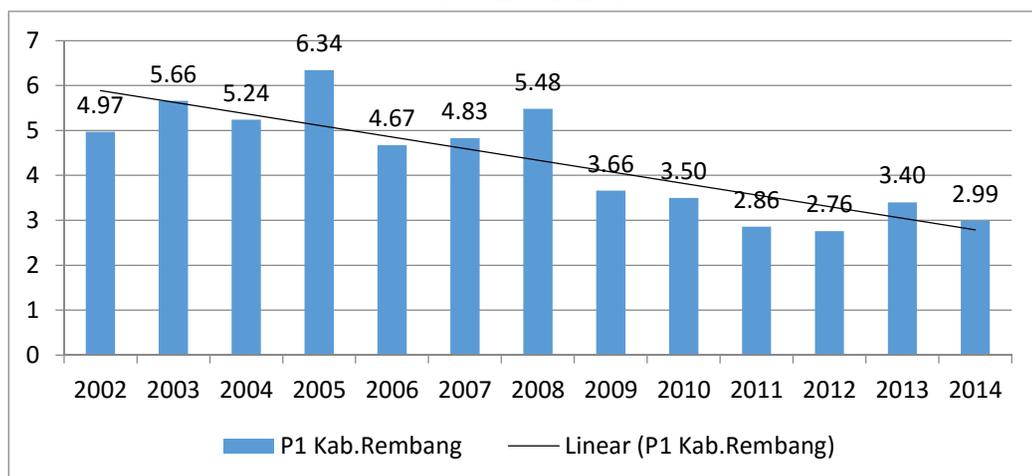
Gambar 2.6
Perbandingan Indeks kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang yang tercatat mengalami fluktuatif namun memiliki kecenderungan menurun selama kurun waktu tahun 2002 – 2014. Hal tersebut tergambar pada Gambar 2.7 ditunjukkan secara grafis analisis efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2002 – 2014. Perkembangan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 sudah menuruh sebesar 5,22%.

Gambar 2.7
Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2002-2014



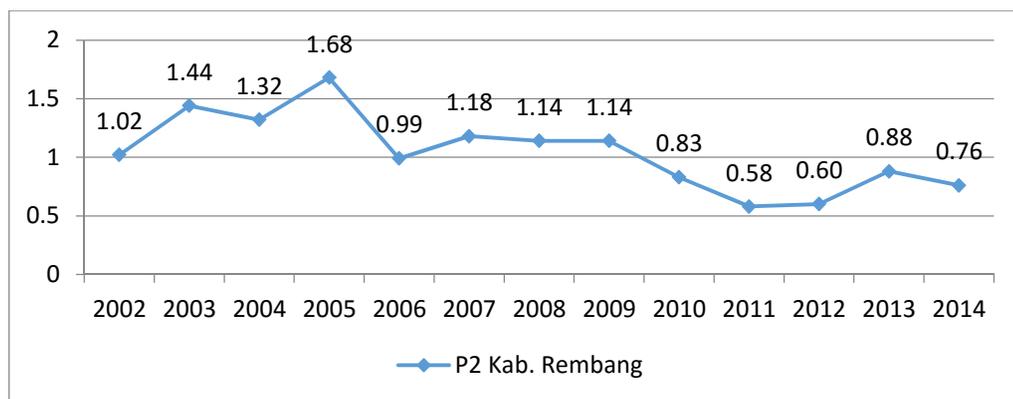
Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

2.1.2.6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

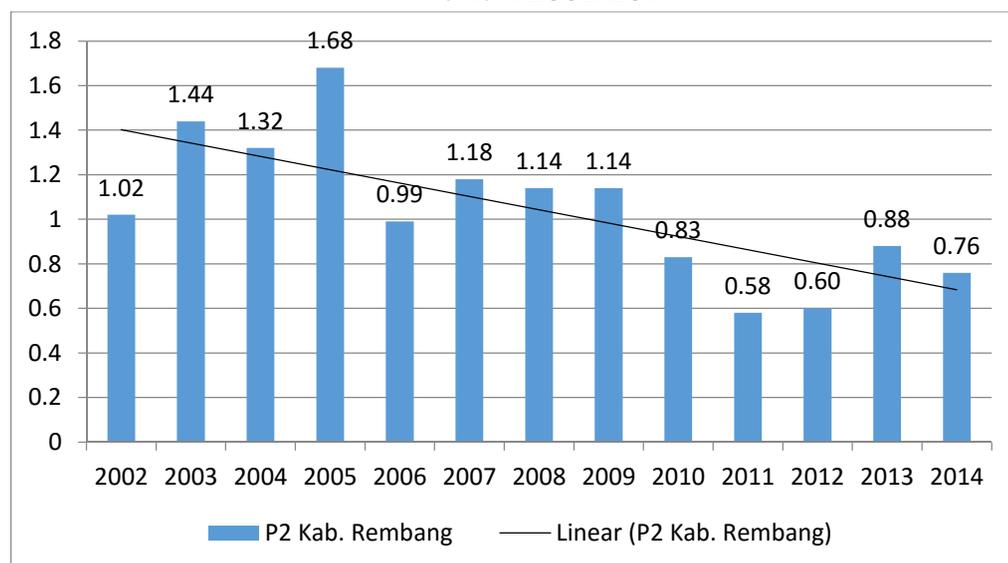
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rembang memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu tahun 2002 – 2014. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin kecil. Pada tahun 2010, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rembang kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 0,83 tetapi tahun berikutnya di tahun 2011, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rembang kembali menurun menjadi 0,58 selanjutnya pada tahun 2012 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,60. Akhirnya pada tahun 2013, kembali meningkat sebesar 0,88 dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 0,76. Pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9 ditampilkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2002 – 2014.

Gambar 2.8
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Rembang
Tahun 2002-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

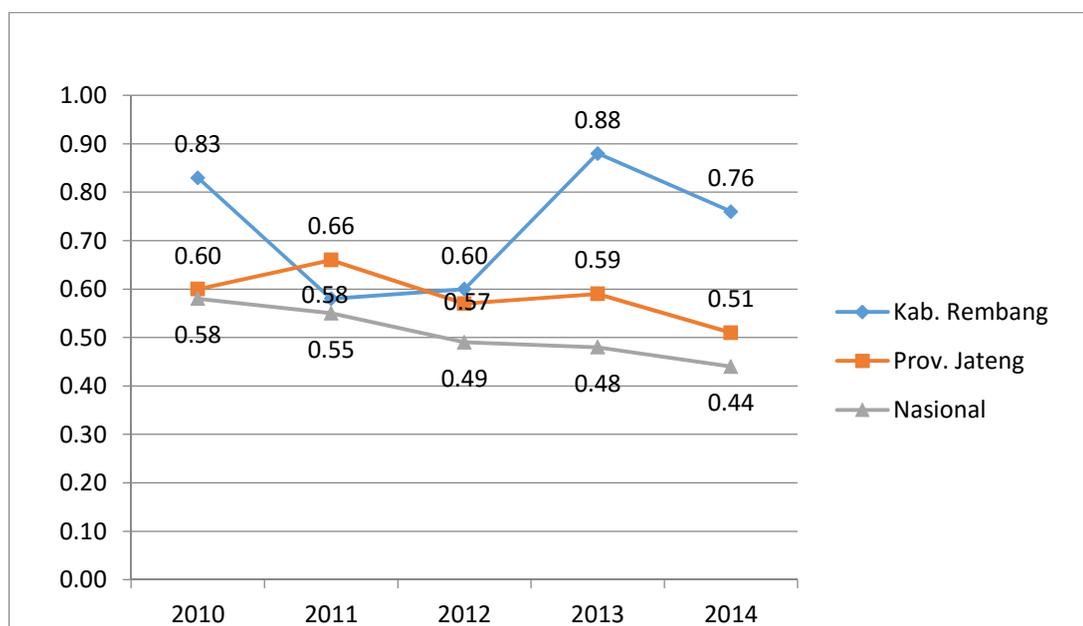
Gambar 2.9
Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Rembang
Tahun 2002-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Perbandingan P2 tingkat Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut:

Gambar 2.10
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

2.1.2.7. Jumlah Kriminalitas yang Tertangani

Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Resort Rembang selama satu tahun per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Rembang mempunyai kecenderungan menurun, hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 4,08 turun menjadi 3,76 pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah Data selengkapnya sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana			Angka Kriminalitas Yang Tertangani
		Lapor	Selesai	Rasio	
1	2010	297	243	81,8%	4,06
2	2011	391	313	80,1%	5,18
3	2012	368	289	78,5%	4,74
4	2013	421	304	72,2%	4,98
5	2014	354	252	71,2%	4,08
6	2015	351	233	66,4%	3,76

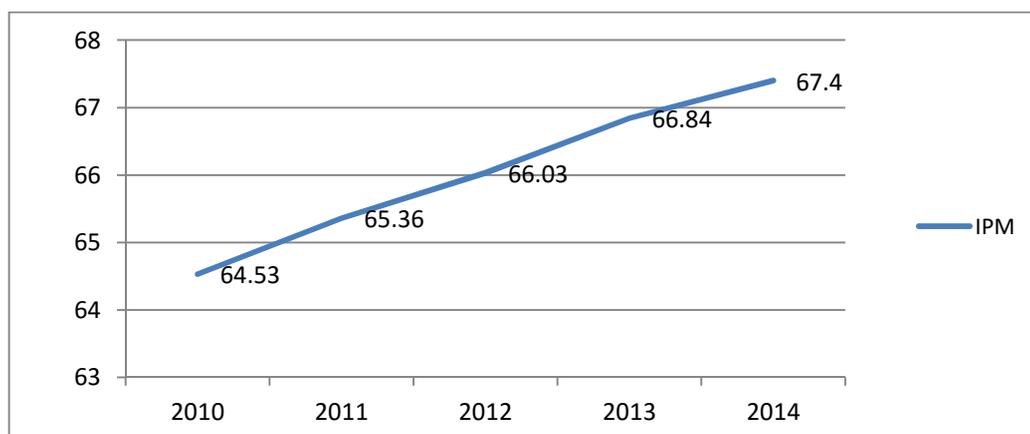
Sumber : Kesbangpolinmas Kab. Rembang 2015 (data diolah)

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Rembang tercermin pada angka IPM tahun 2014 yang mencapai angka 67,40. Pencapaian angka IPM tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yang sebesar 66,84. Dengan pencapaian IPM 67,40, maka Kabupaten Rembang menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia "sedang" dengan angka pencapaian IPM antara 60,0 sampai 70,9.

Perkembangan IPM Kabupaten Rembang dalam empat tahun terakhir (2011-2014) trennya meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil. Capaian IPM tahun 2014 menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 67,40 seperti yang terlihat pada gambar berikut :

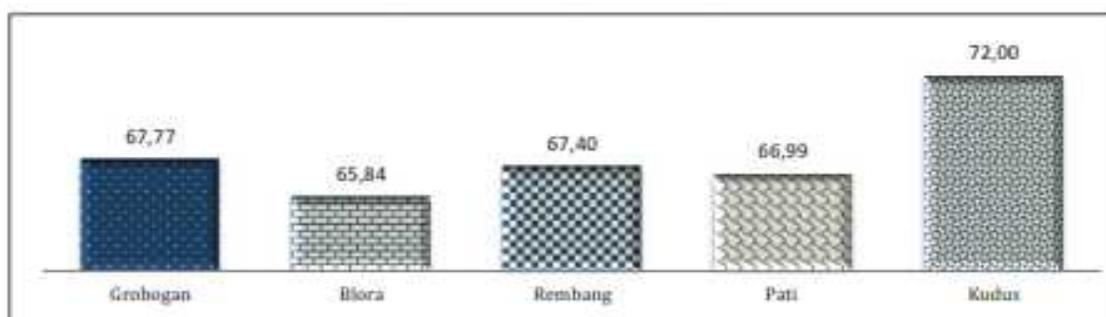
Gambar 2.11
Perkembangan IPM Rembang 2011-2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015

Jika dibanding dengan daerah di sekitar Rembang, pencapaian angka IPM Kabupaten Rembang lebih tinggi dibanding Kabupaten Blora (65,84) dan Pati (66,99). Akan tetapi, IPM Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibanding pencapaian Kabupaten Grobogan (67,77) dan Kudus (72,00). Perbandingan IPM kelima kabupaten tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut :

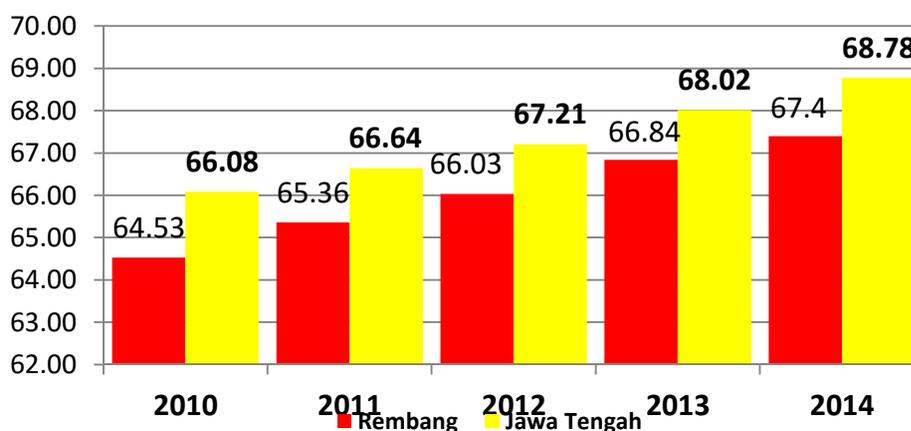
Gambar 2.12
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

Bila dilihat perkembangan angka IPM selama kurun waktu 2010-2014, pencapaian IPM Kabupaten Rembang selalu meningkat tiap tahunnya, secara absolut mengalami kenaikan sebesar 2,88 yaitu dari 64,53 pada tahun 2010 menjadi 67,40 pada tahun 2014. Dibanding dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, pencapaian IPM Kabupaten Rembang dari tahun 2010 sampai 2014 selalu dibawah angka IPM Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Rembang sejalan dengan tingkat capaian Provinsi Jawa Tengah, selalu mengalami kenaikan. Ini menunjukkan proses pembangunan manusia di Kabupaten Rembang sudah relatif bagus. Capaian perkembangan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pencapaian IPM tertinggi terjadi pada Kota Salatiga, dengan pencapaian sebesar 79,98. Peringkat IPM terendah terjadi pada Kabupaten Pemalang dengan pencapaian sebesar 62,35. Kabupaten Rembang berada di urutan ke-20 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sama dengan peringkat di tahun sebelumnya. Berdasarkan besaran IPM pada tahun 2014 ini, terdapat 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia "tinggi", dengan capaian IPM antara 70 dan 80.

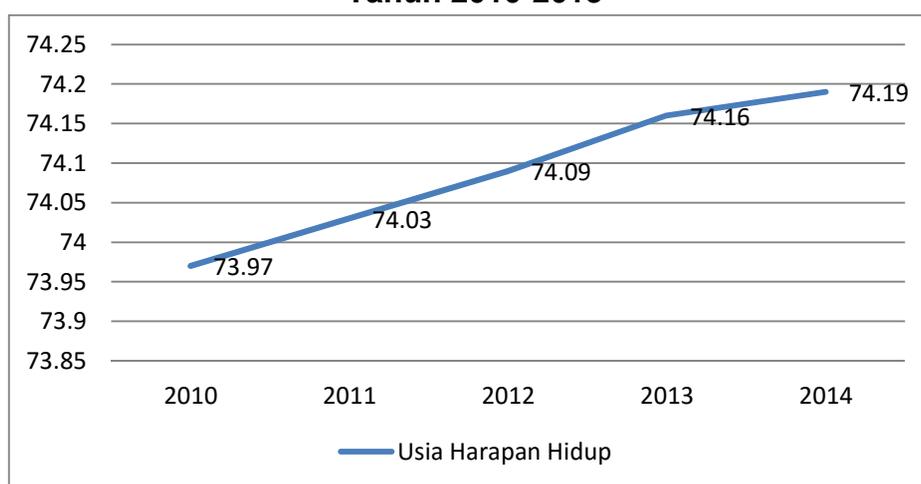
Peningkatan capaian IPM tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya capaian komponen pembentuk IPM yakni Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita.

2.1.2.8.1. Usia Harapan Hidup (Usia Harapan Hidup)

Berdasarkan data Susenas 2014, AHH Kabupaten Rembang adalah 74,19 tahun. Artinya, rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk Kabupaten Rembang dari lahir sampai meninggal dunia adalah 74,19 tahun, lebih tinggi dibanding AHH Jawa Tengah (73,88 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk Kabupaten Rembang untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk kategori sedang, standar harapan hidup paling tinggi adalah 85 tahun. Dalam lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Rembang selalu mengalami peningkatan, dari 73,97 tahun pada 2010, kemudian terus meningkat menjadi 74,03

tahun pada 2011; 74,09 tahun pada 2012; 74,16 tahun pada 2013 dan 74,19 tahun pada 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.14
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

AHH Kabupaten Rembang dalam lima tahun terakhir selalu di atas dari AHH Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan AHH Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut:

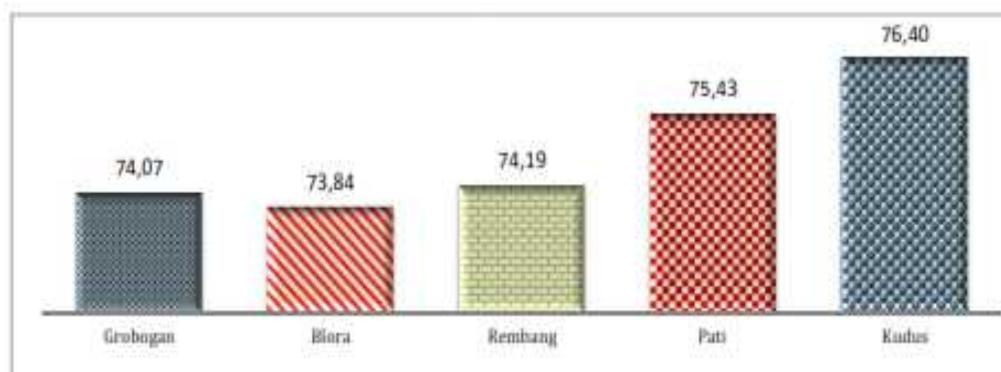
Gambar 2.15
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

AHH	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88
Rembang	73,97	74,03	74,09	74,16	74,19

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Dibanding kabupaten di sekitarnya, AHH Kabupaten Rembang termasuk relatif tinggi. AHH Kabupaten Rembang lebih tinggi dari AHH Kabupaten Grobogan (74,07 tahun) dan Kabupaten Blora (73,84 tahun). AHH Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibanding AHH Kabupaten Pati (75,43 tahun) dan Kabupaten Kudus (76,40 tahun). AHH Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dapat dilihat dari Tabel berikut:

Gambar 2.16
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Rembang dibandingkan dengan
Kabupaten Sekitar Tahun 2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Pada tahun 2014, Kabupaten Sukoharjo memiliki AHH tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 77,45 tahun, sedangkan AHH terendah terdapat di Kabupaten Brebes (67,90 tahun). AHH Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-22 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa. Secara umum, angka harapan hidup semua kabupaten/kota mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah semakin meningkat.

2.1.2.8.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Pada tahun 2014, HLS di Kabupaten Rembang sebesar 11,46 tahun, atau dengan kata lain penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Rembang mempunyai harapan dapat bersekolah sampai 11 tahun mendatang. Sedangkan HLS Jawa Tengah pada 2014 adalah sebesar 12,17 tahun atau selisih 5,83 tahun dari HLS maksimal. Dalam lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, HLS Kabupaten Rembang sebesar 10,60 tahun kemudian menjadi 11,02 tahun pada 2012 dan pada tahun 2014 menjadi 11,46 tahun. Meski demikian, Angka HLS Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir selalu di bawah HLS Jawa Tengah. Perkembangan HLS Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut:

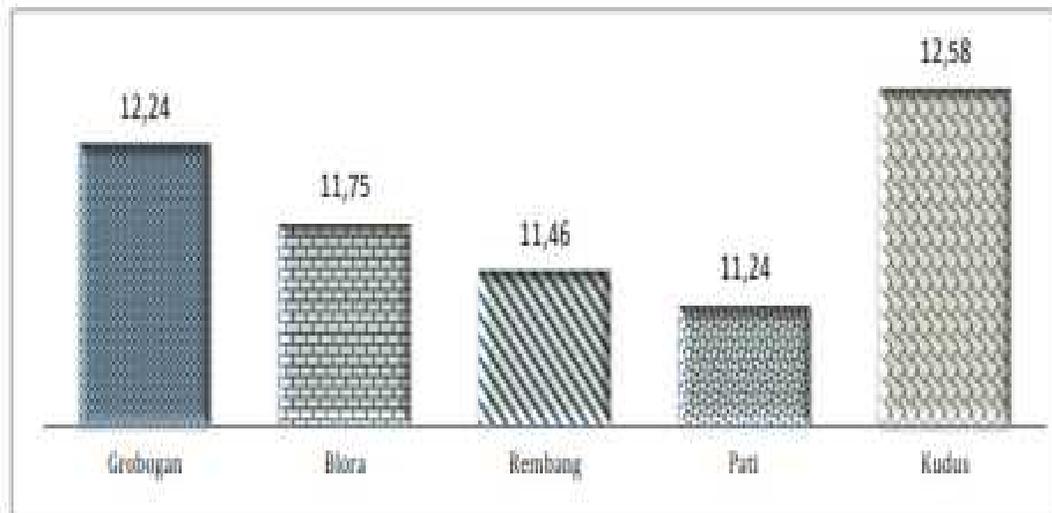
Gambar 2.17
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan dengan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

HLS	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17
Rembang	10,60	10,81	11,02	11,24	11,46

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Dibanding kabupaten di sekitarnya, HLS Kabupaten Rembang termasuk relatif rendah. HLS Kabupaten Rembang lebih rendah dari HLS Kabupaten Kudus (12,58 persen), Kabupaten Grobogan (12,24 persen) dan Kabupaten Blora (11,75 persen). HLS Kabupaten Rembang lebih tinggi dibanding HLS Kabupaten Pati (11,24 tahun).

Gambar 2.18
HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitar



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Pada tahun 2014, Kota Salatiga memiliki HLS tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 14,95 persen, sedangkan HLS terendah terdapat di Kabupaten Batang (10,65 tahun). HLS Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-29 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.8.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

SDM yang berkualitas merupakan aset paling penting bagi pembangunan. SDM berkualitas dapat terbentuk apabila setiap warga dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik dan bermutu. Rata-rata lama sekolah bisa digunakan sebagai indikator SDM yang berkualitas karena mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan tertinggi dari penduduk suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan kondisi tingkat partisipasi pendidikan penduduk suatu daerah, baik pada jenjang pendidikan yang diikuti maupun pada besaran peserta pendidikannya. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2010 sebesar 6,15 menjadi 6,90 pada tahun 2014. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 6,90 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Rembang baru bisa bersekolah rata-rata sampai kelas 6 SD. Hal ini masih terkait dengan pendidikan yang belum dinikmati dengan merata. RLS Kabupaten Rembang selalu di bawah RLS Jawa Tengah. Pada 2014, RLS Jawa Tengah sebesar 6,93 tahun. Perkembangan RLS Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari Gambar berikut.

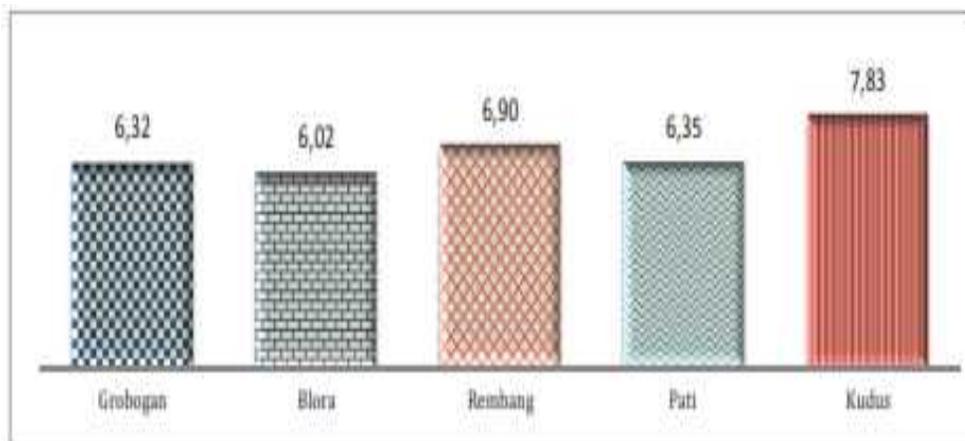
Gambar 2.19
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

RLS	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93
Rembang	6,15	6,28	6,41	6,70	6,90

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Dibanding kabupaten di sekitarnya, RLS Kabupaten Rembang termasuk relatif tinggi. RLS Kabupaten Rembang lebih tinggi dari RLS Kabupaten Grobogan (6,32 tahun), Kabupaten Blora (6,02 tahun) dan Kabupaten Pati (6,35 persen). RLS Kabupaten Rembang hanya lebih rendah dibanding RLS Kabupaten Kudus (7,83 tahun). Perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20
Rata-Rata Lama sekolah Kabupaten Rembang dibandingkan
dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2015



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Surakarta, yaitu selama 10,33 tahun (rata-rata penduduk Kota Surakarta bersekolah sampai jenjang kelas 1 SLTA). Sementara itu, pencapaian angka rata-rata lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Brebes (5,86 tahun) atau setara dengan kelas 5 SD. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-17 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.8.4 Purchasing Power Parity (PPP)

Dari hasil penghitungan, diperoleh PPP penduduk Kabupaten Rembang tahun 2014, yaitu Rp 9.013.010,- per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding keadaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 8.994.143,-. PPP Kabupaten Rembang

dalam lima tahun terakhir (2010-2014) lebih rendah dari PPP Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan PPP Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel berikut:

Gambar 2.21
PPP Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

PPP	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640
Rembang	8.389	8.705	8.882	8.994	9.013

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, PPP Kabupaten Rembang berada di bawah Kabupaten Grobogan (Rp 9.303.260,-), Pati (Rp 9.106.282,-) dan Kudus (Rp 10.102.141,-). PPP Kabupaten Rembang lebih tinggi dibanding Kabupaten Blora (Rp 8.568.156,-). Selengkapnya bisa dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.22
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013



Sumber: BPS Kab. Rembang Tahun 2015

PPP tertinggi berada di Kota Salatiga, yaitu Rp 14.204.827,- sedangkan PPP terendah berada di Kabupaten Pemalang (Rp 6.911.756,-). PPP Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-22 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.9. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk dari berbagai usia yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Pada Tahun 2013-2014, capaian APK pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. APK SD/MI dari 99,68% meningkat menjadi 101,28% menunjukkan capaian yang sudah cukup baik namun belum mendekati target RPJMD sebesar 105% dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (109,10%) dan Nasional (110,68%). APK SMP/MTs meningkat dari 96,99% menjadi 101,12% menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan capaian yang telah melampaui target RPJMD sebesar 100% dan capaian ini sudah diatas capaian Jawa Tengah (100,54%) dan Nasional (96,91%). APK SMA/SMK/MA juga meningkat signifikan dari 66,62% menjadi 73,31%. Sejalan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP, untuk APK SMA/SMK/MA, juga mengalami peningkatan signifikan dari 66,62% menjadi 73,31% dan telah berkontribusi terhadap capaian Jawa Tengah sebesar 73,05% namun masih dibawah Nasional (74,63).

Capaian APK jenjang pendidikan menengah dipengaruhi oleh antara lain kemampuan ekonomi masyarakat sehingga lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan keterbatasan sekolah menengah, terutama SMK belum semua kecamatan terdapat SMK. Perkembangan APK Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Rembang
Dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	SD/MI (%)			SMP/MTs (%)			SMA/SMK/MA (%)		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2010	96,86	108,00	116,77	95,53	99,40	98,11	54,52	64,62	69,60
2	2011	98,10	114,93	115,33	96,91	99,72	98,20	64,93	64,93	70,53
3	2012	99,67	109,06	115,43	96,98	100,50	99,47	65,86	67,00	76,40
4	2013	99,68	109,08	115,88	96,99	100,52	100,16	66,62	70,00	78,19
5	2014	101,28	109,10	110,68	101,12	100,54	96,91	73,31	73,05	74,63

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015 dan Dinas Pendidikan
Prov. Jawa Tengah Tahun 2015

2.1.2.10. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Pada Tahun 2014, capaian APM Kabupaten Rembang pada seluruh jenjang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih di bawah 100%, dan berada di bawah angka Jawa Tengah dan nasional (kecuali APM SMP/MTs yang diatas capaian nasional). Capaian APM SD/MI 87,41% belum mendekati capaian target RPJMD sebesar 93%, untuk itu capaiannya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target RPJMD dan MDGs dalam rangka menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Capaian APM SMP/MTs sudah mencapai target RPJMD sebesar 76%, adapun capaian APM SMA/SMK/MA masih ada gap yang jauh

dengan capaian Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci perkembangan APM di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rembang
Dan Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 - 2014

No	Tahun	SD/MI (%)			SMP/MTs (%)			SMA/SMK/MA (%)		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2010	83,49	97,08	95,23	66,76	76,87	50,12	35,51	50,12	55,73
2	2011	90,75	96,04	95,41	66,91	78,33	51,46	41,42	51,46	56,52
3	2012	90,97	98,30	95,55	67,06	78,92	53,00	44,44	53,00	57,74
4	2013	86,39	98,60	95,71	72,20	79,00	55,00	44,30	55,00	58,25
5	2014	87,41	98,32	95,30	77,26	77,83	59,00	45,05	59,20	55,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015 dan RKPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2015

2.1.2.11. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah yang berkontribusi pada capaian angka rata-rata lama sekolah . Pada kurun waktu 2010-2013, di Kabupaten Rembang masih ada penduduk yang tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD dengan jumlah yang cukup besar meskipun dari waktu ke waktu mengalami penurunan. APT SD/MI pada tahun 2010 sebesar 41,34% turun menjadi 37,82% pada tahun 2013, penurunan APT SD/MI lebih disebabkan karena masih berkembangnya persepsi masyarakat bahwa lebih baik bekerja daripada harus bersekolah. Di sisi lain pada jenjang SMP/MTS APT meningkat dari 20,01% pada tahun 2010 menjadi 22,85% pada tahun 2013, dan untuk jenjang SMA/SMK/MA meningkat dari 9,12% pada tahun 2010 menjadi 11,83% pada tahun 2013. Capaian APT SD/MI dan SMA/SMK/MA masih dibawah Jawa Tengah namun capaian APT SMP/MTs sudah diatas Jawa Tengah. Perkembangan indikator Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2010-2013, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2013

No	Tahun	Tidak/belum Pernah sekolah	Tidak/belum Tamat SD	SD/MI (%)	SMP/MTs (%)	SMA/SMK /MA (%)
1	2010	7,33	18,46	41,34	20,01	9,12
2	2011	7,94	18,29	39,34	22,41	9,36
3	2012	6,51	18,75	38,60	20,57	11,83
4	2013	5,61	17,53	37,82	22,85	11,83

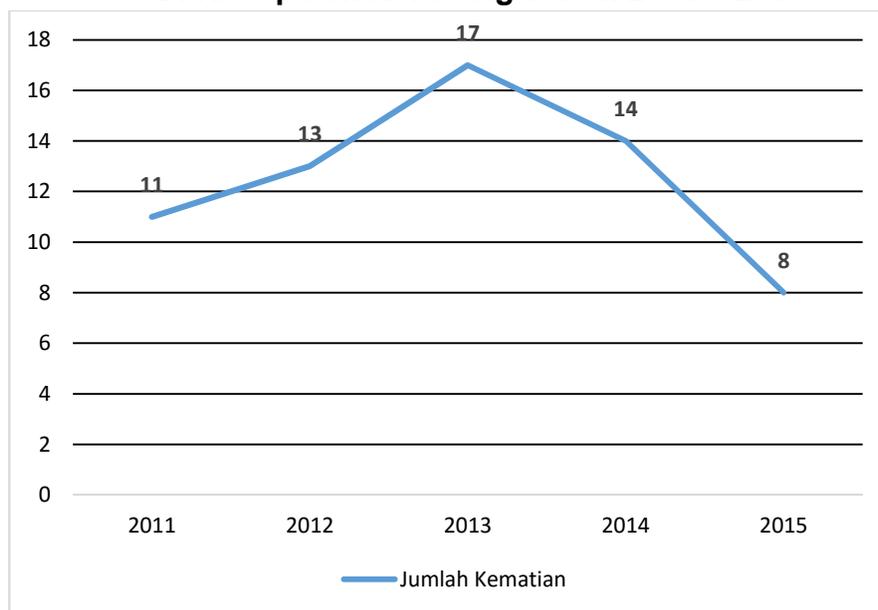
Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014 dan BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

2.1.2.12. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Angka Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak sampai 100.000 kelahiran. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu.

Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Perkembangan kasus kematian ibu sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

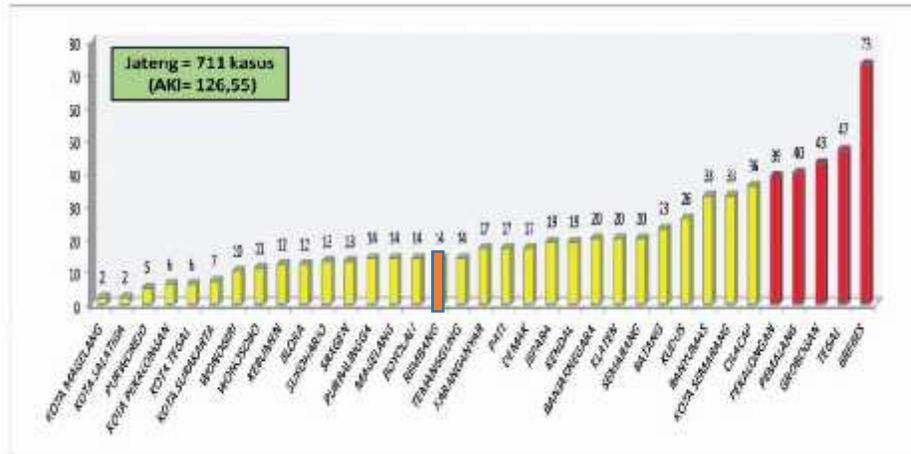
Gambar 2.23
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2015



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2015

Pada tahun 2015, posisi kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 16 terendah. Kondisi ini lebih baik dari kabupaten disekitarnya seperti Kabupaten Pati, Demak, dan Jepara kecuali Kabupaten Blora yang lebih rendah (12 kasus). Kasus Kematian Ibu Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 selengkapnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.24
Kasus Kematian Ibu Kabupaten Rembang dibandingkan dengan
Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

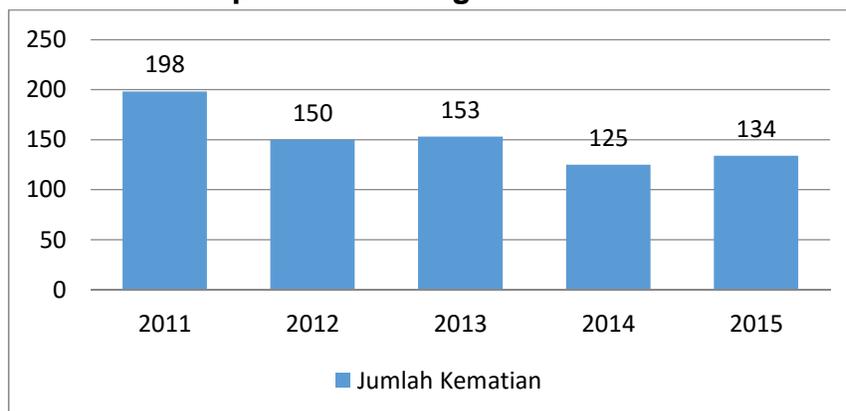


Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah, 2015

2.1.2.13. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang baik, trennya cenderung menurun. Namun Pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebanyak 9 kasus kematian bayi atau AKB dari 125 kasus di Tahun 2014 menjadi 134 kasus di Tahun 2015. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKBnya tinggi, ada di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang. Hal ini sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.25
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

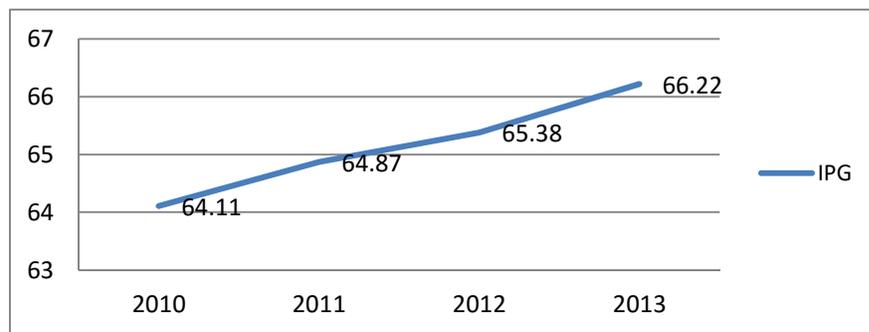


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2015

2.1.2.15. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama seperti IPM (UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan) dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Capaian IPG di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini menunjukkan naiknya kesadaran kaum perempuan dalam berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Rembang. Perkembangan IPG Kabupaten Rembang terlihat pada gambar berikut :

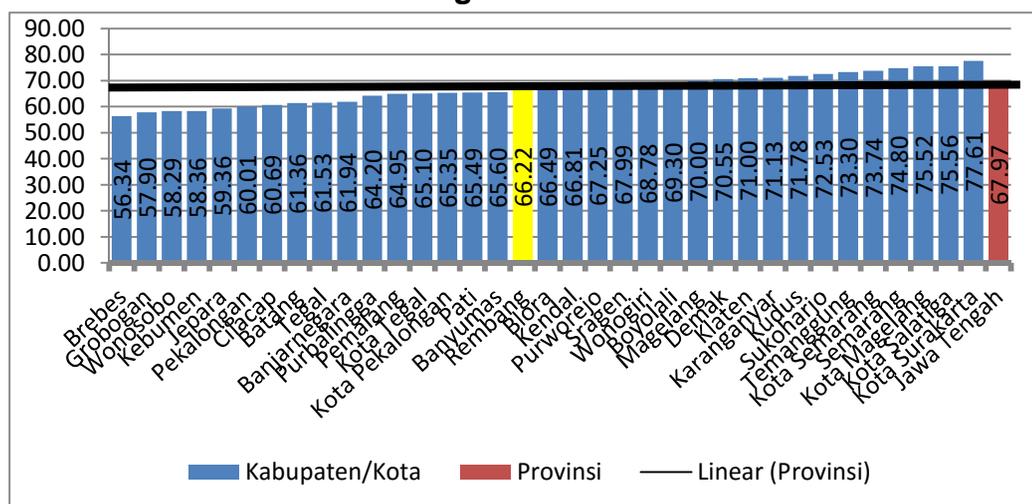
Gambar 2.30
Perkembangan IPG Kabupaten Rembang Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

Capaian IPG Kabupaten Rembang masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (67,97). Apabila dibandingkan dengan Kabupaten lain disekitarnya IPG Kabupaten Rembang berada diatas Kabupaten Jepara dan Pati, namun masih di bawah Kabupaten Blora dan Kudus. Selengkapnya posisi relatif IPG Kabupaten Rembang di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.31
IPG Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

Indikator komposit IPG meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan. Capaian angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan sumbangan pendapatan lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan. Sementara itu angka harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Perkembangan indikator IPG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IPG

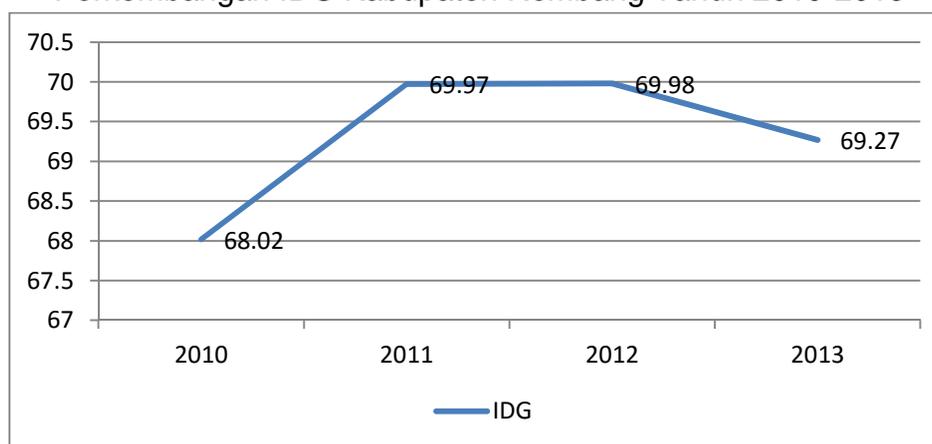
No	Indikator	2011		2012		2013		2014*		2015*	
		L	P	L	P	L	P				
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,82	70,78	67,00	70,98	68,62	72,55				
2	Angka Melek Huruf (%)	98,64	91,98	98,65	92,31	95,88	89,14				
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,75	7,63	8,77	7,80	7,78	6,84				
4	Sumbangan Pendapatan (%)	71,83	28,17	71,94	28,06	68,86	31,14				

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

2.1.2.16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berbeda dengan kondisi IPG yang semakin membaik, kondisi IDG di Kabupaten Rembang relatif berfluktuasi. IDG pada tahun 2010 sebesar 68,02 naik menjadi 69,27 pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang menyadari kewajibannya untuk berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik baik sebagai wirausahawan maupun anggota DPRD. Perkembangan indikator IDG dapat dilihat pada gambar berikut :

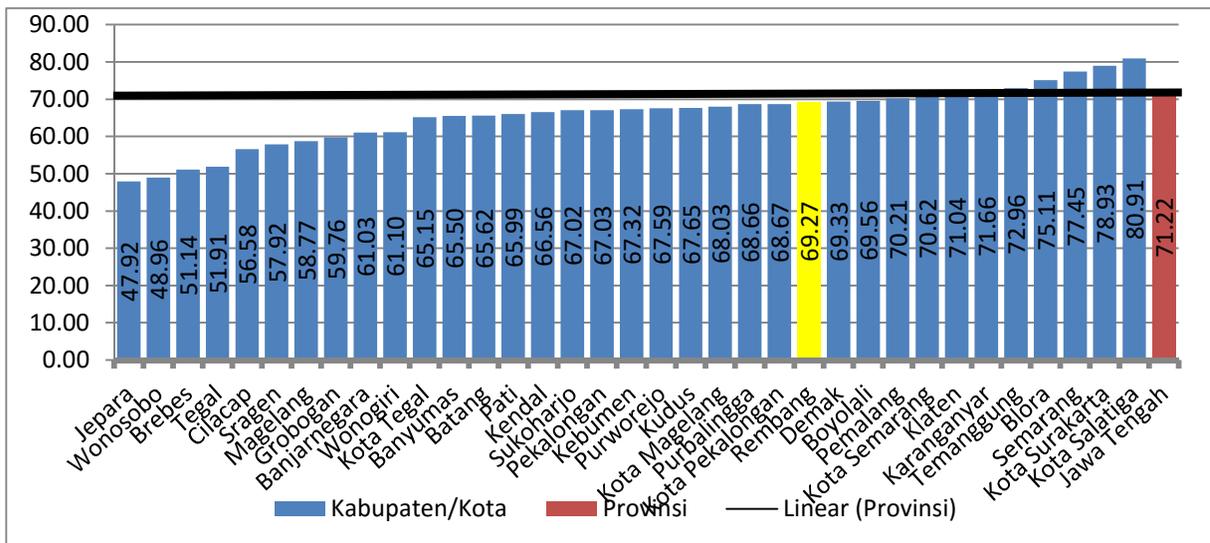
Gambar 2.32
Perkembangan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

IDG Kabupaten Rembang masih berada jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah yang sudah mampu mencapai 71,22. Adapun jika dibandingkan dengan Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara, capaian dan posisi Rembang masih di atasnya. Posisi Rembang untuk IDG hanya berada di bawah Kabupaten Blora. Perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.33
IDG Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

Indikator IDG meliputi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai manager, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel 2.18
Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG

No	Indikator	2010	2011	2012	2013
1	Keterlibatan Perempuan di parlemen	20,00	22,22	8,89	20,00
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	45,56	45,14	40,33	43,77
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	30,36	32,33	31,02	31,14

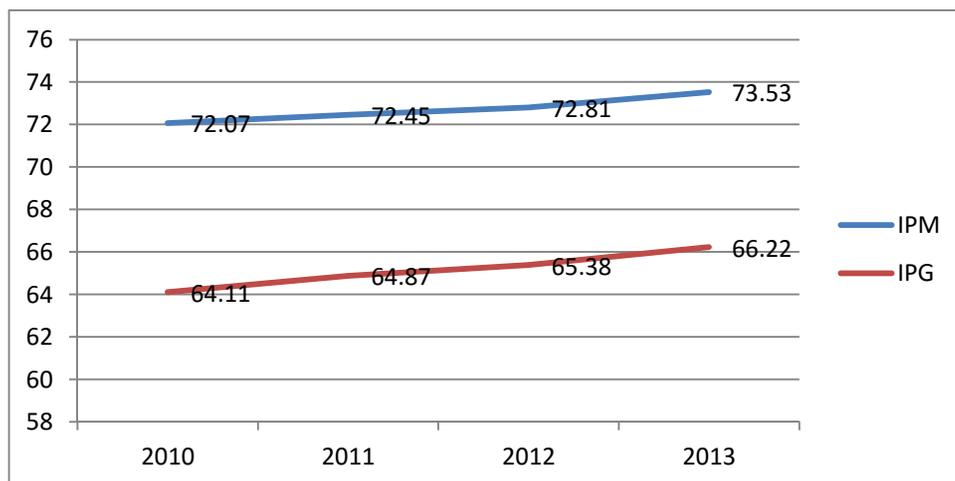
Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2015

2.1.2.17. Perbandingan IPM dan IPG

Hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari masih jauhnya capaian indikator IPM dan IPG yang ada. Meskipun

kondisinya sama-sama meningkat, namun capaian IPG masih jauh berada di bawah capaian IPM seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.34
Perbandingan Capaian IPM dan IPG Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

2.1.2.18. Kebudayaan

Kebudayaan sebagai kekayaan daerah dapat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Bahkan adanya kebudayaan yang kuat (memiliki nilai-nilai yang luhur, seni yang tinggi dan kekhasan daerah) akan mampu menjadi daya tarik untuk mendukung perekonomian. Budaya dan seni masyarakat yang terus dikembangkan juga akan menjadi alat ampuh untuk menangkal budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Perkembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Rembang pada tahun 2010-2014 tidak ada perubahan (stagnan) terlihat dari jumlah kelompok kesenian yang tetap 311 grup, jumlah seniman tetap 1.227 orang dan jumlah gedung kesenian tetap sebanyak 2 unit. Capaian indikator tersebut pada Tahun 2010-2014, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Seni dan Budaya
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Kelompok kesenian	Grup	311	311	311	311	311
2.	Jumlah Seniman	Orang	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
3.	Jumlah gedung kesenian	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinbudparpora Kab. Rembang, 2015

2.1.2.19. Pemuda dan Olah Raga

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan mampu berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2014, di Kabupaten Rembang mengalami penurunan jumlah organisasi kepemudaan (OK) yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara namun ada peningkatan pada Karang taruna dan PPMI. Perkembangan organisasi kepemudaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Organisasi Kepemudaan
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

No	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Jumlah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	KNPI	1	1	1	1	1
2	AMPI	1	1	1	1	-
3	Pemuda Ansor	1	1	1	1	1
4	Pemuda Muhammadiyah	1	1	1	1	1
5	Pramuka	1	1	1	1	1
6	KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda)	20	22	22	22	24
7	Karang Taruna	-	-	-	-	2
8	KOSGORO	1	1	1	1	-
9	Rembang Bangkit Foundontion	1	1	1	1	-
10	Gerakan Pemuda Nusantara	1	1	1	1	-
11	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI)	1	1	1	1	2

Sumber: Dinbudparpora Kab. Rembang, 2015

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari seluruh cabang olah raga yang dibina oleh KONI Kabupaten Rembang hanya terdapat 6 jenis sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun perkembangan sarana prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga
di Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lapangan Sepak Bola	252	252	252	252	252
2	Lapangan Basket	44	44	46	46	46
3	Lapangan Volley	272	272	276	276	276
4	Lapangan Bulu Tangkis	34	34	38	38	38
5	Kolam Renang	2	2	2	2	2
6	Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna	8	16	19	19	19

Sumber: Dinbudparpora Kab. Rembang, 2015

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran kondisi Kabupaten Rembang pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Layanan Wajib dan Layanan Pilihan. Gambaran tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan antara penduduk yang sedang sekolah dengan penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator untuk melihat kemauan dan kemampuan penduduk dalam meningkatkan kualitas. Artinya bila suatu daerah memiliki persentase penduduk yang tinggi dalam partisipasi sekolah, maka dapat dikatakan bahwa penduduk daerah tersebut telah memiliki wawasan masa depan dan kemampuan finansial yang baik.

Perkembangan capaian APS tahun 2011-2014 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung meningkat. Capaian tahun 2014 sebesar 99,69 telah meningkat dari tahun sebelumnya 99,62. Capaian APS SD/MI sudah diatas capaian Jawa Tengah sehingga memberikan kontribusi pada capaian APS SD/MI Jawa Tengah. Pada jenjang SMP/MTs, APS meningkat dari 95,80 menjadi 100. Perkembangan APS di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2013, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22
Perkembangan angka Partisipasi Sekolah (APS)
Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

No	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTs (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov
1	2010	99,00	98,95	84,26	85,33
2	2011	98,81	98,62	90,04	88,39

No	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTs (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov
3	2012	99,35	98,87	97,76	89,59
4	2013	99,62	99,28	95,80	90,73
5	2014*	99,69		100,00	

Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015 dan BPS Prov. Jawa Tengah Tahun 2014

2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Pada kurun waktu 2012-2014 dan sejalan dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sudah mengalami perkembangan baik karena terus meningkat, namun masih membutuhkan perhatian serius untuk ketersediaan sekolah SMP/MTs yang capaiannya masih rendah dan perkembangan per tahun lambat. Perkembangan secara rinci pada Tahun 2010-2014, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.23

Rasio ketersediaan sekolah terhadap 10.000 jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio SD/MI terhadap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun	60,10	69,03	68,71	69,78	71,76
2	Rasio SMP/MTs terhadap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun	27,13	27,72	29,26	30,93	31,57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

3) Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu Tahun 2010-2014, rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rembang relatif stabil. Pada tahun 2014, semua jenjang pendidikan capaiannya tetap dari tahun sebelumnya sebesar 15. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Rasio Guru dan murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

No.	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD / MI	14	15	15	15	15
2	SMP / MTs	15	14	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, 2015

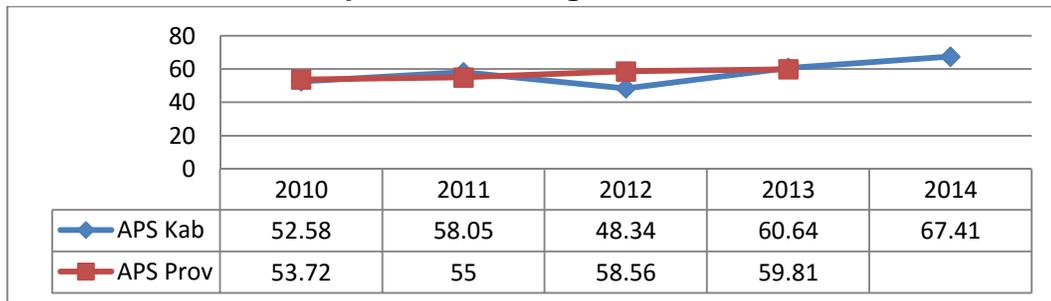
b. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Perkembangan capaian APS tahun 2010-2014, cenderung mengalami kenaikan walaupun relatif kecil. Pada Tahun 2014, APS SMA/SMK/MA naik dari capaian tahun sebelumnya dan capaiannya sudah diatas capaian provinsi. Selengkapnnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.35

Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

2) Rasio Guru terhadap Murid

Pada Tahun 2010-2014, rasio ketersediaan guru per 10.000 jumlah murid SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang tetap, yaitu 12. Rasio guru terhadap murid dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25

Rasio Guru dan murid Jenjang Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Guru	1.472	1.533	1.621	1.708	1.714
Jumlah Murid	17.424	18.444	19.262	19.850	20.867
Rasio Guru terhadap murid	11,84	12,03	11,88	11,62	12,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan APK PAUD tahun 2010-2014, usia 4-6 tahun mengalami perkembangan baik karena cenderung meningkat. Namun demikian perlu terus ditingkatkan mengingat capaiannya masih cukup rendah. Data selengkapnnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.36

Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD Kelompok Usia 4-6 Tahun Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

d. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Pada Tahun 2010-2014, ruang kelas dengan kondisi baik pada pendidikan PAUD, dasar dan menengah mengalami peningkatan kecuali SD. Terjadi penurunan jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada pendidikan PAUD, dasar dan menengah kecuali MTS, begitu pula terjadi penurunan jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada pendidikan PAUD, dasar dan menengah kecuali MI sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.26
Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2010 - 2014 (Unit)

Jenjang Pendidikan	Kriteria	2010	2011	2012	2013	2014
TK dan RA	Baik	536	561	761	604	718
	Rusak Ringan	86	11	24	23	20
	Rusak Berat	16	81	95	111	106
	Jumlah	638	653	880	738	844
SD	Baik	1426	1471	1685	1814	1787
	Rusak Ringan	500	475	431	529	556
	Rusak Berat	646	642	482	227	226
	Jumlah	2572	2588	2598	2570	2569
MI	Baik	168	173	181	176	204
	Rusak Ringan	61	73	73	77	72
	Rusak Berat	30	34	40	32	37
	Jumlah	259	280	294	285	313
SMP	Baik	502	512	532	536	550
	Rusak Ringan	83	92	91	98	81
	Rusak Berat	29	7	8	17	15
	Jumlah	614	611	631	651	646
MTs	Baik	189	222	216	228	230
	Rusak Ringan	48	46	47	64	86
	Rusak Berat	20	23	31	30	21
	Jumlah	257	291	294	322	337
SMA	Baik	175	194	212	192	207
	Rusak Ringan	27	15	19	23	22
	Rusak Berat	9	8	5	11	6
	Jumlah	211	217	236	226	235
MA	Baik	120	139	134	126	146
	Rusak Ringan	10	13	16	28	28
	Rusak Berat	3	0	12	11	3
	Jumlah	133	152	162	165	177
SMK	Baik	149	167	211	205	219
	Rusak Ringan	25	34	40	40	32
	Rusak Berat	0	0	0	6	0
	Jumlah	174	201	251	251	251

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

e. Angka Putus Sekolah

Pada kurun waktu 2010-2014, Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan menengah (SMA/SMK/MA) mengalami penurunan. Pada tahun 2014, penurunan angka putus sekolah sudah cukup signifikan menjadi

0,01 %. Adapun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, masih perlu dioptimalkan lagi penurunannya. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.27
Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,09	0,07	0,08	0,03	0,01
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,19	0,35	0,40	0,16	0,11
3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,42	0,41	0,38	0,37	0,29

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

f. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan capaian Angka Kelulusan pada tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, angka kelulusan SD/MI sudah optimal namun untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan 0,14% dari 99,90% tahun sebelumnya menjadi 99,76%. Angka Kelulusan pada Tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.28
Angka Kelulusan Masing-masing Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang 2010 - 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,99	99,99	99,99	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,50	97,96	99,02	99,01	99,38
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	99,36	92,31	96,77	99,90	99,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

g. Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Kondisi pada Tahun 2010-2014, capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Kinerja tahun 2014 juga cukup baik yaitu untuk SD/MI dari 77,81 menjadi 80,08; SMP/MTS dari 92,32 menjadi 97,13; dan SMA/SMK/MA dari 96,36 menjadi 97,33. Perkembangan capaian pada Tahun 2010-2014, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.37
Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 cenderung fluktuatif. Data pada tabel dibawah, menggambarkan rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya masih dibawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk.

Tabel 2.29
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2014

Tahun	Jumlah Puskesmas (Unit)	Jumlah Penduduk (Orang)	Rasio / 30.000 Penduduk
2010	16	592.514	0.81
2011	16	598.218	0.80
2012	16	606.005	0.79
2013	16	611.495	0.78
2014	16	627.221	0.77
2015*	16	627.221	0.77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2015 (data diolah)

b. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk menggambarkan perbandingan dokter dengan jumlah penduduk setiap tahunnya per 100.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2010-2014 Trend Rasio dokter di kabupaten Rembang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, capaian rasio sebesar 9,88, masih sama seperti tahun sebelumnya 8,99 yang menunjukkan bertambahnya jumlah cakupan layanan kesehatan oleh dokter. Perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Rasio Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Tahun 2010 - 2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter Umum (Pusk, RSU dan faskes lainnya)	59	67	60	55	62	61
2	Jumlah Penduduk	592.514	598.218	606.005	611.495	627.221	627.221
3	Rasio/100.000	9.96	11.20	9.90	8.99	9.88	9.88

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2015

a. Persentase Balita 0-6 bulan yang Mendapat ASI Eksklusif

Cakupan pelayanan kesehatan anak Balita khususnya pemberian ASI eksklusif dari tahun 2011 mengalami peningkatan dan capaiannya tahun 2015 sudah diatas capaian provinsi. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Rembang mulai terbangun akan pentingnya ASI eksklusif bagi tumbuh kembang balita. Capaian ini juga didukung melalui penyebaran informasi melalui semua Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Puskesmas perawatan persalinan dengan alat/media promosi ASI Eksklusif. Gambaran perkembangan tersebut sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.38
Persentase bayi diberi ASI Eksklusif Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase balita usia 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	65,37	66,82	73,37	80,95	70,22

Sumber : BPS Kab. Rembang dan BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

b. Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Rembang sesuai dengan target MDGs adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 fluktuatif. Trend Angka kesakitan TB menunjukkan peningkatan, sama halnya dengan penemuan kasus HIV/AIDS juga mengalami peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan pemerintah daerah untuk meningkatkan langkah preventif kuratif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan dan penanganan bagi orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Kondisi Penyakit menular Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2015

Tahun	IRDBD Per 100.000 Penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	HIV / AIDS	
				kasus HIV	Kasus AIDS
2010	38,89	2,46	43,30	8	19
2011	35,40	2,83	48,76	14	25
2012	59,40	1,54	50,14	6	14
2013	54,80	1,12	59,66	13	19
2014	34,20	1,40	66,56	19	35
2015	88,18	1,70	66	26	34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

a. Prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitasi prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2014 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 314,83 Km atau 48,98%. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2014 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 73,02%, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.32
Perkembangan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No.	Item	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 642,75 km)	346,61	321,75	351.58	356.88	314.83
2	Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 1.239,9 m pada 126 unit)	96	84	92	94	92

Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

Capaian pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari prosentase kondisi jalan baik pada tahun 2010 sepanjang 346,61 km atau sebesar 53,92% dari total panjang jalan

kabupaten 642,75 km mengalami peningkatan menjadi 356,88 km atau sebesar 55,52% pada tahun 2013 meskipun kemudian turun menjadi 48,98% pada tahun 2014. Penurunan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh :

1. Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) terutama jalur wilayah penambangan material apalagi dibarengi dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi juga ikut memperparah rusaknya kondisi jalan dan jembatan.
2. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
3. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 124 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2014 sebesar 19.561,45 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 92,30% sebagaimana tabel dan grafik dibawah.

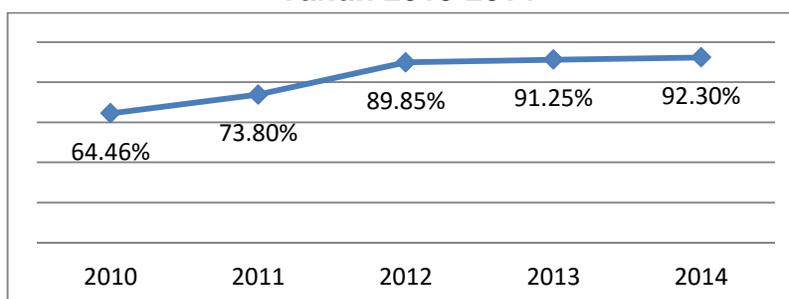
Tabel 2.33

Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar)	13,662	15,640	19,042	19,338	19,561
2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dalam ribuan)	8,100,154	8,100,154	8,101,319	8,101,319	8,101,319

Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

Gambar 2.39
Prosentase Irigasi Kabupaten Rembang dengan Kondisi Baik
Tahun 2010-2014



Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

Pembangunan sumber daya air dalam 5 tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan prasarana jaringan irigasi dengan capaian indikator

prosentase irigasi kabupaten sebesar 92,30%. Namun yang masih harus menjadi perhatian serius kedepan adalah permasalahan dalam penyediaan air baku, dimana kapasitas maksimal yang tersedia sampai tahun 2014 baru mencapai 8.101.319.000 m³ yang sangat tergantung dengan kondisi tinggi rendahnya curah hujan tahunan dikarenakan sebagian besar berupa tampungan air (embung). Untuk itu pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air.

c. Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

Cakupan pelayanan air minum yang aman sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 70% baik wilayah perkotaan maupun perdesaan, cakupan sanitasi layak sebesar 71,25% dan cakupan layanan persampahan sebesar 20,4%. Adapun perkembangan cakupan pelayanan air minum, cakupan layak sanitasi dan cakupan layanan persampahan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Cakupan Layanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No.	Cakupan Layanan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Air minum	51,67%	55,54%	60,04%	66,93%	70%
2	Sanitasi (dasar)	48,94%	54,14%	56,09%	66,42%	71,25%
3	Persampahan	19,1%	19,4%	19,85%	20,1%	20,4%

Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.4. Perumahan

Sesuai amanat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di atas, kebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan antara lain diarahkan pada upaya terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuh kembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat dan pemerataan pembangunan prasarana sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan bidang perumahan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan meningkatnya kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya beserta kelengkapan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 adalah sebesar 108.662 unit atau 64,06 % dari total rumah sebanyak 169.627 unit. Perkembangan rumah layak huni dan tidak layak huni sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.35
Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No.	Item	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Rumah	161.860	164.612	166.103	167.845	169.627
2	Rumah Layak Huni	62.672	67.794	79.475	85.189	108.662
3	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	99.188	96.818	86.628	82.656	60.965
	% Rumah Layak Huni	38,72%	41,18%	47,85 %	50,75%	64,06%

Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Rembang terus diupayakan untuk menurunkan kawasan permukiman kumuh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang terindikasi dari penurunan luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani dalam 5 tahun terakhir dari 1.482 Ha pada tahun 2010 menurun menjadi 1.182 Ha pada tahun 2014, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2014

No.	Item	2010	2011	2012	2013	2014	2015**
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani (hektar)	1.482	1.411	1.369	1.328	1.182	

Sumber: DPU Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.5. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci tentang kawasan strategis, arahan peraturan zonasi, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, utamanya untuk pengendalian pemanfaatan ruang, serta sebagai upaya dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang.

Program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terus menerus, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Agar dapat lebih optimal, penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan peran masyarakat.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang menjadi penting dan menjadi tugas berat bagi semua pemangku kepentingan sehingga perlu komitmen pemahaman dan aksi bersama sesuai tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing institusi dan stakeholders di semua level pemerintahan dan peran serta masyarakat karena paradigma pasca Undang-Undang Penataan Ruang Tahun 2007 bahwa muara pelanggaran tata ruang menjadi persoalan hukum.

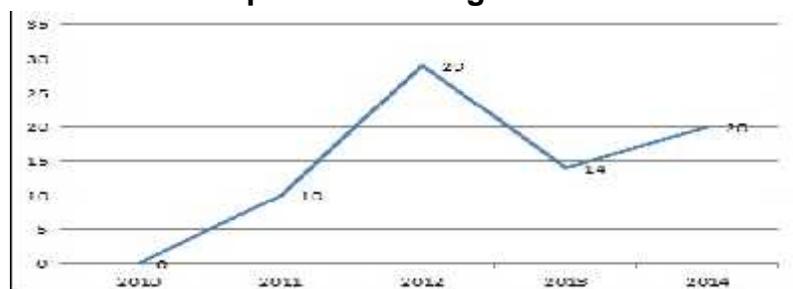
Sejalan dengan hal tersebut dan sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah Daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan

Capaian kinerja penyelenggaraan bidang penataan ruang tahun 2014 meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau per luas wilayah perkotaan mencapai 7,78% dengan proporsi Luas RTH 661,478 Ha dari Luas HPL/ HGB 8.502,717 Ha.
2. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan pembahasan forum BKPRD dalam rangka penerbitan rekomendasi BKPRD sebanyak 20 buah atau meningkat 45,86% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kondisi investasi di Kabupaten Rembang cenderung semakin meningkat, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 2.40

Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Rembang 2010-2014



Sumber: BKPRD Kab. Rembang, 2015

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan bidang penataan ruang sebagai satu kesatuan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer dalam jangka waktu 5 tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan mulai meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang khususnya pada aspek pelaksanaan penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

2.1.3.1.6. Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan urusan daerah bidang perhubungan diarahkan pada peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan meliputi pemfungsian terminal penumpang dan terminal barang; pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan meliputi pelayanan armada minibus dan angkutan perdesaan di setiap kecamatan, dan pengembangan trayek ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau pelayanan transportasi; serta pembangunan sistem jaringan prasarana transportasi laut yaitu pembangunan pelabuhan Terminal Sluke di wilayah pantai Kecamatan Sluke sebagai pelabuhan pengumpan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Pelayanan Perhubungan
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

NO	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pelanggaran ijin trayek	101	98	34	40	33
2.	Pelanggaran uji	110	107	71	58	58
3.	Pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya	9	22	1	0	0
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	4.027	4.382	4.998	5.417	6.546
5.	Kendaraan Bermotor yg di Uji	8.187	8.756	9.232	9.729	10.216
6.	Pelanggaran Jalur Penangkapan/pelayaran	3	0	0	0	0
7.	Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan	3	0	0	2	0
8.	Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut yang dilindungi	2	0	0	0	0
9.	Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal	51	10	105	105	79
10.	Jumlah Angkutan Darat	546	579	614	748	925
11.	Jumlah penumpang angkutan darat	6.945.950	2.981.268	2.970.956	2.351.737	2.156.071
12.	Kecelakaan di Laut	-	5	1	5	2

Sumber: Dinhubkominfo Kab. Rembang, 2015



Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2014 diantaranya dapat diketahui dari prosentase cakupan angkutan darat sebesar 0,04% dengan proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 926 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 2.156.071 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan dalam 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Fasilitas Perhubungan
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No.	Fasilitas Perhubungan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rambu 60 x 60 cm	30	263	281	121	40
2	Rambu 90 x 90 cm	-	-	-	90	-
3	Rambu model F	5	28	15	24	14
4	RPPJ Kecil 1 Muka	-	45	-	3	-
5	RPPJ besar 1 Muka	-	2	4	-	-
6	RPPJ besar 2 Muka	-	1	-	-	-
7	Warning Light Pijar	2	6	1	-	6
8	Warning Ligh LED	-	-	7	4	-
9	Traffic Light Pijar	-	-	-	3	-
10	Traffic Light LED	-	-	-	-	1
11	Guardraill	-	-	140 m	-	140 m
12	LPJU LED	-	-	-	62	-
13	LPJU Solar Cell	-	-	12	-	-
14	Marka	-	757m ²	5.034 m ²	10.835 m ²	660 m ²
15	Zebra Cross	-	-	-	-	-
16	Shelter	-	-	1	3	2
17	Paku Jalan	-	-	282	-	-

Sumber: Dinhubkominfo Kab. Rembang, 2015

4. Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup Kabupaten Rembang diarahkan pada peningkatan perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup daerah bertujuan untuk pencegahan, pengendalian, serta penyelamatan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hal demikian dilaksanakan bersinergi dengan upaya meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat terhadap peran penting fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Persoalan degradasi lingkungan masih menjadi isu global, sehingga ke depan prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup masih menjadi agenda mendesak kita bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup dalam 5 tahun terakhir terjadi kecenderungan meningkatnya upaya pencegahan, pengendalian, serta penyelamatan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kondisi lingkungan hidup

tersebut ditunjukkan pada capaian hasil kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2010-2014 dalam tabel berikut:

Tabel 2.39
Kinerja Pelayanan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengawasan thdp pelaksanaan AMDAL					
	a. Perusahaan wajib AMDAL yg diawasi	-	-	1	1	5
	b. Perusahaan wajib AMDAL	-	-	1	1	5
2.	Penegakan Hukum Lingkungan :					
	a. Kasus lingkungan yg diselesaikan	3	5	7	12	4
	b. Jumlah Kasus yang ada	4	5	8	12	4
3.	Kebersihan pasar tradisional					
	a. Pasar tradisional yang tergolong baik	-	-	3	5	11
	b. Jumlah pasar tradisional	-	-	4	12	12
4.	Penanganan Sampah					
	a. Volume sampah yg tertangani	346,8	353.9	361.2	368.5	377,9
	b. Volume produksi sampah	1.606	1.691	1.778	1.853	1.985

Sumber: BLH Kab. Rembang, 2015

Capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup tahun 2014 sebagai berikut :

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% yaitu proporsi jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi 5 dari jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 5.
2. Penegakan hukum lingkungan sebesar 100% yaitu proporsi jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan 4 dari jumlah kasus lingkungan yang ada 4.
3. Kebersihan pasar tradisional sebesar 91,6% yaitu proporsi jumlah pasar tradisional yang tergolong baik 11 dari jumlah pasar tradisional 12.
4. Penanganan sampah sebesar 20,15% yaitu proporsi volume sampah yang ditangani 377,90 m³ dari volume produksi sampah 1.875,2 m³.
5. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 penduduk sebesar 0,25 yaitu proporsi jumlah daya tampung TPS 152 m³ dari jumlah penduduk 612.552 jiwa.

2.1.3.1.7 Pertanahan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan.

Sejalan dengan kebijakan nasional bidang pertanahan pada periode tahun 2010-2014 maka secara prinsip pelaksanaan kewenangan tersebut menyesuaikan dengan agenda pembangunan di Kabupaten Rembang, dalam hal ini meliputi :

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui instansi/SKPD yang membutuhkan tanah.
2. Ijin lokasi melalui KPPT sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
3. Ganti kerugian diberikan bila ada kegiatan pengadaan tanah.
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah menyesuaikan agenda Landreform dari BPN.
5. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, berupa pemberian rekomendasi terkait tanah Negara dan lain-lain.
6. Perencanaan penggunaan tanah, pada tahun 2014 melalui KPPT mulai diawali penyusunan perbub tentang Alih Fungsi Lahan dalam rangka pelayanan pemberian ijin alih fungsi lahan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan bidang pertanahan periode tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.40
Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2015

No.	Pelayanan Urusan Pertanahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang tanah yang bersertifikat	120.010	122.462	126.675	139.115	141.700	5.950
2	Bidang tanah di Kab. Rembang	365.502	365.502	365.502	365.502	365.502	-
3	Luas bidang tanah yang sudah bersertifikat (ha)	520	693	838	892,8	912,1	675,864
4	Sertifikasi tanah nelayan (bidang)	-	100	-	200	500	200
5	Sertifikasi PRONA (bidang)	1.000	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
6	Sertifikasi PRODA (bidang)	99	100	150	100	100	100
7	Sertifikasi UMKM (bidang)	400	-	100	150	100	-

Sumber: BPN Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.8 Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kepemilikan dan Rasio/Persentase Penduduk ber KTP

Rasio Penduduk ber KTP yaitu persentase penduduk yang mempunyai KTP terhadap penduduk yang wajib KTP (usia 17 tahun keatas atau yang sudah pernah menikah). Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Rembang pada Tahun 2010 sebesar 295.263 (45,21%) mengalami kenaikan menjadi sebesar 441.768 (87,52%) pada Tahun 2015.



Kenaikan persentase kepemilikan tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan penerapan e-KTP (selanjutnya penyebutan e-KTP menjadi KTP-el sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Rasio/persentase kepemilikan KTP dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Kepemilikan KTP di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	653.078	666.225	689.308	617.067	612.552	619.092
2	Jumlah Penduduk ber KTP	295.263	355.554	394.356	421.143	546.396	441.768
3	Persentase Penduduk berKTP	45,21	53,37	57,21	68,25	89,20	87,52

Sumber : Dindukcapil Kab. Rembang, 2015

b. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran

Kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rasio penduduk berakte kelahiran sebesar 57,97 naik menjadi 70,63 pada tahun 2014. Peningkatan yang cukup besar (12,66) ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat. Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir di Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2014, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.42
Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk	653.078	666.225	689.308	617.067	612.552
2	Jumlah Penduduk dg Akta Kelahiran	378.598	396.510	413.881	421.251	432.628
3	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	57,97	59,52	60,04	68,27	70,63

Sumber : Dindukcapil Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Peningkatan partisipasi perempuan diberbagai bidang pembangunan akan meningkatkan capaian IDG (indeks pemberdayaan gender). Partisipasi tersebut dapat ditingkatkan melalui partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta. Perkembangan tahun 2010-2014, persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami peningkatan sebesar 12,86% dari 51,02% (Tahun 2010) menjadi 64,85 (2013) dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2014 menjadi 63,88%. Peningkatan tersebut karena berdirinya perusahaan-perusahaan dan UMKM

yang berkembang di Kabupaten Rembang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.41
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

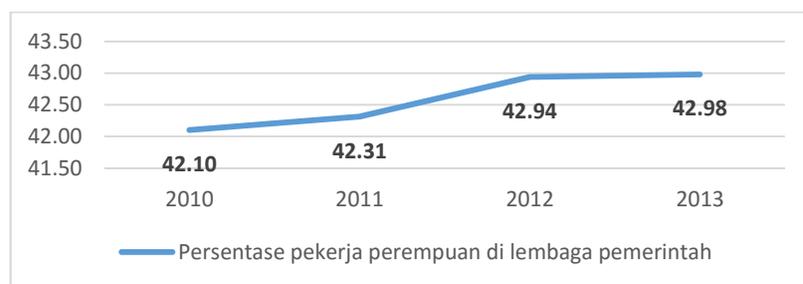


Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015 (data diolah)

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Peningkatan partisipasi perempuan diberbagai bidang pembangunan akan meningkatkan capaian IDG (indeks pemberdayaan gender). Partisipasi tersebut dapat ditingkatkan melalui partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah. Perkembangan tahun 2010-2013, persentase perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah pada tahun 2010 sebesar 42.10% naik menjadi 42.98% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Kabupaten dalam memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk maju, mapan dan berkembang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.42
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2013



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015 (data diolah)

c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sesuai Keputusan Bupati Rembang No. 163 Tahun 2005, Kabupaten Rembang telah membentuk UPT Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Rembang dengan nama Tim “Semai RWC3” (*Rembang Woman Child Crisis Center*). Pembentukan Tim tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Peraturan di Kabupaten Rembang sebagai landasan

operasional sudah cukup kuat, antara lain Perbup No. 29 Tahun 2008 tentang Standart Operasional Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sedangkan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 tahun 2010 ditunjukkan oleh Matrik Capaian Performance Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2015

Uraian	Capaian Performance					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator SPM, sbb:						
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
2) Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	50	50	75	75	100	100
b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100
2) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	100	100	100	100	100	100
3) Cakupan RSUD/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	50	100	100	100	100
4) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	100	100	100	100	100	100
5) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksanaan kasus korban kekerasan	100	100	100	100	100	100

Uraian	Capaian Performance					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit						
c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
1) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	42	58	58	58	70	75
2) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	29	29	50	50	70	70
3) Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	50	50	65	65	75	75
4) Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	100	100	100	100	100	100
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
1) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	57	62	100	100	100	100
2) Cakupan Penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisisn	27	41	100	100	100	100
3) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres	100	100	100	100	100	100
4) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	100	100	50	50	100	100
5) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender	60	50	100	100	80	100
6) Cakupan ketersediaan Jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
7) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanganai perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	30	30	50	50
9) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang	60	60	30	30	50	100

Uraian	Capaian Performance					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
mempunyai kemampuan pendamping pada seksu dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak						
e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
1) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	NA	NA	60	60	90	90
2) Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	43	71	60	60	90	90

Sumber : BPMPKB Kab. Rembang, 2015

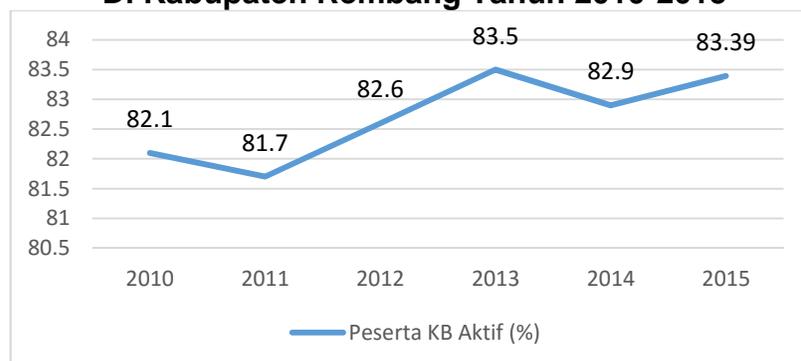
Peningkatan capaian ini didukung oleh capaian kinerja yang baik pada ketersediaan tenaga kesehatan terlatih tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas serta Rumah Sakit, dimana telah melampaui target capaian SPM. Target SPM hanya 4 tenaga kesehatan, Kabupaten Rembang sudah memiliki 32 tenaga kesehatan terlatih yang mampu tatalaksana, sedangkan Rumah sakit target SPM 60 % adapun capaian Kabupaten Rembang sudah 11 tenaga kesehatan. Capaian SPM yang termasuk dalam kategori rendah yaitu pada layanan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang belum dapat dilayani pemerintah daerah (masih mengandalkan bantuan pemerintah provinsi). Rincian selengkapnya sebagaimana pada

2.1.3.1.10. Keluarga Berencana

a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang pada saat pendataan masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Perkembangan jumlah peserta KB Aktif selama periode 2010 – 2015, mengalami peningkatan. Kondisi Peserta KB Aktif selama 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.43
Persentase Jumlah Peserta KB Aktif
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015



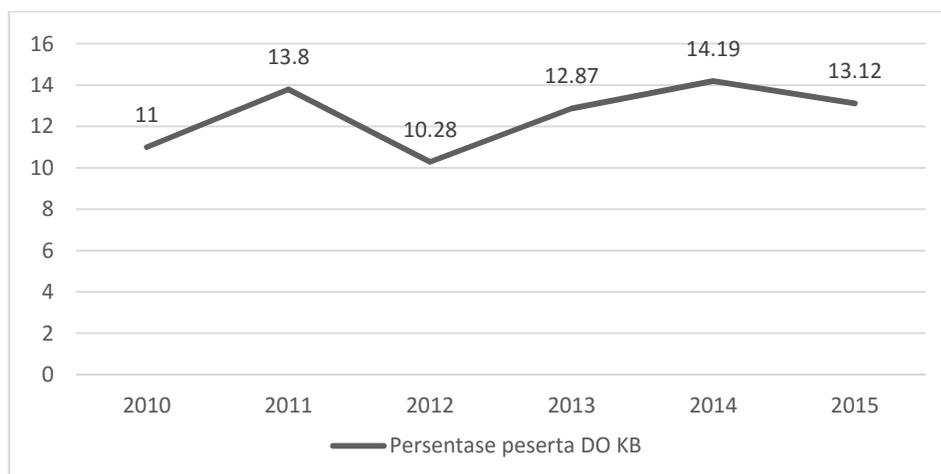
Sumber: BPMPKB Kab. Rembang, 2015

b. Drop Out (DO) KB

Drop Out (DO) KB yaitu peserta program Keluarga Berencana (KB) yang memilih tidak melanjutkan program. Penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS (Pasangan Usia Subur) sangat penting dan perlu upaya agar tidak banyak mengalami drop out sehingga tingkat keberhasilan KB dapat ditingkatkan. Perkembangan DO KB tahun 2010-2015, menunjukkan trend yang meningkat.

Drop out penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor individu dan lingkungan adalah faktor program yaitu pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KB, Konseling KB dan kualitas pelayanan kontrasepsi (meliputi pilihan metoda kontrasepsi, kemudahan pelayanan dan pemberian informasi). Untuk itu upaya menekan tingkat drop out KB dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan KIE dan kualitas pelayanan kontrasepsi. Anjuran pemakaian MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) seperti metode implan dan IUD (Intra Uterine Device) kepada masyarakat perlu terus digalakkan dan dimotivasi, mengingat kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik KB mempunyai resiko drop out KB yang tinggi bila tidak tertib. Perkembangan peserta DO KB tahun 2010-2015 di Kabupaten Rembang sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.44
Persentase Jumlah Peserta KB Aktif
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

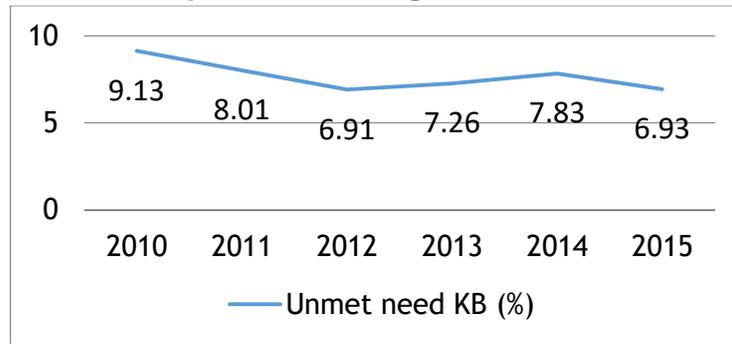


Sumber: BPMPKB Kab. Rembang, 2015

c. Unmet Need KB

Perkembangan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need KB) dari tahun 2010 – 2015, cenderung berfluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2010 Unmet need KB sebesar 9,13 menurun menjadi 6,93 pada tahun 2015. Fluktuasi unmet need KB ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB khususnya MKJP serta PUS yang tidak ingin memiliki/menunda punya anak lagi. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan SDM PLKB, peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi. Kondisi unmet need KB di Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.45
Persentase Unmet need KB
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015



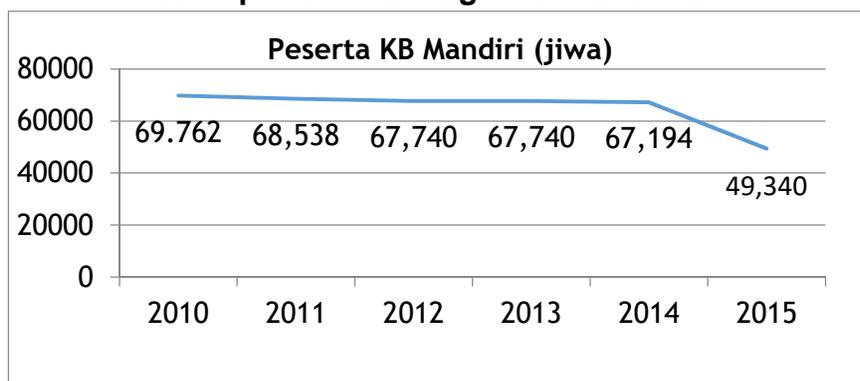
Sumber : BPMPKB Kab. Rembang, 2015

d. Peserta KB Mandiri

Peserta KB Mandiri yaitu kelompok masyarakat atau perorangan yang menjadi peserta KB atas kesadaran dan kemauan sendiri dan mampu membiayai sendiri KB-nya. Penurunan angka kelahiran yang semakin sulit disebabkan oleh kurangnya dukungan masyarakat dan turunnya komitmen pemerintah daerah pasca otonomi. Mensikapi dinamika tersebut, perlu ada perubahan kebijakan dan program untuk mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta secara aktif dalam program KB. Indikator kesertaan masyarakat dapat dilihat dari kepesertaan KB mandiri.

Trend peserta KB mandiri dari tahun 2010 - 2015 di Kabupaten Rembang terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB mandiri relatif rendah. Pada saat ini KB dianggap bukan lagi merupakan kebutuhan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dan peningkatan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri. Pada tahun 2010 jumlah peserta KB mandiri sebesar 69.762 jiwa turun menjadi 49.340 pada tahun 2015. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.46
Jumlah Peserta KB Mandiri
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2015



Sumber : BPMPKB Kab. Rembang, 2015

e. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1

Jumlah keluarga pra sejahtera periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Rembang cenderung mengalami kenaikan (kecuali di kecamatan Sarang, Sulang, Kaliori dan Lasem yang mengalami penurunan). Total kenaikan jumlah keluarga pra sejahtera dari tahun 2012 sampai dengan 2013 adalah sebesar 991 (1,04%). Disisi lain jumlah keluarga sejahtera I relatif stagnan, hal ini dapat dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I pada tahun 2012 sebesar 10.822 naik menjadi 10.855 pada tahun 2013. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera II mengalami penurunan dari 18.065 pada tahun 2012 menjadi 16.703 pada tahun 2013. Adapun informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
di Kabupaten Rembang Menurut Kecamatan Tahun 2012 dan 2013

No	Kecamatan	Pra Sejahtera		Keluarga Sejahtera I		Keluarga Sejahtera II	
		2013	2014	2012	2013	2012	2013
1	Sumber	8.048	7.001	226	509	309	364
2	Bulu	6.745	4.269	160	2.330	252	259
3	Gunem	5.546	3.946	140	1.291	318	258
4	Sale	6.670	4.356	80	2.211	1316	843
5	Sarang	8.692	8.188	2.787	4.041	1928	2.385
6	Sedan	8.826	6.877	1.383	1.875	2094	1.561
7	Pamotan	8.505	7.612	195	913	556	756
8	Sulang	7.817	6.430	51	961	175	371
9	Kaliori	6.603	4.831	345	2.458	221	422
10	Rembang	8.183	4.963	866	4.785	1242	1.607
11	Pancur	4.307	3.674	571	1.266	905	700
12	Kragan	6.953	5.451	2.393	2.987	5519	3.643
13	Sluke	4.182	3.276	742	1.639	569	650
14	Lasem	4.931	4.394	946	1.900	1299	1.676
Jumlah		96.008		10.822		18.065	
(%)		53,13		5,70		9,52	
Jumlah Rumah Tangga		191.003		189.799		189.799	

Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014

2.1.3.1.11. Sosial

a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial dengan bermitra strategis dengan pemerintah provinsi dan stake holder di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2014 jumlah PMKS yang telah ditangani sebanyak 7.972 jiwa dari 142.181 jiwa (5,6%).

b. Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

Hasil akhir penanganan PMKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan cara menciptakan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu media untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial berupa barang bagi PMKS potensial sesuai kemampuan dan minatnya. Tahun 2014 PMKS yang telah menerima bantuan sosial sebanyak 7.615 jiwa.

c. Penguatan Kapasitas PMKS

Salah satu unsur yang mendukung penanganan PMKS adalah peran serta PSKS yang terampil dan berkemampuan untuk menangani PMKS disekitarnya. Untuk itu, agar mampu memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS di Kabupaten Rembang dilaksanakan penguatan kapasitas PSKS. Tahun 2014 telah dilakukan penguatan kapasitas terhadap 294 orang PSKS.

d. Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial yang Menerapkan Standard Pelayanan (SOP)

Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi social terhadap penerima manfaat (PMKS) dilakukan dengan penetapan standar prosedur pelayanan sehingga terjamin kepastian layanan, ketepatan layanan dan mempercepat proses rehabilitasi. Balai rehabilitasi sosial di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2014 sejumlah 3 balai, dimana hanya 1 balai resos yang telah menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur pelayanan bagi penerima manfaat. Jumlah Balai Rehabsos yang sudah menerapkan SOP sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.45
Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Sudah Menerapkan Standar Pelayanan (SOP) di Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2014

No	Tahun	Balai Resos	SOP
1	2010	3	1
2	2011	3	1
3	2012	3	1
4	2013	3	1
5	2014	3	1

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.12. Ketenagakerjaan

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2010-2013 fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan, yaitu sebesar 28,63% (tahun 2010) menurun menjadi sebesar 26,77% (tahun 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja penduduk usia 15 tahun keatas semakin kecil. Rincian angka rasio kesempatan kerja tahun 2010-2013 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.46
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
di Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2013

No	Tahun	Rasio kesempatan kerja
1	2010	28,63
2	2011	27,74
3	2012	25,12
4	2013	26,77

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang, 2015

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami peningkatan, yang diakibatkan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan (orang yang bekerja dan mencari pekerjaan meningkat). Namun demikian pada 2 tahun terakhir, mengalami penurunan yang signifikan dari 74,88 ke 73,23 pada tahun 2013 dan turun lagi menjadi 68,13 pada tahun 2014 disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

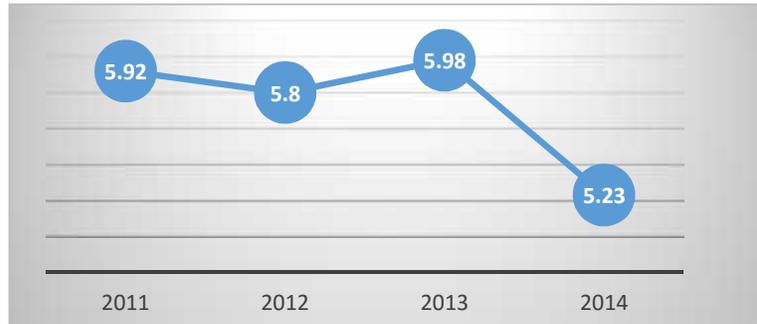
No	Tahun	Rasio kesempatan kerja
1	2010	71,37
2	2011	72,26
3	2012	74,88
4	2013	73,23
5	2014	68,13

Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah perbandingan penduduk yang mencari kerja dengan angkatan kerja. TPT akan memberikan gambaran besarnya penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rembang selama periode tahun 2011-2014 berfluktuasi dengan tren mengalami penurunan. Pada tahun 2011 TPT sebesar 5,92 turun menjadi 5,23 pada tahun 2014. Kondisi TPT tahun 2010-2013 dapat dilihat pada gambar berikut :

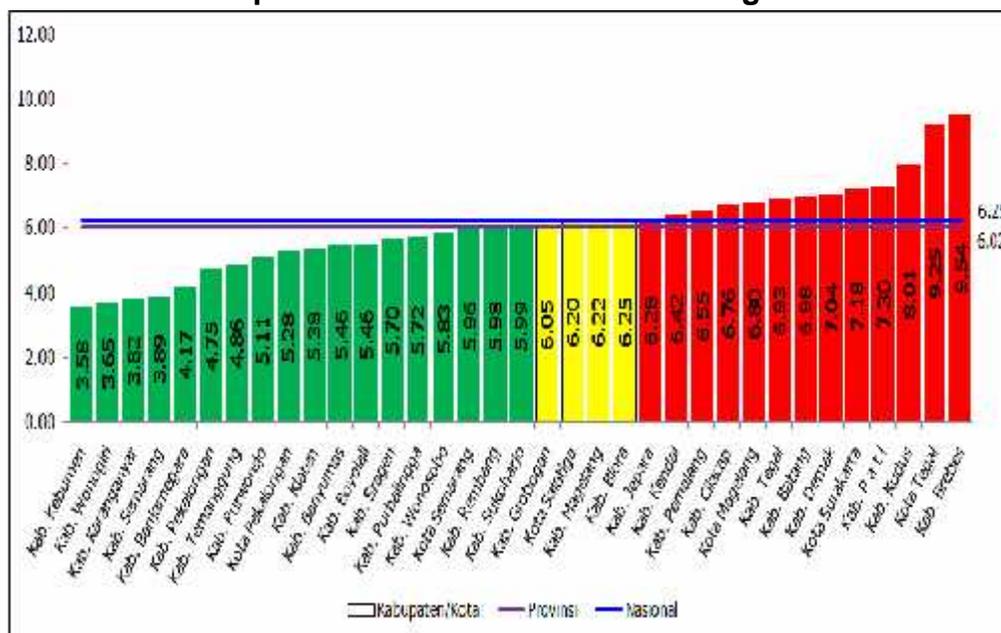
Gambar 2.48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2014

Capaian TPT Kabupaten Rembang bila dibandingkan dengan capaian TPT Kabupaten disekitarnya sudah cukup baik, lebih rendah dari Kabupaten Blora, Pati, Jepara dan Kudus. Begitu pula, capaian TPT Kabupaten Rembang sudah dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Gambar 2.49
Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014



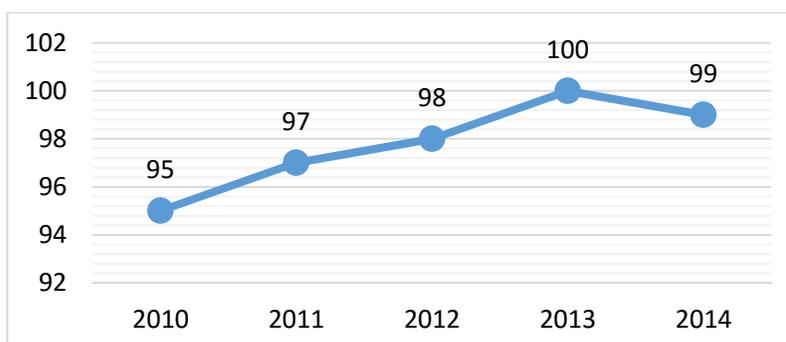
Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2014

d. Jumlah Perusahaan yang mengikuti Program Jamsostek

Jumlah perusahaan yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2010-2014 mengalami peningkatan meskipun peningkatannya kecil, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Jumlah Industri kecil dan besar di Kabupaten Rembang Tahun 2014 sejumlah 5.453 industri, terdiri dari industri kecil 5.417 dan industri besar 36. Dari jumlah tersebut hanya 99 perusahaan yang mengikuti jamsostek, menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja masih perlu ditingkatkan. Hal ini harus menjadi

perhatian serius pemerintah untuk melindungi hak - hak buruh. Perkembangan jumlah perusahaan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.50
Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Jamsostek
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2013



Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.13. Kebudayaan

Kinerja pembangunan bidang kebudayaan pada Tahun 2011-2014 cenderung meningkat meskipun perkembangannya lambat. Kinerja pada tahun 2014 sudah cukup baik ditunjukkan dengan beberapa indikator: Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.47
Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2011	2012	2013	2014	2015**
1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	3	3	3	9	3
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	buah	2	2	2	6	2
3.	Jumlah cagar budaya (candi, situs)	buah	43	43	47	47	47
4.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	buah	43	43	47	47	47
5.	Jumlah Museum	unit	1	1	1	1	1
6.	Jumlah pengunjung museum	orang	3.027	7.444	6.372	10.990	8.377

Sumber: Dinbudparpora Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.14. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2014 telah dilakukan: (1) Fasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program sebanyak 2 kali, (2) Jumlah Pemuda pelopor 15 orang, (3) Pemuda yang difasilitasi bagi kader kewirausahaan 9 orang, (3) Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan generasi muda sebanyak 50 orang, (4) Jumlah Kegiatan kepemudaan 8 kegiatan, dan (5) jumlah kelompok kewirausahaan pemuda 23

kelompok. Capaian organisasi Pemuda, kader wirausaha dan pemuda pelopor selama 5 tahun terakhir tetap, sedangkan pelatihan dan pengembangan generasi muda, kegiatan kepemudaan dan kelompok wirausaha pemuda mengalami kenaikan. Perkembangan pembangunan kepemudaan selama Tahun 2010 –2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Perkembangan Pembangunan Kepemudaan
di Kabupaten Rembang Tahun 2010 –2014

No	Uraian	Jumlah				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program	2	2	2	2	2
2.	Jumlah pemuda pelopor	15	15	15	15	15
3.	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	11	-	-	9	9
4.	Pelatihan dan pengembangan generasi muda	-	-	-	25	50
5.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	8	4	6	8
6.	Jumlah kelompok kewirausahaan pemuda	16	18	20	22	23

Sumber: Dinbudparpora Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.15. Kesbangpolinmas

Peningkatan jumlah unjuk rasa sebagai saluran penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kondisi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan keamanan, perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif dan persuasif antar lembaga pemangku kepentingan. Adapun jumlah unjuk rasa di Kabupaten Rembang dari tahun 201-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014

No	Jenis Unjuk Rasa	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok	-	-	-	-	2
2	Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan	13	15	16	17	25

Sumber: Kesbangpolinmas Kab. Rembang, 2015

Kasus perkara hukum pidana di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 yang dilaporkan tercatat sebanyak 170 kasus, perkara perdata sebanyak 175 kasus, dan perkara lalu lintas sebanyak 73.051 kasus. Sementara jumlah perkara yang terselesaikan pada tahun 2013, pidana sebanyak 152 kasus, perdata sebanyak 163 dan perkara lalu lintas sebanyak 73.051 kasus. Kasus tanah yang diselesaikan sebanyak 1 kasus. Disisi lain Tindak kriminal di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 tercatat kasus narkoba sejumlah 1 kasus, kasus seksual sebanyak 3 kasus,

kasus penganiayaan sebanyak 9 kasus, kasus pencurian sebanyak 32 kasus, kasus penipuan sebanyak 7 kasus. Adapun tindak kriminal yang ditangani adalah kasus seksual sebanyak 3 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 9 kasus, kasus pencurian sebanyak 15 kasus, kasus penipuan sebanyak 5 kasus.

Fenomena fluktuatis jumlah tindak pidana patut dicermati dengan mencari akar masalah, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara preventif. Patut diwaspadai kesenjangan sosial yang semakin tajam akan menyulut tindakan kriminal. Dampak tayangan media, fenomena tindakan represif terhadap tindak pidana di beberapa daerah memicu *urban criminal* ke daerah. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral agar mampu dicari akar masalah yang menimbulkan kecenderungan munculnya perilaku kriminal di masyarakat.

Dalam upaya meminimalisir tindak kriminal, perlu juga mengaktifkan kembali Poskamling-poskamling baik di desa maupun kelurahan, karena disinyalir sekarang ini banyak poskamling yang tidak dimanfaatkan untuk tempat pengamanan lingkungan, namun lebih sering dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang justru meresahkan warga. Data yang diperoleh dari Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang rasio jumlah poskamling yang terdata dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Rasio jumlah poskamling/jumlah Desa/Kelurahan
Tahun 2010-2014

No	Jumlah Poskamling	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio jumlah poskamling/ jumlah desa/kelurahan	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73

Sumber: Kesbangpolinmas Kab. Rembang, 2015

Pembinaan terhadap OKP, Ormas dan LSM oleh Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang sudah cukup optimal, namun perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap perilaku LSM di Kabupaten Rembang terutama beberapa LSM yang belum melaporkan dan mendaftarkan keberadaan, dan arah tujuan pendirian serta platform LSM itu sendiri. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan hanya ada 15 LSM yang terdaftar dari total 50 LSM. Hal ini menyebabkan terhambatnya kegiatan pembinaan dan pengawasan. Pada masa mendatang harus tersedia peraturan perundangan yang menegaskan bahwa setiap pendirian LSM harus melaporkan keberadaannya, tujuan pendirian LSM serta kepengurusan yang jelas.

Tabel 2.51
Pembinaan Terhadap OKP, Ormas dan LSM
Tahun 2010-2014

No	Pembinaan	Capaian (Keg)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pembinaan Terhadap OKP, Ormas dan LSM	3	3	5	7	8

Sumber: Kesbangpolinmas Kab. Rembang, 2015

Linmas sebagai masyarakat terlatih belum dimanfaatkan secara optimal, padahal selama ini di Kabupaten Rembang anggota Linmaslah yang selalu berada didepan manakala terjadi bencana .Perlu adanya aturan yang jelas terhadap keberadaan anggota linmas, sehingga semangat membantu dan membangun para anggotanya bisa terjaga.

Jumlah anggota linmas sekarang ada 6.028 orang ditambah dengan linmas inti 25 orang, rasio per 10.000 penduduk tercukupi, namun yang perlu diperhatikan adalah banyak anggota yang sudah memasuki usia kurang produktif serta sebaran anggota linmas aktif kurang merata.

Tabel 2.52
Rasio Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014

NO	Jumlah Linmas	CAPAIAN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio jumlah anggota linmas per 10.000 penduduk	59,34	59,73	60,6	61,15	61,41

Sumber: Kesbangpolinmas Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.16. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan

Kondisi suprastruktur dan infrastruktur politik suatu daerah dapat dilihat dari eksistensi DPRD, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan jumlah media massa/pers. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2014 – 2019 yaitu sebanyak 45 orang dengan jumlah fraksi sebanyak 7 fraksi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.53
Banyaknya Anggota Fraksi DPRD
Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014 - 2019

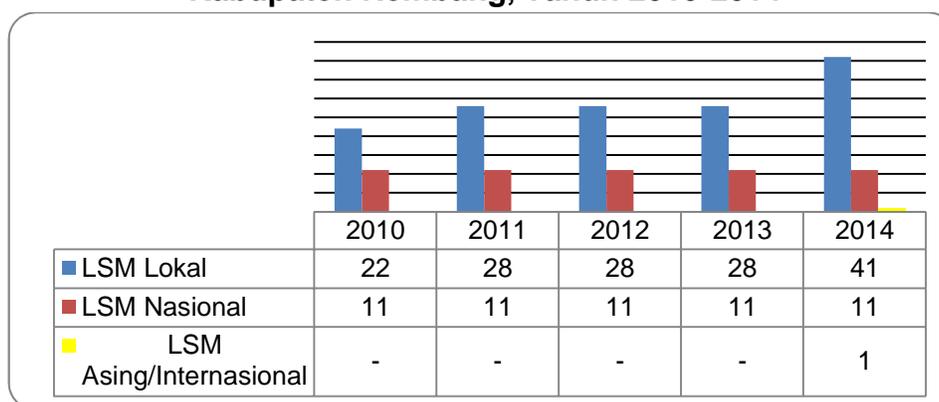
No.	Fraksi	Anggota
1.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	10
2.	Fraksi Demokrat	8
3.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	6
4.	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	8
5.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	5
6.	Fraksi Karya Sejahtera	4
7.	Fraksi Harapan	4
	Jumlah	45

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Rembang, 2015

Data dari Kesbangpolinmas bahwa jumlah partai politik daerah sebagai peserta pemilu adalah sebanyak 12 partai. Sedangkan organisasi kemasyarakatan berdasarkan profesi sejumlah 22 buah, keagamaan sebanyak 36 buah, kepercayaan sebanyak 7 buah, berdasarkan fungsi sebanyak 24 buah, kegiatan sebanyak 16 buah, dan berdasarkan yayasan sebanyak 45 buah. Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelompok binaan LPM sebanyak 3 kelompok. Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal yaitu sebanyak 28 buah, Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional berjumlah 11 buah dan sejak tahun 2013 ada 1 Lembaga Swadaya Masyarakat Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah. Jumlah media massa ataupun pers pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan. Adapun Karakteristik politik

masyarakat antara golongan laki-laki dan perempuan tercermin dari Tingkat Partisipasi Pemilih (PILKADA) sebesar 48% dengan karakteristik pemilih sebanyak 477.574 orang. Berikut ini dapat dilihat grafik perkembangan LSM di Kabupaten Rembang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Gambar 2.51
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Kabupaten Rembang, Tahun 2010-2014



Sumber: Kesbangpolinmas Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.17. SATPOL PP

Jumlah Satpol PP di Kabupaten Rembang sangat tidak seimbang dengan dinamika penegakan Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2014 jumlah anggota Satpol PP sebanyak 63 orang dimana harus menangani wilayah 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang. Perlu ada penambahan jumlah anggota satpol PP serta pelatihan teknis dalam upaya peningkatan profesionalitas Satpol PP. Berikut jumlah anggota Satpol PP dalam kurun lima tahun terakhir :

Tabel 2.54
Jumlah Anggota Satpol PP dan Penyelesaian Pelanggaran Perda
Tahun 2010-2014

No	Jumlah Anggota Pol PP	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Rembang	59	60	61	61	62
2	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	6	6	6	6	6

Sumber : Satpol PP Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.18. Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan aparatur daerah serta meningkatkan kinerja aparatur daerah. Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan diklat. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi. Berikut jumlah peserta diklat yang telah dikirim maupun dilaksanakan oleh BKD dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2.55
Jumlah Peserta Diklat di Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2015

NO	Diklat Aparatur	Capaian				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Diklat Aparatur Kabupaten Rembang	580	768	94	148	84

Sumber: BKD Kab. Rembang, 2015

2.1.3.1.19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penggerak utama terwujudnya masyarakat berdaya, mandiri dan sejahtera. Masyarakat berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Rembang yang sejahtera.

Perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat pada tahun 2010-2015 adalah : (1) jumlah Posyandu aktif mengalami penurunan 6 Posyandu dari 1.231 menjadi 1.225, (2) Jumlah PKK aktif tidak terjadi perubahan yaitu 309 PKK aktif, (3) jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) juga tidak terjadi perubahan tetap 25 kelompok, (4) jumlah BUMDes pada tahun 2010-2012 tetap sejumlah 5 BUMDes, namun diakhir tahun 2014 turun menjadi 1 BUMDes, (5) jumlah pasar desa tidak mengalami perubahan, tetap 28 pasar. Rincian perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa seperti pada tabel dibawah.

Tabel 2.56
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

Tahun	Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Jumlah Posyandu Aktif	Jumlah PKK Aktif	Jumlah UED SP	Jumlah BUMDES	Jumlah Pasar desa
2010	1.231	309	25	5	28
2011	1.231	309	25	5	28
2012	1.231	309	25	5	28
2013	1.225	309	25	-	28
2014	1.225	309	25	1	28

Sumber: BPMPKB Kab. Rembang, 2015

5. Komunikasi dan Informasi

Penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Rembang mendasarkan pada kebijakan yang diarahkan pada upaya mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa, meningkatkan kerjasama bidang informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas bidang informasi dan komunikasi, serta memberikan jasa pelayanan yang prima kepada masyarakat di segala bidang layanan.

Implementasi Keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Pemerintah Kabupaten Rembang telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui *website* www.rembangkab.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan, serta ikut mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya sebagai obyek, tetapi sekaligus menjadi subyek dan ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan bidang komunikasi dan informatika dalam jangka waktu 5 tahun terakhir periode tahun 2010-2014 mengindikasikan kecenderungan meningkatnya informasi dan media massa serta meningkatnya kualitas bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika periode waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengarah pada keterbukaan informasi publik dalam rangka kemudahan pelayanan informasi publik dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika tahun 2014 meliputi:

1. Terpeliharanya website milik pemerintah daerah (www.rembangkab.go.id) yang didukung oleh domain masing-masing SKPD; dan
2. Tersedianya media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses publik melalui Majalah Bangkit.

2.1.3.2. Fokus Layanan Pilihan

2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

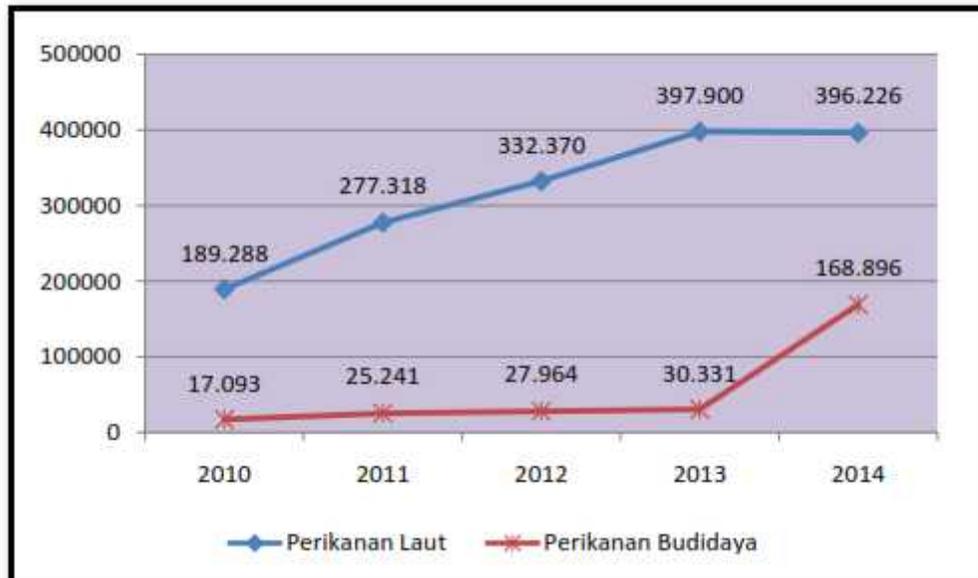
Kabupaten Rembang terletak diwilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah dengan panjang pantai mencapai \pm 63 km. Dengan pantai yang terbentang dari Kecamatan Kaliori s/d Kecamatan Sarang menjadikan Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang luarbiasa besarnya. Sebagian potensi perikanan dan kelautan tersebut antara lain ikan layang, ikan tambang, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kurisi, ikan teri, ikan manyung, ikan layur, ikan kakap, dan rajungan. Salah satu produksi andalan Kabupaten Rembang adalah hasil perikanan baik berupa ikan segar maupun dalam bentuk olahan. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Rembang yang berada disepanjang pantai utara. Dilihat dari distribusi PDRB adh berlaku pada tahun 2014 subsektor perikanan mampu memberikan andil sebesar 6,39 persen terhadap total PDRB di Kabupaten Rembang. Tempat pelelangan ikan (TPI) yang tercatat sebanyak 10 lokasi tersebar dibeberapa kecamatan, merupakan tempat transaksi pertama antara nelayan dengan pedagang. Namun karena biasanya hasil tangkapan ikan yang dijual di TPI hanya untuk jenis ikan tertentu ataupun untuk partai besar sehingga nelayan-nelayan kecil biasanya langsung menjual kepada pedagang baik pedagang pengepul maupun pedagang pasar.

Selain perikanan laut juga terdapat perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya tambak dan budidaya kolam. Sebagai daerah pesisir pantai maka usaha budidaya ikan di tambak air payau jauh lebih banyak daripada budidaya ikan di air tawar. Jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan di tambak air payau adalah udang vaname dan bandeng.



Selama kurun waktu lima tahun terakhir nilai produksi perikanan laut dan perikanan budidaya terus meningkat, terutama perikanan laut. Hal ini semakin menunjukkan potensi Kabupaten Rembang sebagai daerah pesisir pantai.

Gambar 2.52
Nilai Produksi Perikanan Laut dan Budidaya Ikan (juta)
di Kabupaten Rembang, 2010-2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014

Pada **Gambar 2.52** terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir nilai produksi perikanan di Kabupaten Rembang cenderung meningkat. Walaupun pada tahun 2014 nilai produksi perikanan laut sedikit menurun dibandingkan tahun 2013 akan tetapi pada perikanan budidaya justru mengalami peningkatan nilai produksi yang cukup besar dari 30,3 milyar rupiah menjadi 168,8 milyar rupiah. Hal ini semakin menunjukkan potensi Kabupaten Rembang sebagai daerah pesisir pantai.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di sektor perikanan kelautan diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan membudayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi: (a) Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Kelautan dan Perikanan, (b) Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, (c) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, (d) Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.

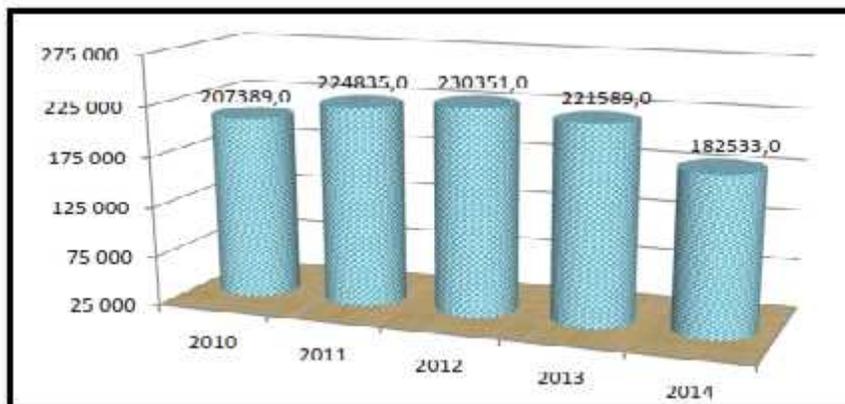
2.1.3.2.2. Pertanian dan Peternakan

2.1.3.2.2.1. Pertanian

Pertanian tanaman pangan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertanian tanaman padi dan palawija. Berdasarkan lokasinya tanaman padi terbagi lagi menjadi dua yaitu padi sawah dan padi ladang/gogo. Menurut Angka Tetap (Atap) padi dan palawija tahun 2010-2014, produksi padi di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun masih terlihat belum stabil. Seperti terlihat pada **Gambar 2.53** yaitu sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 produksi padi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, namun pada dua tahun terakhir ini produksi padi terus menurun dari 221,6 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 182,5 ribu ton pada tahun 2014. Sebenarnya pada tahun 2013 luas panen tanaman padi justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun karena rata-rata produksi padi turun cukup drastis dari 56,87 menjadi 49,28 kw/Ha, sehingga mengakibatkan jumlah produksi padi di Kabupaten Rembang menjadi turun pula. Untuk kondisi tahun 2014 baik luas panen maupun provitas padi sama- sama menurun.

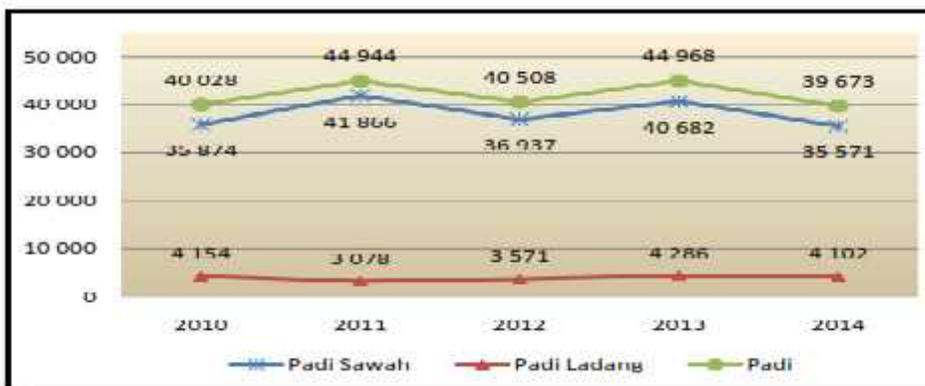
Gambar 2.53
Produksi Padi Kabupaten Rembang (ton),
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015

Hama merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi di samping faktor iklim dan cuaca. Selain itu seperti telah dibahas sebelumnya bahwa adanya perubahan/pengurangan area tanam yang biasanya digunakan untuk pertanian khususnya padi banyak yang digunakan untuk menanam komoditas lainnya atau berubah menjadi lahan bukan pertanian sangat berpengaruh terhadap besarnya produksi dengan menurunnya luas panen. Jika dilihat menurut luas panen padi di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebesar 89,66 persen merupakan luas panen padi sawah dan sisanya dari padi ladang. Perkembangan selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.54
Luas Panen Padi, Padi Sawah dan Padi Ladang (Ha)
Kabupaten Rembang, 2010 – 2014

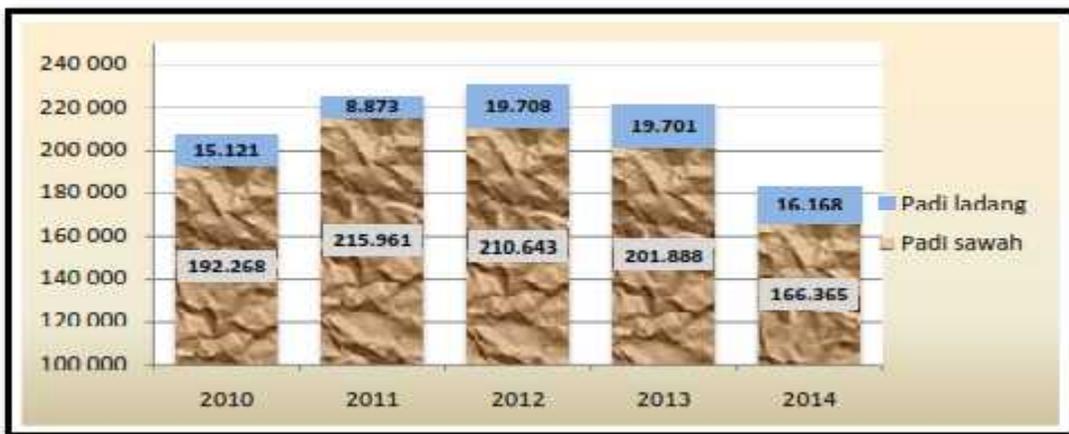


Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa luas panen padi sawah pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, demikian juga dengan

luas panen padi ladang, sehingga secara keseluruhan luas panen tanaman padimenurun pada tahun tersebut. Dengan luas panen padi sawah sebesar 35.571 hektar dan padi ladang sebesar 4.102 hektar, menghasilkan produksi padi sawah sebesar 166.365 ton untuk padi sawah dan 16.168 ton untuk padi ladang. Rata-rata produksi padi sawah sebesar 46,77 kw/ha dan 39,42 kw/ha untuk padi ladang.

Gambar 2.55
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang (ton)
di Kabupaten Rembang, 2010-2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014

Gambar 2.56
Rata-rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang (Kw/Ha)
di Kabupaten Rembang, 2010 – 2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2014

Dengan jumlah produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 182.534 ton pada tahun 2014, setelah dikurangi penyusutan untuk pakan ternak, bibit maupun yang tercecer, jika dikonversikan menjadi produk beras (konversi GKG ke beras sekitar 62,74 persen) akan menghasilkan sekitar 106.162 ton beras. Dari angka tersebut dengan memperhatikan penyusutan dalam bentuk beras, didapatkan sejumlah 102.627 ton beras sebagai bahan makanan penduduk. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada Tahun 2014 sebanyak 616.901 jiwa, maka jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi perkapita penduduk diasumsikan sebesar 70.006 ton. Dari total produksi beras setelah dikurangi konsumsi untuk penduduk, dan setelah dikurangi dengan perkiraan konsumsi untuk industri dan yang tidak tercatat (sekitar 20.129 ton) diperoleh angka sebesar 12.492 ton beras. Angka

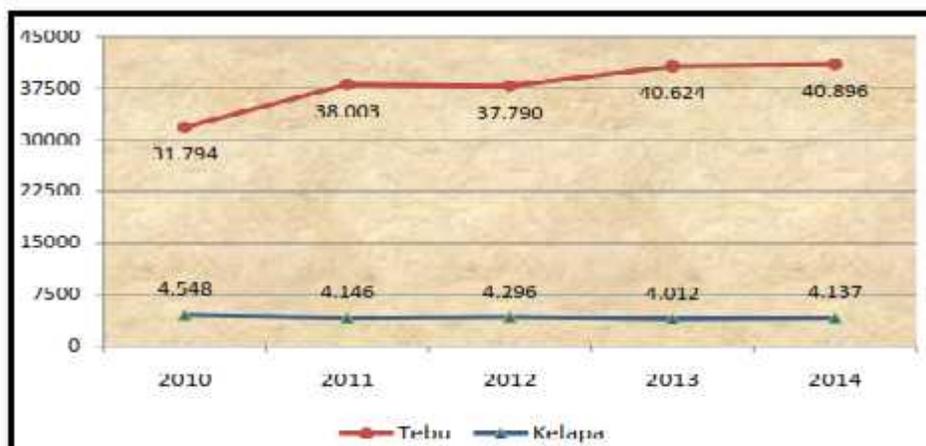
inilah yang kita asumsikan sebagai stok atau cadangan beras untuk Kabupaten Rembang pada tahun 2014. Angka ini lebih kecil dibandingkan stok pada tahun sebelumnya.

Kebutuhan pangan setiap tahun akan terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Dalam program ketahanan pangan dicanangkan untuk mencari sumber pangan pengganti beras. Program ini menuntut terciptanya bahan pangan pokok pengganti beras dengan meningkatkan produk tanaman pangan selain padi seperti jagung dan ubi. Langkah lain yang ditempuh adalah mengubah pola makan masyarakat dari nasi yang bersumber dari beras menjadi bahan lain yang bersumber dari non-beras seperti palawija. Beberapa tanaman yang termasuk dalam kelompok palawija adalah jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sorgum/cantel, gandum, talas dan ganyong serta umbi lainnya. Namun dalam publikasi ini penulis hanya akan mengulas sebanyak enam komoditas utama yang banyak terdapat di Kabupaten Rembang, yaitu; jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Berdasarkan data ATAP Padi Palawija BPS Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa pada dasarnya Kabupaten Rembang cukup berpotensi untuk pertanian palawija. Hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya angka produksi pada keenam komoditas palawija tersebut masih berada dalam peringkat 10 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kondisi lahan pertanian di Kabupaten Rembang yang sebagian besar merupakan lahan tadah hujan membuat banyak petani yang membudidayakan tanaman palawija pada peralihan musim kemarau setelah mereka menanam padi.

Dari beberapa tanaman perkebunan yang meliputi tanaman tahunan dan musiman, tanaman tebu dan kelapa merupakan tanaman yang cukup banyak diusahakan di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2014 jumlah produksi tebu sedikit meningkat menjadi 40,8 ribu ton dan merupakan produksi terbesar selama lima tahun terakhir. Sedangkan untuk kelapa pada tahun 2014 produksinya juga sedikit meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya namun dari perkembangannya selama lima tahun terakhir terlihat masih belum stabil.

Gambar 2.57
Produksi Tanaman Tebu dan Kelapa (ton)
di Kabupaten Rembang, 2010-2014



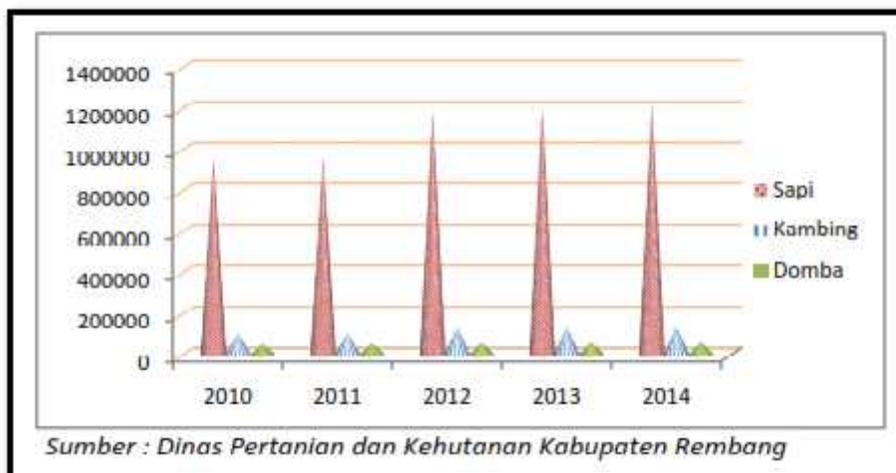
Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2015

Di Kabupaten Rembang juga mempunyai komoditi perkebunan yang tidak banyak dimiliki oleh daerah lain yaitu siwalan yang selain bisa dinikmati buahnya, air niranya juga dapat dinikmati sebagai minuman segar dan sebagai bahan dasar untuk membuat gula jawa.

2.1.3.2.2. Peternakan

Berdasarkan bentuknya ternak dikategorikan menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Yang termasuk ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda. Dari ketiga jenis ternak ini sapi paling banyak dipelihara oleh masyarakat Rembang terutama sapi potong. Selain ternak sapi potong, untuk jenis ternak kecil masyarakat di Kabupaten Rembang lebih banyak memelihara kambing dibandingkan dengan ternak yang lain. Dan untuk jenis ternak unggas, ayam kampung paling banyak dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Rembang dibandingkan memelihara ayam broiler. Hal ini disebabkan usaha pemeliharaan ayam kampung jauh lebih mudah dibandingkan ayam broiler (pedaging dan petelur) yang memang merupakan usaha beresiko tinggi dan membutuhkan modal yang besar, serta memerlukan sistem pemeliharaan yang lebih intensif. Perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu Tahun 2010 -2014 ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.57
Produksi Daging Sapi, Kambing, Domba (Kg)
di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 - 2014



Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015

Dari Gambar di atas terlihat bahwa hampir seluruh produksi daging ternak sapi, kambing dan domba pada tahun 2014 ini cenderung meningkat dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya

2.1.3.2.3. Kehutanan

Kawasan hutan negara yang ada di Kabupaten Rembang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah pemangkuan hutan yaitu KPH Mantingan seluas 10.995 hektardan KPH Kebonharjo seluas 12.927 hektar. Dari seluruh luas hutan tersebut sebanyak 55 persen merupakan hutan produktif dan 20,91 persen luas hutan tidak produktif. Namun dari total luas hutan di Kabupaten Rembang masih ada sekitar 5.358 hektar yang tidak digunakan untuk produksi hasil hutan.

Gambar 2.58
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba (m)
Di KPH Kabupaten Rembang, 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2014

Sebagian besar produksi kehutanan dari kedua KPH yang ada di Kabupaten Rembang berupa kayu jati. Pada tahun 2014 jumlah produksi kayu jati sebesar 15.407 m³ semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan produksi kayu rimba yang meningkat menjadi 1.038 m³ dari 980 m³ pada tahun 2013. Selain berasal dari hutan negara produksi kayu juga berasal dari hutan rakyat.

2.1.3.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan peningkatan nyata dalam pembangunan daerah. Bukan hanya dalam bentuk sumber penerimaan daerah saja, tetapi mencakup kegiatan ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, bahan bakar domestik dan memacu efek berantai ekonomi. Namun demikian, peningkatan tersebut perlu diikuti dengan melakukan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang bijaksana disertai dengan penerapan teknologi agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan. Sementara itu ketersediaan sumber energi migas yang semakin terbatas, juga perlu direspon dengan meningkatkan efisiensi penggunaannya, disamping upaya terus mencari teknologi dan sumber-sumber energi alternatif yang murah.

Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan pencapaian pembangunan terkait dengan energi yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan tahun 2015, RE Kabupaten Rembang telah mencapai sebesar 91,18% melebihi target capaian RE Tahun 2014 sebesar 87,82%. Walaupun demikian, masih terdapat sebanyak 12,18% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik secara langsung tetapi sudah mendapatkan energi listrik melalui KK terdekat. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan pembangunan jaringan listrik pedesaan baik pembangunan JTM maupun JTR, dan pengembangan energi baru terbarukan. Perkembangan rasio elektrifikasi dan upayanya selama tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Perkembangan Pelayanan Urusan Energi di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 – 2014

NO.	Pelayanan Urusan Energi	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Elektrifikasi (%)	59,98	68,51	74,47	85,47	87,82	91,18
2.	Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	0,851	0,050	-	0,289	1,197	0
3.	Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	2,582	0,493	-	4,262	3,124	0,562

Sumber: Dinas ESDM Kab. Rembang, 2015

Kontribusi sektor Pertambangan dan Galian terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 cenderung terus meningkat. Dengan luas area penambangan mencapai 110,83 ha, sektor pertambangan mampu berkontribusi terhadap PDRB sebesar 1,92 % atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.383.000.000,-.

2.1.3.2.5. Pariwisata

Pengembangan potensi pariwisata terus digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), juga untuk meningkatkan roda perekonomian di daerah tempat obyek wisata dan daerah sekitarnya. Potensi pariwisata di Kabupaten Rembang cukup beragam, meliputi : keindahan panorama, wisata budaya, pilgrim (religi), kuliner dan industri.

Obyek wisata unggulan di Kabupaten Rembang yaitu : Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini, Museum RA. Kartini dan makam RA Kartini. Sedangkan obyek wisata pendukung diantaranya yaitu: Perahu Kuno Punjulharjo, Pantai Caruban, Makam dan Pasujudan Bonang, Wana Wisata Mantingan, Vihara Ratavana Arama, Klentheng Tjoe An Kiong Dasun, Klentheng Gie Yong Bio Babagan, Masjid Jami' Lasem (Makam Eyang Sambu) dan Masjid Agung Rembang (Makam Pangeran Sedo Laut). Untuk wisata kuliner, ada sate srepeh, lontong tuyuhan, kelo mrico dan mangut ikan panggang yang menjadi unggulan. Sementara batik tulis Lasem dan kerajinan kuningan menjadi pilihan cinderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rembang.

Jumlah wisatawan di Kabupaten Rembang pada 2014 sebanyak 1.058.522 orang, jauh lebih banyak dibanding jumlah wisatawan pada tahun sebelumnya (401.113 orang). TRP Kartini masih merupakan obyek wisata bahari yang paling banyak diminati untuk dikunjungi dibandingkan obyek wisata yang lain. Selain letaknya yang strategis, TRP juga mempunyai fasilitas yang cukup memadai, seperti kolam renang, flying fox, outbound kids dan bermacam wahana permainan untuk anak. Puncak pengunjung di TRP Kartini adalah lima hari setelah hari raya idul fitri, yaitu pada acara 'syawalan'. Jumlah pengunjung TRP Kartini pada tahun 2014 tercatat sebanyak 922.025 orang atau mengalami peningkatan hampir tiga kali dibanding pengunjung tahun sebelumnya (276.249 orang). Pasujudan Sunan Bonang dikunjungi sebanyak 24.485 orang, meningkat 76,56 persen dari jumlah wisatawan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.868 orang. Sementara pengunjung di Pantai

Caruban, Makam RA. Kartini dan Wana Wisata Mantingan tahun 2014 lebih dari 26 ribu orang.

Gambar 2.59
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata/Taman Rekreasi Menurut
Tempat Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2009 – 2013

No	Obyek Wisata	Pengunjung
(1)	(2)	(3)
1	Taman Rekreasi Pantai Kartini (Dampo Awang Beach)	922.025
2	Pantai Caruban	38.805
3	Museum RA. Kartini	12.850
5	Wana Wisata Kartini mantingan	26.649
6	Makam RA. Kartini	33.708
7	Pasujudan Sunan Bonang	24.485
Jumlah		1.058.522

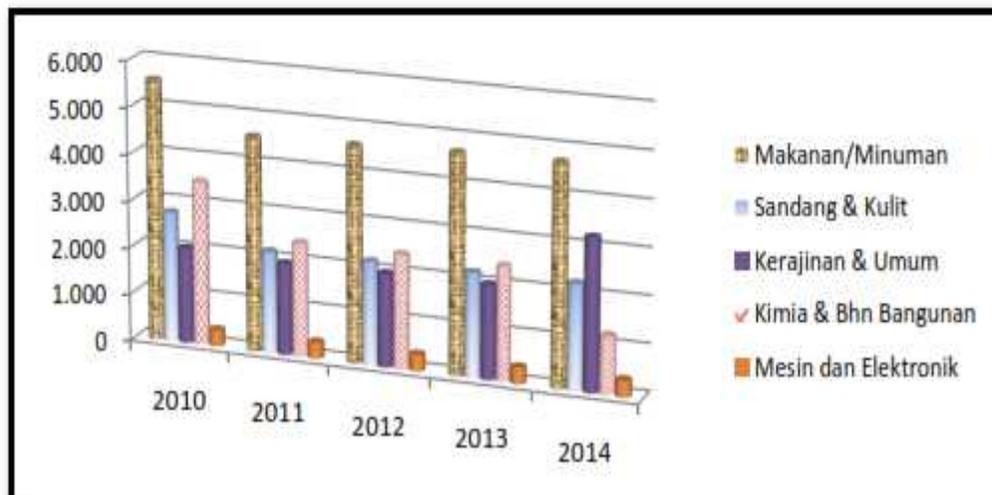
Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015

2.1.3.2.6. Perdagangan dan Perindustrian

Kebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upaya optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 16,68 %, yaitu sebesar Rp. 415.594,20 Juta dari total total PDRB sebesar Rp 2.491.364.48.

Kegiatan usaha industri pengolahan di Kabupaten Rembang beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan 'dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat dari *share* PDRB seri 2010 adh berlaku untuk sektor industri pengolahan yang semakin meningkat. Pada tahun 2014 andil sektor industri pengolahan sebesar 20,8 persen dari total PDRB yang merupakan persentase terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sebagian besar industri pengolahan di Kabupaten Rembang adalah industri makanan/minuman, pada tahun 2014 tercatat 4.725 usaha dengan nilai produksi sekitar 493 milyar rupiah dan tenaga kerja yang diserap sebesar 27.530 orang. Jumlah industri mesin dan elektronik tercatat paling kecil yaitu sebanyak 360 usaha dengan nilai produksi sebesar 20 milyar rupiah. Secara total jumlah industri pengolahan di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013, demikian juga dengan jumlah tenaga kerja maupun nilai produksi pada tahun 2014.

Gambar 2.60
Jumlah Industri Pengolahan Menurut Kelompok Industri
di Kabupaten Rembang, 2010– 2014



Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2015

2.1.3.2.7. Transmigrasi

Untuk perkembangan sektor pelayanan ketransmigrasian, dapat dilihat dari berapa banyak pengiriman transmigran dan penduduk yang mendaftar sebagai calon transmigran. Pada tahun 2012 dari 96 KK yang mendaftar hanya 14 KK atau 15% yang bisa dilayani, hal ini karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan untuk Kabupaten Rembang hanya 14 KK. Sedangkan untuk tahun 2011 dari 90 KK yang mendaftar hanya 10 KK yang bisa dilayani. Dari tahun 2010 sampai tahun 2013 transmigran yang berangkat hampir semua berprofesi sebagai petani, sedangkan untuk transmigran yang berprofesi lain relatif sedikit karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan adalah di bidang pertanian/perkebunan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya minat calon transmigran yang berprofesi selain bertani untuk bertransmigrasi.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. Fasilitas Infrastruktur

Letak geografis Kabupaten Rembang yang sangat strategis di wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur, perlu mendapatkan perhatian bersama yang serius bahwa pembangunan infrastruktur mutlak dan sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan dalam mendukung kecenderungan peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Rembang dan kabupaten sekitar. Sehingga fasilitas infrastruktur utama ke-PU-an perlu terus diupayakan peningkatan realisasinya meliputi : prioritas pembangunan jalan beserta sarana pelengkap; prioritas peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan Tasikagung dan Pelabuhan Umum Tanjung Bonang di Sendangmulyo Sluke untuk turut mendukung pembangunan maritim Indonesia; prioritas pembangunan prasarana sarana sumber daya air meliputi embung, bendung, cek dam dan saluran irigasi, guna turut mendukung terwujudnya ketahanan pangan

nasional; dan prioritas penataan kawasan perbatasan di Kecamatan Sarang sebagai pintu gerbang pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan fasilitas infrastruktur merupakan salah satu bagian dari kesatuan sistem jaringan infrastruktur pada Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana merujuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, dimana Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah mencakup pengembangan sistem prasarana transportasi darat; rencana pengembangan sistem prasarana transportasi laut; rencana sistem jaringan energi/kelistrikan; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; dan rencana jaringan prasarana lingkungan.

Untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Rembang selain meningkatkan fasilitas infrastruktur laut dan darat juga telah menyiapkan kawasan industry sebagai pengukit masuknya investasi ke daerah. Kawasan industry tersebut terdiri dari :

1. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi:
 - a. Kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;
 - b. Kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan
 - c. Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 200 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem dan kecamatan Sale.
2. Peruntukan industri menengah meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan industri di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha;
 - b. Kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Rembang;
 - c. Kawasan peruntukan agroindustri berada di setiap kecamatan Kabupaten Rembang; dan
 - d. Kawasan peruntukan industri pertambangan di Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Sulang dan Kecamatan Bulu
3. Peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
 - klaster industri mebel berada di Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Kragan, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sulang, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sumber;
 - klaster industri batik berada di Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Gunem;
 - klaster industri kuningan berada di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur;
 - klaster industri bordir berada di Kecamatan Sedan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sluke;

- klaster industri gula tumbu berada di Kecamatan Sulang, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Pancur;
- klaster industri genteng dan batu bata berada di Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang;
- klaster industri garam berada di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang;
- klaster olahan perikanan berada di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang;
- klaster ternak tersebar berada di setiap kecamatan Kabupaten Rembang;
- klaster industri mangga di Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Sulang;
- klaster industri galangan kapal di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang; dan
- industri kecil kawis di Kecamatan Rembang.

2.1.4.2. Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan pembangunan, masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan permasalahan yang perlu penanganan yang serius. Seperti diuraikan di atas, bahwa penduduk adalah aset pembangunan bila mampu diberdayakan secara optimal namun bisa menjadi beban kala pemberdayaannya tidak dibarengi kualitas SDM-nya. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan, mengingat jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

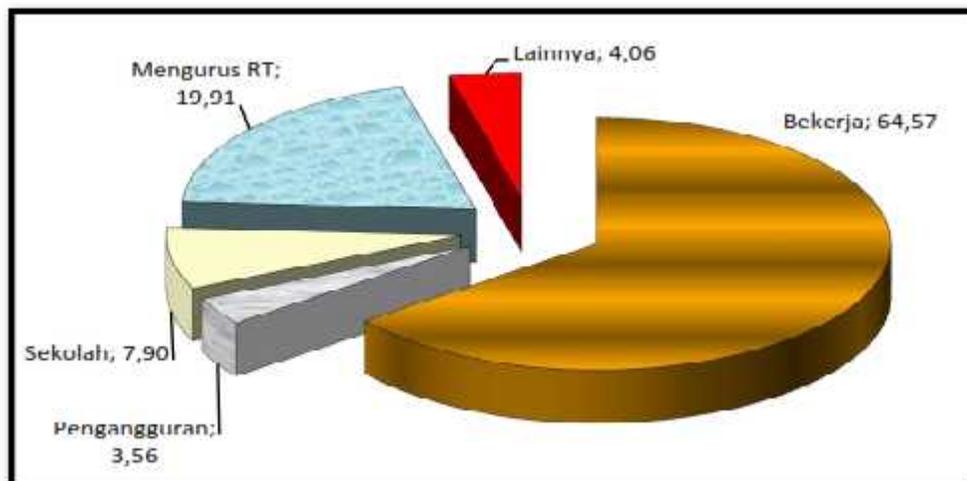
Masalah kependudukan yang paling menonjol dan memerlukan penanganan yang serius adalah ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu seiring dengan kebutuhan dan lapangan kerja yang ada, sedangkan kinerja mereka sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya.

Semakin banyak tenaga yang tidak bekerja makin besar pula peluang terjadinya kasus yang berkaitan dengan kriminal dan kerawanan atau konflik sosial. Persaingan antar tenaga kerja semakin terbuka dan mereka membutuhkan informasi yang akurat dan kemampuan yang memadai untuk dapat memperoleh pekerjaan. Selain pendidikan formal, mereka harus mempersiapkan diri agar bisa menjadi tenaga kerja yang trampil untuk dapat mengisi lowongan kerja yang makin terbatas. Masih banyak tenaga kerja yang belum siap memasuki dunia kerja ataupun tidak sesuai dengan jenis/lapangan kerja yang ada. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas para stakeholder agar dapat membidik peluang pasar yang ada sekaligus mempersiapkan rencana kerja yang nantinya diharapkan outputnya menghasilkan tenaga kerja yang trampil sesuai dengan syarat yang diminta.

Dalam analisis ketenagakerjaan, penduduk usia kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari jenis kegiatannya, angkatan kerja meliputi kegiatan bekerja dan pengangguran,

sedangkan untuk bukan angkatan kerja mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Gambar 2.61
Persentase Penduduk Umur 15 Th ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang 2014



Sumber : BPS Kab. Rembang, 2015

2.2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2015

Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2015 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target dan rencana Program/Kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2015 dan sasaran RPJMD 2010-2015 dapat dicapai dalam upaya pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2015 dikategorikan menjadi 5 kelompok, yaitu Sangat Tinggi (91 % - 100 %); Tinggi (76 % - 90%); sedang (66 % - 75 %); rendah (51 % - 65 %); dan Sangat Rendah (50 %). Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPD sampai dengan triwulan III mencapai 53,17% (rendah), dan realisasi anggaran mencapai 50,87% (rendah). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran SKPD pada tahun 2015 sampai dengan triwulan III secara umum tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya di seluruh SKPD agar tidak menimbulkan SiLPA dalam jumlah yang besar.

Tabel 2.59
Kriteria Capaian Kinerja dan Rating Kinerja SKPD

Capaian Kinerja (%)	Rating Kinerja
50	Sangat Rendah
51 - 65	Rendah
66 - 75	Sedang
76 - 90	Tinggi
91 - 100	Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2015

Capaian kinerja per SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2015 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

2.2.1 Realisasi Kinerja Renja Per SKPD

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 merupakan hasil kompilasi dari evaluasi renja seluruh SKPD di Kabupaten Rembang. Hasil evaluasi Renja RKPD tahun 2015 yang telah diperoleh data sebanyak 40 SKPD di Kabupaten Rembang. Hasil perhitungan capaian kinerja per SKPD sebagai berikut:

Tabel 2.60
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
(Capaian s/d TW IV)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (tahun 2015)		Status Capaian	
		K	R	K	R
1	Dinas Pendidikan	88,93	88,06	Tinggi	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	93,62	81,76	Sangat Tinggi	Tinggi
3	RSUD	93,30	94,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum	98,25	74,09	Sangat Tinggi	Sedang
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98,73	91,47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Dinhubkominfo	100,00	98,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Badan Lingkungan Hidup	100,00	91,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
8	Dindukcapil	98,92	94,04	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	BPMPKB	99,92	79,35	Sangat Tinggi	Tinggi
10	Dinsos	99,68	87,41	Sangat Tinggi	Tinggi
11	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan UMKM	83,04	67,04	Tinggi	Sedang
12	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	95,74	99,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
13	BPBD	98,61	91,81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
14	Satuan Polisi Pamong Praja	98,53	61,97	Sangat Tinggi	Rendah
15	Setda	100,00	96,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
16	Setwan	60,56	78,20	Rendah	Tinggi
17	DPPKAD	100,00	95,85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
18	Inspektorat	93,75	84,28	Sangat Tinggi	Tinggi
19	BKD	97,29	95,30	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
20	KPPT	93,30	94,70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
21	Kec. Rembang	90,81	92,06	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
22	Kec. Kaliori	88,26	87,06	Tinggi	Tinggi
23	Kecamatan Sulang	95,45	85,79	Sangat Tinggi	Tinggi
24	Kecamatan Sumber	97,14	88,69	Sangat Tinggi	Tinggi
25	Kecamatan Bulu	96,19	97,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (tahun 2015)		Status Capaian	
		K	R	K	R
26	Kecamatan Lasem	99,89	77,20	Sangat Tinggi	Tinggi
27	Kecamatan Pancur	96,43	86,84	Sangat Tinggi	Tinggi
28	Kecamatan Sluke	95,24	93,70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
29	Kecamatan Pamotan	95,00	73,23	Sangat Tinggi	Sedang
30	Kecamatan Gunem	90,89	85,47	Sangat Tinggi	Tinggi
31	Kecamatan Sale	90,75	76,06	Sangat Tinggi	Tinggi
32	Kecamatan Kragan	93,24	96,79	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
33	Kecamatan Sedan	100,00	90,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
34	Kecamatan Sarang	100,00	78,96	Sangat Tinggi	Tinggi
35	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	98,77	65,66	Sangat Tinggi	Sedang
36	Dinas Pertanian Dan Kehutanan	92,16	31,64	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
37	Kantor Perpustakaan dan Arsip	92,14	88,06	Sangat Tinggi	Tinggi
38	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	93,91	71,31	Sangat Tinggi	Sedang
39	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	94,39	56,64	Sangat Tinggi	Rendah
40	Dinas Kelautan Dan Perikanan	94,74	23,87	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	Rata-Rata	94,69	82,32	Sangat Tinggi	

2.2.2. Realisasi Kinerja RKPD per Urusan

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pembangunan.

1. Urusan Pendidikan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan IV tahun 2015 sebesar 85,31% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 88,6% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.61
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pendidikan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pendidikan	85,31	88,60	Tinggi	Tinggi
Program Pendidikan Anak Usia Dini	93,79	93,31	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	91,16	90,39	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Program Pendidikan Menengah	88,31	88,73	Tinggi	Tinggi
Program Pendidikan Non Formal	78,07	88,05	Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	81,77	93,90	Tinggi	Sangat Tinggi
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	78,76	77,21	Tinggi	Tinggi

2. Urusan Kesehatan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2015 sebesar 94,24% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 83,07% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.62
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesehatan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kesehatan	94,24	83,07	Sangat Tinggi	Tinggi
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	98,69	99,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100,00	97,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengawasan Obat dan Makanan	100,00	75,43	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	96,43	74,57	Sangat Tinggi	Sedang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	85,90	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	77,62	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00	77,06	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	83,33	66,94	Tinggi	Sedang
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	90,00	79,83	Tinggi	Tinggi
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	91,67	66,88	Sangat Tinggi	Sedang
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	47,69	71,72	Sangat Rendah	Sedang

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100,00	74,37	Sangat Tinggi	Sedang
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100,00	99,19	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00	99,55	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100,00	96,10	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	100,00	86,90	Sangat Tinggi	Tinggi

3. Urusan Pekerjaan Umum

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 90,07% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 83,45% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.63
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pekerjaan Umum	90,07	83,45	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	82,40	75,62	Tinggi	Tinggi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	90,70	81,60	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	91,00	84,00	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	97,80	89,22	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	91,50	87,10	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong	96,40	92,30	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	80,69	74,30	Tinggi	Sedang

4. Urusan Perumahan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perumahan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,19% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.64
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perumahan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perumahan	100,00	92,19	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100,00	92,19	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

5. Urusan Penataan ruang

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan penataan ruang sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,00% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja maupun realisasi anggaran tergolong baik.

Tabel 2.65
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Penataan Ruang
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Penataan Ruang	100,00	77,00	Sangat Tinggi	Tinggi
Program pengelolaan areal pemakaman	100,00	95,27	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	100,00	58,72	Sangat Tinggi	Rendah

6. Urusan perencanaan Pembangunan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perencanaan pembangunan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,40% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini

menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.66
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perencanaan Pembangunan	100,00	93,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Kerjasama Pembangunan	100,00	98,49	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	91,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	84,86	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	97,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	95,44	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00	96,22	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00	89,83	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100,00	93,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

7. Urusan Perhubungan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perhubungan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi), sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,85% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.67
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perhubungan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perhubungan	100,00	92,85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,00	96,06	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Rehabilitasi dan	100,00	93,80	Sangat	Sangat

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100,00	95,93	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	100,00	85,78	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100,00	92,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	100,00	97,96	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Ketertiban, keamanan dan Keselamatan Pelayaran	100,00	87,90	Sangat Tinggi	Tinggi

8. Urusan Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan lingkungan hidup sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 96,24% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 86,20% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja urusan lingkungan hidup sudah sangat baik.

Tabel 2.68
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Lingkungan Hidup	96,24	86,20	Sangat Tinggi	Tinggi
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100,00	87,59	Sangat Tinggi	Tinggi
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100,09	91,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	87,09	Sangat Tinggi	Tinggi
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Peningkatan Pengendalian Polusi	100,00	64,27	Sangat Tinggi	Rendah
Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut & Hutan	100,00	97,59	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	100,00	96,93	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	69,80	64,23	Sedang	Rendah

9. Urusan Pertanahan

Program/kegiatan pada urusan pertanahan pada tahun 2015 tidak ada.

10. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 98,19% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,50% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dan realisasi anggaran urusan kependudukan dan catatan sipil tergolong sangat baik.

Tabel 2.69

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kependudukan dan Catatan Sipil	98,19	93,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penataan Administrasi Kependudukan	98,19	93,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,62% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.70

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00	89,62	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	98,26	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Berbagai Bidang Pembangunan	100,00	89,40	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan	100,00	84,34	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring serta	100,00	86,50	Sangat Tinggi	Tinggi

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak				

12. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 99,88% (kategori sangat tinggi), sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,35% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.71
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Dan keluarga Sejahtera (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	99,88	77,35	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	99,65	75,96	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana	100,00	72,79	Sangat Tinggi	Sedang
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	100,00	83,30	Sangat Tinggi	Tinggi

13. Urusan Sosial

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan sosial sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 97,33% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,61% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.72
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Sosial (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Sosial	97,33	89,61	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,	95,00	98,91	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100,00	91,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	91,67	82,05	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	100,00	92,50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	82,71	Sangat Tinggi	Tinggi

14. Urusan Ketenagakerjaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 92,80% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 87,61% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.73

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Ketenagakerjaan	98,70	87,61	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	96,11	87,64	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100,00	91,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	83,78	Sangat Tinggi	Tinggi

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 91,63% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 82,74% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.74

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	91,63	82,74	Sangat Tinggi	Tinggi

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Program Perencanaan Pengembangan IDK dan UMKM	100,00	93,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	100,00	35,33	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	41,38	47,44	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100,00	93,44	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	100,00	95,71	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi	91,67	98,38	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Promosi Produk Unggulan Daerah	100,00	97,92	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

16. Urusan Penanaman Modal

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan penanaman modal sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 90,31% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.75
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Penanaman Modal
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Penanaman Modal	100,00	90,31	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100,00	92,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	100,00	71,43	Sangat Tinggi	Sedang
Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana & Prasarana Daerah	100,00	98,53	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal	100,00	99,19	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengendalian Penanaman Modal	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pelayanan Penanaman Modal	100,00	80,65	Sangat Tinggi	Tinggi

17. Urusan Kebudayaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kebudayaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 75,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 42,57% (kategori sangat rendah). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan kebudayaan sudah baik, namun realisasi anggaran pembangunan sangat kurang, sehingga perlu di evaluasi kembali.

Tabel 2.76
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kebudayaan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kebudayaan	75,00	42,57	Sedang	Sangat Rendah
Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya	100,00	75,14	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YME	50,00	10,00	Sangat Rendah	Sangat Rendah

18. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pemuda dan olah raga sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 87,40% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 73,86% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan pemuda dan olah raga cukup baik.

Tabel 2.77
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemuda Dan Olah Raga
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pemuda dan Olah Raga	87,40	73,86	Tinggi	Sedang
Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya	85,00	99,93	Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	72,73	37,43	Sedang	Sangat Rendah
Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	100,00	98,40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	100,00	61,37	Sangat Tinggi	Rendah
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	91,67	83,39	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	75,00	62,66	Sedang	Rendah

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 98,01% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,43% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.78

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	98,01	95,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	98,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	91,43	98,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	97,02	97,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	99,38	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pendidikan Politik Masyarakat	100,00	99,48	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	100,00	91,68	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100,00	93,71	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	100,00	94,86	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	100,00	85,15	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	91,67	95,29	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 89,14% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 79,16% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja

dan realisasi anggaran pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian, dan persandian tergolong baik.

Tabel 2.79
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	89,14	79,16	Tinggi	Tinggi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,78	73,84	Sangat Tinggi	Sedang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,31	53,62	Sangat Tinggi	Rendah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97,75	90,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,17	94,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,86	71,23	Sangat Tinggi	Sedang
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	93,65	81,52	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	100,00	52,08	Sangat Tinggi	Rendah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	53,66	79,04	Rendah	Tinggi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	75,57	77,65	Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Penyelenggaraan Adm. Pengelolaan Barang Daerah	95,29	84,94	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	-	-	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	86,83	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah	100,00	93,44	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang Daerah	91,67	77,74	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana	100,00	98,32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :	100,00	34,55	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan	88,89	73,56	Tinggi	Sedang

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Sistem dan Prosedur Pengawasan				
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	82,91	93,42	Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pendidikan Kedinasan	90,08	48,59	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program peningkatan sarana pemerintahan	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
03. Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	100,00	99,94	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan	100,00	95,82	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	100,00	80,79	Sangat Tinggi	Tinggi
Program peningkatan fasilitas pelayanan publik	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penegakan Peraturan Daerah	98,33	85,04	Sangat Tinggi	Tinggi
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	100,00	90,88	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	50,00	98,88	Sangat Rendah	Sangat Tinggi

21. Urusan Ketahanan Pangan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 51,31% (kategori rendah). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan sudah baik, namun realisasi anggaran pembangunan masih kurang baik sehingga perlu dievaluasi kembali.

Tabel 2.80

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Ketahanan Pangan	100,00	51,31	Sangat Tinggi	Rendah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	51,31	Sangat Tinggi	Rendah

22. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 97,58% (kategori sangat

tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 79,65% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tergolong baik.

Tabel 2.81
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pemberdayaan masyarakat dan Desa	95,76	79,65	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	84,53	89,44	Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	93,73	100,69	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Fungsi Kantor Kelurahan	100,00	93,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	100,00	85,77	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Penanggulangan Kemiskinan	100,00	75,18	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	100,00	78,32	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan	100,00	77,03	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	100,00	74,23	Sangat Tinggi	Sedang
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	75,09	24,60	Tinggi	Sangat Rendah
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	100,00	95,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi	100,00	81,09	Sangat Tinggi	Tinggi

23. Urusan Statistik

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan statistik sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,78% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.82
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Statistik (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Statistik	100,00	99,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Data/Informasi	100,00	99,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

24. Urusan Kearsipan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kearsipan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 86,53% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dan realisasi pembangunan urusan statistik tergolong baik.

Tabel 2.83
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Statistik
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kearsipan	100,00	86,53	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ARSIP Daerah	100	89	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan kearsipan	100,00	83,82	Sangat Tinggi	Tinggi

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,24% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.84
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Komunikasi dan Informatika	100,00	89,24	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100,00	79,52	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengawasan,	100,00	98,96	Sangat	Sangat

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi			Tinggi	Tinggi

26. Urusan Perpustakaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perpustakaan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,97% (kategori sangat tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong sangat baik.

Tabel 2.85
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perpustakaan (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perpustakaan	100,00	99,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan	100,00	99,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

27. Urusan Pertanian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pertanian sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 85,87% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 74,24% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dan realisasi anggaran pembangunan tergolong cukup baik.

Tabel 2.86
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pertanian (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pertanian	85,87	74,24	Tinggi	Sedang
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	100,00	47,07	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Peningkatan Kualitas	50,90	43,24	Rendah	Sangat

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Bahan Baku				Rendah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	99,78	97,20	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	66,77	36,82	Sedang	Sangat Rendah
Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	77,25	77,86	Tinggi	Tinggi
Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan	48,51	13,90	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Peningkatan penerapan teknologi peternakan	87,13	83,99	Tinggi	Tinggi
Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	81,00	85,24	Tinggi	Tinggi
Peningkatan produksi hasil peternakan	90,75	72,50	Sangat Tinggi	Sedang
Pencegahan dan penanggulangan Hama dan penyakit tanaman	99,81	99,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100,34	95,64	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Agribisnis	100,00	95,26	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Pertanian Unggulan	100,00	91,59	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

28. Urusan Kehutanan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pendidikan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 86,86% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 78,71% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dan realisasi anggaran pembangunan urusan kehutanan tergolong baik.

Tabel 2.87
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kehutanan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kehutanan	86,86	78,71	Tinggi	Tinggi
Pemanfaatan potensi	106,50	76,01	Sangat	Tinggi

sumberdaya hutan			Tinggi	
Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan	100,00	98,34	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rehabilitasi hutan dan lahan	44,44	34,84	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan	100,00	99,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan	83,33	85,35	Tinggi	Tinggi

29. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan energi dan sumberdaya mineral sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 96,43% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 67,31% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral dan realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.88
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Energi dan Sumberdaya Mineral	96,43	67,31	Sangat Tinggi	Sedang
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	100,00	89,76	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	75,00	9,60	Sedang	Sangat Rendah
Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan	100,00	46,67	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Pembinaan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas	100,00	79,57	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan	100,00	98,78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Bencana Geologi	100,00	49,58	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah	100,00	97,21	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

30. Urusan Pariwisata

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pariwisata sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,27% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dan realisasi anggaran pembangunan urusan pariwisata tergolong baik.

Tabel 2.89
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pariwisata
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Pariwisata	100,00	77,27	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	99,55	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100,00	90,12	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kemitraan	100,00	42,13	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

31. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 75,00% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja urusan kelautan dan perikanan dan realisasi anggaran pembangunan tergolong cukup baik.

Tabel 2.90
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan kelautan dan perikanan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Kelautan Dan Perikanan	96,67	75,00	Sangat Tinggi	Sedang
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100,00	96,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	100,00	99,75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	100,00	62,05	Sangat Tinggi	Rendah
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	100,00	76,78	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100,00	86,17	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	60,00	17,07	Rendah	Sangat Rendah
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	100,00	77,55	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Optimalisasi Pengelolaan	100,00	88,26	Sangat Tinggi	Tinggi

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
dan Pemasaran Produksi Perikanan				
Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan	100,00	99,64	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	100,00	96,05	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan	100,00	64,24	Sangat Tinggi	Rendah
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100,00	35,62	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

32. Urusan Perdagangan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perdagangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 80,04% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 69,45% (kategori sedang). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan cukup baik.

Tabel 2.91
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perdagangan
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perdagangan	80,04	69,45	Tinggi	Sedang
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100,00	98,25	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	66,26	7,47	Sedang	Sangat Rendah
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,00	99,39	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen	100,00	97,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100,00	99,36	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunan sarana perdagangan	14,00	14,26	Sangat Rendah	Sangat Rendah

33. Urusan Perindustrian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perindustrian sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 86,30% (kategori tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,80% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.92
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perindustrian
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Perindustrian	86,30	89,82	Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100,00	99,47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	100,00	89,48	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	63,33	71,13	Rendah	Sedang
Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	87,78	98,60	Tinggi	Sangat Tinggi
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	66,67	82,79	Sedang	Tinggi
Program Penataan Struktur Industri	100,00	97,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

34. Urusan Ketransmigrasian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan ketransmigrasian sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 sebesar 100,00% (kategori sangat tinggi) sedangkan realisasi anggaran sebesar 88,22% (kategori tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tergolong baik.

Tabel 2.93
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Ketransmigrasian
(Capaian s/d TW IV)

Program	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Status Capaian Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	
	K	R	K	R
Ketransmigrasian	100,00	88,22	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100,00	88,22	Sangat Tinggi	Tinggi

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

2.3.1. URUSAN WAJIB

URUSAN PENDIDIKAN

- 1) Partisipasi masyarakat di jenjang pendidikan menengah masih rendah, ditunjukkan dengan capaian angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan kurang optimal. Adanya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015, pendidikan menengah menjadi urusan kewenangan pemerintah provinsi namun sebelum ada pelimpahan pada masa transisi ini, tahun 2016 masih menjadi urusan daerah kabupaten.
- 2) Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah.
- 3) Pembinaan pendidikan inklusi belum optimal.
- 4) Penanganan anak berkebutuhan khusus belum optimal.
- 5) Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal.
- 6) Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda.
- 7) Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada orang tua.
- 8) Partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dini (PAUD) masih rendah
- 9) Sarana prasarana pendidikan belum tercukupi dengan baik terutama pada jenjang pendidikan PAUD

URUSAN KESEHATAN

- 1) Derajat kesehatan masih berada dibawah rata-rata provinsi, untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memberikan perhatian khusus pada program kesehatan terkait pencapaian indikator AKI, AKB dan AKABA yang mempunyai kecenderungan stagnan.
- 2) Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja karena permasalahan kesehatan banyak dipengaruhi dari berbagai masalah diluar kesehatan, sehingga perlu dukungan dari lintas sektor diluar kesehatan. Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih belum optimal.
- 3) Masih terdapat prevalensi gizi buruk di Kabupaten Rembang, sejalan dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Rembang yang masih cukup tinggi.
- 4) Pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum baik. Pelaksanaan tersebut melibatkan beberapa aspek diantaranya pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan
- 5) Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rembang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

- 6) Selisih klaim Jamkesda/Jampersal pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih.
- 7) Jumlah tenaga kesehatan masih kurang, jumlah yang ada masih dibawah kebutuhan masyarakat.
- 8) Perkembangan kasus-kasus penyakit menular meningkat khususnya penyakit TB paru dan HIV/AIDS sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif agar perkembangannya dapat ditekan.
- 9) Pelayanan kesehatan pada cakupan layanan usia lanjut, rumah tangga ber-PHBS, akses air minum dan akses sanitasi/jamban, rumah tangga dengan kepemilikan SPAL masih rendah.
- 10) Penyuluhan kepada masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa dan deteksi diniya belum optimal sehingga pengetahuan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa terbatas pada masalah gangguan jiwa (psikotik).

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan keterpaduan secara luas dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya relatif kecil.
- 3) Pola pikir, sikap dan prilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. Kondisi ini menyebabkan program pengelolaan lingkungan hidup tidak cepat mendapat respon positif dan berkembang di masyarakat.

URUSAN PEKERJAAN UMUM

- 1) Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di Kabupaten Rembang khususnya yang selama ini menggantungkan pada sumber mata air Semen dan sumber air baku permukaan (embung dan sungai).
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat.
- 3) Manajemen jasa pengujian belum optimal.
- 4) Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi.
- 5) Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbaru terkait informasi permukiman dan bahan bangunan.

URUSAN PENATAAN RUANG

- 1) Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.

- 2) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD.
- 4) Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.
- 5) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
- 6) Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten.
- 7) Belum adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda.

URUSAN PERUMAHAN

- 1) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
- 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) Kurangnya koordinasi antar instansi/lembaga dalam pengembangan olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi.
- 2) Belum ada tindak lanjut pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, dapat diupayakan bekerjasama dengan SKPD terkait.
- 3) Sarana latihan para atlet semakin berkurang.
- 4) Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi;

URUSAN PENANAMAN MODAL

- 1) Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Kabupaten Rembang masih memerlukan telaah lebih lanjut.
- 2) Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas.
- 3) Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah dan harga tanah di Rembang yang cenderung semakin mahal.
- 4) Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Kabupaten Rembang

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 1) Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum profesional dalam pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan.
- 2) Belum semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya potensinya cukup besar.
- 3) Pengurus koperasi rata-rata belum mampu memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari terobosan usaha baru.
- 4) Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan UMKM untuk mengelola usahanya.
- 5) Lemahnya UMKM untuk mengakses Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank/Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM.
- 6) Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal.
- 7) Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/ kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya.

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 1) Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam.
- 2) Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat nasional sering menemui berbagai kendala.
- 3) Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan belum terkoneksi dengan baik.
- 4) Masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai SIAK secara on line dan jaringan komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan.

URUSAN KETENAGAKERJAAN

- 1) Data pengangguran yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang menyebabkan sulitnya mendata calon peserta kegiatan.
- 2) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan.
- 3) Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil, sehingga perluasan kesempatan kerja belum dapat maksimal, sementara penempatan kerja masih tergantung pada investor yang masuk.
- 4) Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah.
- 5) Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 6) Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

- 7) Masih terdapat tenaga kerja anak yang bekerja di tempat-tempat beresiko tinggi namun tidak dilaporkan antara lain di tempat-tempat usaha nonformal seperti warung kopi, usaha karaoke, kapal penangkap ikan dll.

URUSAN KETAHANAN PANGAN

- 1) Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak.
- 2) Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke Rembang karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya.
- 3) Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA).
- 4) Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/memproduksi makanan yang aman, bermutu dan halal.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
- 2) Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah.
- 3) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani RWC3 Semai dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPO, Perda PA).

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- 1) Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode sederhana misalnya melalui Pil dan Suntik.
- 2) Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan berkesinambungan.

URUSAN PERHUBUNGAN

- 1) Ketersediaan moda angkutan umum yang dapat menjangkau kawasan pedesaan dan perbatasan.
- 2) Rendahnya ketaatan terhadap batas maksimal muatan (tonase).
- 3) Minimnya kesadaran pengguna kendaraan dalam disiplin berlalulintas.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Belum terintegrasinya aplikasi online di setiap SKPD.
- 2) Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain.
- 3) SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit.

URUSAN PERTANAHAN

- 1) Masih banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, belum semua permasalahan yang masuk bisa ditangani.
- 2) Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonannya.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- 1) Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial.
- 2) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan peningkatan jumlah PPNS yang relatif masih sedikit.
- 3) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan jumlah pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Terdapat Perda yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda.
- 5) Permasalahan dengan Kabupaten yang berbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

- 1) Substansi PP 38 Tahun 2007 belum implementatif masih menimbulkan multitafsir karena bahasa antara bidang urusan satu dengan bidang yang lain berbeda-beda ada yang menggunakan bahasa program dan ada yang menggunakan bahasa kegiatan. Juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh sektor atau kementerian masih ada yang tidak sinkron dengan PP 38 Tahun 2007 sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Petunjuk operasional PP 38 Tahun 2007 seperti NSPK dan SPM sangat terlambat keluarnya, bila ada/telah keluar tidak disosialisasikan ke daerah-daerah.
- 2) Amanat PP 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019 terkait prioritas pembangunan ke-2, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang merupakan kelanjutan dari agenda pembangunan sebelumnya belum dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur. Pelaksanaan Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga belum optimal.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan beban kerja urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya,

politik dan lingkungan yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang belum secara optimal.

- 2) Masih banyak program kegiatan dari Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri yang dibebankan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum dapat tertangani secara keseluruhan.
- 3) Upaya pemberdayaan masyarakat dan desa belum optimal, terutama dalam bidang ekonomi terlihat dari jumlah UED SP dan pasar desa statis serta BUMDes yang menurun jumlahnya.

URUSAN SOSIAL

- 1) Program Pengentasan kemiskinan melalui berbagai programnya masih belum menunjukkan hasil yang optimal karena tidak terintegrasi antara sasaran dan berbagai program yang diterima.
- 2) Penanganan masalah kemiskinan melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait.
- 3) Penanganan PMKS belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.
- 4) Data monitoring dan evaluasi hasil penanganan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya.
- 5) Tidak ada data yang akurat (*by name by addres*) PMKS sehingga penanganan masalah sosial tingkat keberhasilannya rendah.
- 6) Kapasitas SDM yang terlibat dalam penanganan PMKS (TKSK, Karang Taruna, Tagana dll) masih rendah.

URUSAN KEBUDAYAAN

- 1) Belum tersusunnya regulasi cagar budaya di Kabupaten Rembang.
- 2) Inventarisasi mengenai cagar budaya telah tersedia namun pengembangan dan pengelolaannya belum ada perencanaan secara komprehensif.
- 3) Pengembangan dan pelestarian kesenian daerah di Kabupaten Rembang belum optimal.

URUSAN STATISTIK

- 1) Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data.
- 2) Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan.
- 4) Sering terjadi tuntutan peraturan perundang-undangan tentang kebutuhan data guna berbagai kepentingan saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hal ini berakibat munculnya ragam data yang sangat banyak, dan menyulitkan dinas, instansi, lembaga terkait penanggung jawab data dalam penyediaannya.

URUSAN KEARSIPAN

- 1) Sampai dengan akhir tahun 2013 kapasitas gedung depo penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis belum memadai. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) akibatnya memperpendek umur arsip.

URUSAN PERPUSTAKAAN

- 1) Minimnya jumlah tenaga fungsional tertentu (pustakawan dan arsiparis) yang tersedia. Akibat dari kekurangan tenaga fungsional, maka pengelolaan kearsipan dan pelayanan perpustakaan kurang maksimal.
- 2) Pengembangan perpustakaan oleh Pemda Rembang masih kurang menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan, sehingga pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan masih tersendat-sendat.

2.3.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

URUSAN PARIWISATA

- 1) Perencanaan terpadu/Grand design pengembangan ODTW di Kabupaten Rembang belum ada.
- 2) Tingkat kejenuhan wisatawan tinggi terhadap ODTW yang ada di Rembang, sebagai akibat kurangnya diversifikasi ODTW yang ada.
- 3) Strategi promosi yang kurang efektif.
- 4) Pengelolaan ODTW belum dilakukan secara professional dan perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan ODTW secara optimal.
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Produksi dan produktivitas masih rendah.
- 2) Overfishing penangkapan di jalur I atau perikanan pantai, berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku usaha penangkapan.
- 3) Terbatasnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam tingkat pendidikan serta penguasaan teknik tangkap dan budidaya, serta ketidakmampuan mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi maju, khususnya di bidang aqua bisnis, sehingga mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain.
- 4) Masih lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan terhambatnya upaya meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup.
- 5) Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti terbatasnya pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap bagi nelayan, sehingga nelayan belum mampu menjangkau jalur yang lebih jauh yang memiliki potensi ikan yang masih banyak.
- 6) Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan di laut.
- 7) Terbatasnya akses modal nelayan dan pembudidaya ikan.

URUSAN PERTANIAN

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian SDM pertanian meliputi petani dan petugas. Sebagian besar petani di Kabupaten Rembang berusia lanjut dengan

pendidikan relatif rendah. Minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian rendah, terutama pada sisi on-farm (budidaya). Selain itu, jumlah petugas Penyuluh dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) makin terbatas, dengan angka pensiun yang tidak berimbang dengan perekrutan petugas baru sehubungan dengan moratorium rekrutmen PNS. Akibatnya, rasio antara petugas dan petani/kelompok tani jauh dari ideal yaitu satu desa satu petugas.

- 2) Adopsi teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan Petani pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang sudah terbiasa dilakukan secara turun-temurun. Petani akan mengadopsi teknologi terbaru apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar-benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakini selama bertahun-tahun. Temuan teknologi terbaru belum secara cepat dapat diinformasikan ke tingkat lapang.
- 3) Akses terhadap permodalan Sumber utama pembiayaan usahatani sebagian besar berasal dari modal sendiri. Sementara itu pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif rendah dibanding skim kredit komersial. Skema pembiayaan usahatani antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, penyerapan skema kredit tersebut belum maksimal karena bank-bank penyalur mensyaratkan agunan ataupun penjaminan kepada petani/peternak, sehingga petani/peternak belum dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud.
- 4) Jaringan Irigasi Jaringan irigasi tersier pada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan. Di sisi lain kondisi jaringan irigasi tersier masih banyak yang belum permanen atau terbuat dari tanah sehingga memperlambat aliran air bahkan menyebabkan kebocoran di sepanjang saluran yang mengakibatkan ketidakmerataannya pembagian air sejak hulu hingga hilir.
- 5) Jalan Pertanian di sebagian besar wilayah perdesaan jalan pertanian belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian.
- 6) Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi. Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimiawi masih cukup tinggi dalam budidaya, bahkan untuk komoditas tertentu penggunaannya melampaui jumlah yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi dan kerusakan ekosistem.

URUSAN KEHUTANAN

- 1) Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih terjadi pencurian kayu hutan.
- 2) SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh.

- 3) Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan secara keseluruhan belum sesuai standar teknis.
- 4) Produk primer dan atau produk olahan perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu.
- 5) Daya dukung lahan, air dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan sehingga perlu terus ditingkatkan.

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1) Masih terdapat dusun yang sebagian besar KK nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar.
- 2) Masih terjadinya ketidaklancaran distribusi LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum optimalnya pengawasan dan belum meratanya sebaran penyalur/agen dan sub penyalur/pangkalan.
- 3) Kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal.
- 4) Rehabilitasi lahan bekas tambang kurang optimal.

URUSAN INDUSTRI

- 1) Terbatasnya kemampuan SDM pembina industri dalam penguasaan manajemen bisnis.
- 2) Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi.
- 3) Umumnya IKM masih lemah dalam desain, inovasi dan kreativitas produk.
- 4) Dalam berproduksi sebagian besar pengusaha hanya berdasarkan Job Order/Buyer Minded.
- 5) Kemitraan Usaha pemasaran masih minim sehingga jaringan pasar masih terbatas.
- 6) Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif mahal.
- 7) Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan oleh perajin, terbatasnya dukungan dengan bantuan pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.

URUSAN PERDAGANGAN

- 1) Gejolak harga bahan pokok yang terjadi setiap tahun cukup menjadi permasalahan yang harus di minimalkan meskipun hal tersebut tidak bisa dihindari terkait pada setiap adanya menjelang hari-hari besar agama, pergantian tahun, permintaan yang meningkat dan persediaan barang yang kurang memadai. Pengaruh cuaca yang mengakibatkan produksi bahan pokok menurun juga mengakibatkan terjadi gejolak harga.
- 2) Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi dan fluktuasi harga belum terkendali.
- 3) Sarana dan Prasarana khususnya pergudangan keberadaannya belum merata ke semua kecamatan, khususnya untuk pergudangan komoditi primer seperti hasil pertanian.
- 4) Pembinaan dan pengawasan sistem penjualan langsung belum optimal.
- 5) Pengembangan pasar tradisional cukup dipengaruhi oleh adanya persaingan dengan munculnya pasar modern/toko modern yang cukup banyak,

mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional.

- 6) Keberadaan sektor informal yang bergerak di usaha perdagangan belum sepenuhnya menerima pembinaan yang semestinya, karena keterbatasan anggaran dan besarnya unit usaha yang harus dibina.

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

- 1) Kondisi di lokasi transmigrasi kadang masih dijumpai tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, sehingga tidak sesuai dengan azas 2C (Clear and Clean) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). Hal ini mendorong terjadi keresahan transmigran.
- 2) Persiapan lokasi permukiman dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan penumpukan kegiatan pengerahan dan pemindahan calon transmigran di akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban menumpuk pada akhir tahun anggaran.



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2020. Keberhasilan pencapaian target dana sasaran dalam RKPD merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga proyeksi tahun 2017 diupayakan mendekati kondisi aktual pada sasaran yang diharapkan untuk dapat mendukung keberhasilan RKPD. Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi ke depan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Dimana kondisi tersebut harus bersinergi, sinkron, dan berintergrasi sehingga kondisi perekonomian dapat terus membaik. Demikian pula untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 harus memperhatikan perkembangan perekonomian tersebut baik secara global, nasional maupun regional..

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Menjelang penghujung tahun 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global menjelang tahun 2016 dan tahun 2017 mendatang diproyeksikan tetap 'moderat dan tidak merata. Hal tersebut disebabkan ketidakmerataan laju ekspansi di negara-negara maju dan diperburuk dengan perlambatan di pasar negara berkembang. Menurut IMF, pemberian stimulus agresif masih sangat diperlukan di beberapa negara agar tren pertumbuhan ekonomi global di tahun ini tidak terlalu buruk.

IMF melihat secara global, perlambatan ekonomi yang tengah terjadi saat ini berpotensi berlangsung lama. Secara spesifik, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan untuk negara-negara maju menjadi 2 persen dari 2,1 persen di tahun 2016 dan untuk tahun 2017 mendatang dipangkas menjadi 2,2 persen dari 2,4

persen. Sementara itu, proyeksi ekonomi AS untuk tahun 2016 justru dinaikkan menjadi 2,7 persen dari 2,6 persen, sedangkan untuk tahun 2017 diturunkan menjadi 2,8 persen dari 3 persen.

Untuk proyeksi pertumbuhan kawasan euro tahun 2016 tetap dipertahankan IMF sebesar 1,5 persen, sedangkan prospek untuk 2017 dipangkas menjadi 1,6 persen dari 1,5 persen. Di antara empat negara utama di kawasan euro, proyeksi pertumbuhan Jerman untuk kedua kalinya di tahun 2016 ini diturunkan, sementara proyeksi pertumbuhan untuk Perancis dan Spanyol tetap dipertahankan, dan prospek pertumbuhan Italia dinaikkan. Lalu untuk perkiraan pertumbuhan Jepang dan Kanada untuk kedua kalinya juga diturunkan pada tahun 2016, sementara proyeksi pertumbuhan untuk Inggris dinaikkan menjadi sebesar 2,5 persen dan prospek untuk tahun 2017 mendatang tetap dipertahankan sebesar 2,2 persen. Sementara itu proyeksi rebound pertumbuhan ekonomi di pasar negara berkembang pada tahun 2017 mendatang juga tidak akan mencerminkan pemulihan secara umum.

Yang juga tidak luput dari sorotan IMF adalah proyeksi pertumbuhan Tiongkok yang diprediksi akan mencatat pertumbuhan di bawah 7 persen tahun 2016 yaitu sebesar 6,8 persen dan turun sebesar 6,3 persen pada 2017 mendatang. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan India untuk tahun 2016 juga dipangkas menjadi 7,3 persen dari 7,5 persen, dan proyeksi untuk tahun 2017 tetap dipertahankan sebesar 7,5 persen.

Sebelumnya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal bulan Oktober 2015 ini juga telah lebih dulu secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia pada tahun 2016 dari yang semula ditargetkan sebesar 3,3 persen turun menjadi 2,8 persen. Tidak jauh berbeda dengan alasan IMF, pasalnya pemangkasan yang dilakukan WTO dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang membebani ekonomi global pada semester pertama 2016, termasuk penurunan permintaan impor di Tiongkok, Brasil dan negara berkembang lainnya, penurunan harga minyak dan komoditas primer lainnya, serta fluktuasi nilai tukar yang signifikan. Selain itu, volatilitas di pasar keuangan, ketidakpastian atas sikap perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan data ekonomi bervariasi baru-baru ini dinilai turut mempersuram prospek ekonomi dan perdagangan dunia pada paruh kedua tahun ini serta seterusnya. Lebih jauh lagi, bahkan para petinggi WTO menyatakan dalam skenario terburuk mereka kemungkinan pemangkasan proyeksi masih dapat terjadi mengingat rentannya ekonomi global saat ini terutama jika perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang memburuk.

Jika proyeksi saat ini terealisasi, 2016 akan menandai tahun keempat berturut-turut di mana pertumbuhan perdagangan tahunan turun di bawah tiga persen dan tahun keempat di mana perdagangan telah tumbuh di sekitar tingkat yang sama

seperti PDB (produk domestik bruto) dunia, bukan dua kali lebih cepat seperti yang terjadi pada 1990-an dan awal 2000-an. Menurut WTO, lambatnya pemulihan ekonomi dari penurunan angka impor negara-negara berkembang baru-baru ini akan memangkas 0,5 persen pertumbuhan perdagangan global pada 2016.

Sebagai informasi, sejak Juni 2015, kurs mata uang Rusia, Kolombia, Brasil, Turki, Meksiko, dan Cile telah anjlok 20-50 persen melawan kurs dolar AS. Tidak berbeda, kurs ringgit Malaysia dan rupiah Indonesia mencapai titik terendah sejak krisis finansial Asia pada 1998. Tiongkok, yang terkonfirmasi melakukan devaluasi, mencatatkan penurunan kurs yuan 4,5 persen terhadap dolar AS, yang juga mendorong pelemahan kurs di negara-negara berkembang.

Sejauh ini, perekonomian global memang diprediksi masih akan terus melanjutkan ekspansi pada fase yang moderat tetapi risiko terhadap perekonomian dunia semakin di sisi negatifnya. Ini termasuk pelambatan tajam dari perkiraan di negara bertumbuh pesat dan negara berkembang, kemungkinan destabilisasi arus keuangan dari kenaikan suku bunga oleh The Fed AS, dan biaya tak terduga terkait dengan krisis migrasi di Eropa.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Di tengah pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berjalan lambat pada tahun 2016, kondisi prospek perekonomian Indonesia selama dua tahun ke depan dirasa akan mengalami perkembangan yang membaik. Perekonomian Indonesia semakin baik ditunjukkan dengan kondisi makroekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Menurut proyeksi Bank Indonesia, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan ada pada kisaran 5,4-5,8 persen dengan laju inflasi pada kisaran 4 ± 1 persen. Setahun kemudian pada tahun 2017, prospek perekonomian Indonesia dirasakan semakin membaik lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6-6,0 persen

Sementara itu, IMF memproyeksikan bahwa pada tahun 2016 perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,2 persen dan meningkat menjadi 5,5 persen pada tahun 2017. ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia namun proyeksinya lebih tinggi daripada IMF. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil proyeksi ADB pada tahun 2016 akan mencapai 5,5 persen dan meningkat menjadi 6,0 persen pada tahun 2017. Di sisi harga, IMF dan ADB juga memproyeksikan laju inflasi Indonesia, namun nilai proyeksinya lebih tinggi dari hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. IMF memproyeksikan laju inflasi Indonesia sebesar 6,8 persen pada tahun 2016 dan akan menurun pada tahun 2017 menjadi 5,8

persen. Sementara itu ADB memperkirakan inflasi Indonesia akan berada pada nilai 5,5 persen dan 4,0 persen pada tahun 2016 dan 2017.

Economic Outlook Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa pada tahun 2016 Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Tantangan tersebut akan dampak pada kondisi perekonomian nasional yang akan mendapat tekanan. Oleh karena itu perlu langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia yaitu perekonomian nasional masih akan dihantui bayangan perlambatan tahun depan menyusul rencana kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika (The Fed) yang mau tidak mau akan berimbas pada kondisi moneter secara global. Tantangan lainnya yaitu masih berlanjutnya pelemahan rupiah dan prediksi inflasi yang masih bergerak pasca kenaikan bahan bakar minyak, dan perbankan masih kurang mengoptimalkan diversifikasi dan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan.

Tantangan pembangunan nasional pada tahun 2016 dan 2017 di bidang perekonomian diperkirakan masih terkait dengan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, risiko pasar keuangan dalam negeri, ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta peningkatan daya saing ekonomi merupakan tantangan pada sisi internal. Tantangan lain dari sisi internal adalah menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sementara itu, tantangan lingkungan perekonomian global dalam jangka menengah antara lain risiko gejolak harga komoditas di pasar global, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan pelaksanaan agenda pembangunan global pasca-2015. Dalam menghadapi tantangan tersebut, serta memerhatikan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, maka pemerintah dalam jangka menengah diharapkan tetap menjalankan peran sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini, APBN jangka menengah diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh membaik pada triwulan IV 2015 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,8% (yoy). Sebagian besar komponen di sisi pengeluaran menunjukkan peningkatan terutama



dari sisi konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh membaik sejalan dengan adanya dorongan konsumsi saat Hari Raya dan masa pilkada serentak. Anggaran pemerintah juga terealisasi cukup baik sehingga memperbaiki komponen konsumsi pemerintah pada komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, cukup gencarnya peningkatan infrastruktur daerah serta adanya optimisme dunia usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi daerah. Hal ini terlihat pada peningkatan pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di triwulan IV.

Meningkatnya konsumsi dan investasi di sisi pengeluaran terlihat pula pada membaiknya pertumbuhan ekonomi di lapangan usaha perdagangan dan konstruksi, sedangkan lapangan usaha pertanian mengalami perlambatan yang menahan perbaikan pertumbuhan lebih jauh. Melambatnya pertanian disebabkan oleh usainya musim panen di triwulan III 2015.

Perkembangan harga (inflasi) Jawa Tengah turut membaik di triwulan IV ditandai dengan penurunan inflasi. Inflasi pada triwulan IV 2015 tercatat sebesar 5,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,15% (yoy). Penurunan inflasi ini disebabkan oleh penurunan harga-harga komoditas setelah meningkat saat Idul Fitri. Selain itu pada komponen komoditas harga-harga yang ditetapkan pemerintah (*administered prices*) terjadi penyesuaian harga. Harga elpiji maupun bahan bakar non-subsidi mengalami penurunan harga, menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Hal ini terlihat dari rincian kelompok utama yang mendorong perlambatan inflasi di triwulan IV. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menjadi kelompok utama pendorong turunnya inflasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyesuaian harga pangan setelah Ramadhan dan Idul Fitri di awal triwulan. Secara umum pada triwulan IV 2015, inflasi tahun kalender mencatatkan angka sebesar 1,54% (ytd).

Di tengah pemulihan ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih akan berjalan lambat pada tahun 2016, kondisi prospek perekonomian Indonesia Jawa Tengah selama dua tahun ke depan dirasa akan mengalami perkembangan yang membaik. Perekonomian Jawa Tengah semakin baik ditunjukkan dengan kondisi makroekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Menurut proyeksi Bank Indonesia perwakilan regional Jawa Tengah, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan ada pada kisaran 5,8-6,3% dengan laju inflasi pada kisaran 4,5-5%. Setahun kemudian pada tahun 2017, prospek perekonomian Jawa Tengah diramalkan semakin membaik lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-6,5%.



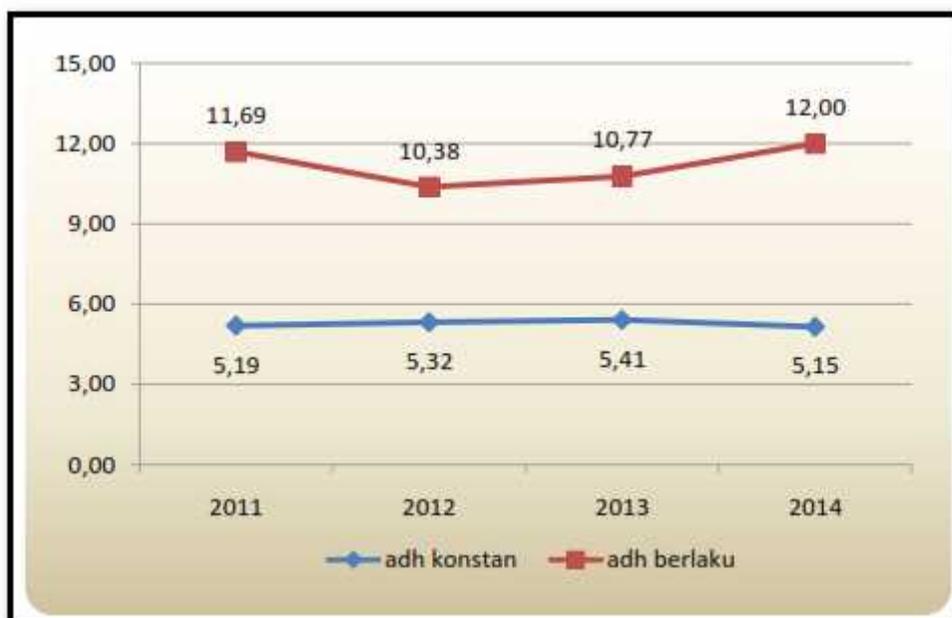
3.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama empat tahun terakhir terlihat cukup baik, karena dengan pertumbuhan yang positif. Untuk laju pertumbuhan PDRB *adh konstan* dengan menggunakan seri tahun 2010, pertumbuhan pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebesar 5,19 persen, dan terus meningkat pada tahun 2012-2013, namun pada tahun 2014 laju pertumbuhannya melambat lagi menjadi 5,15 persen. Sektor yang cukup memberikan andil terhadap perkembangan ini adalah sektor pertanian. Pada umumnya semua sektor lapangan usaha laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali subsektor pertanian yang pertumbuhannya agak melambat. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi *adh konstan* maupun *adh berlaku* selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.1.

Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2011-2014



Sumber: BPS Kab. Rembang, 2015

3.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Rembang Selama tahun 2011-2014, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Rembang atas dasar harga berlaku telah mencapai 12,807 trilyun rupiah, naik dari tahun 2013 sebesar 11,435 trilyun rupiah. Sedangkan menurut harga konstan mencapai 10,282 trilyun rupiah pada tahun 2014, mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 9,778 trilyun rupiah

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2010)
Kabupaten Rembang Tahun 2008-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.817.198	2.939.405	3.042.784	3.171.162	2.992.145
Pertambangan dan penggalian	272.862	265.176	276.356	291.766	310.768
Industri pengolahan	1.456.976	1.525.025	1.693.227	1.863.046	2.143.284
Pengadaan Listrik dan Gas	6.272	7.120	7.925	8.734	9.202
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.395	5.457	5.449	5.438	5.546
Konstruksi	626.240	667.530	708.583	677.378	776.630
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.222.456	1.299.711	1.310.768	1.351.958	1.406.725
Transportasi dan Pergudangan	304.815	318.345	339.534	375.321	414.922
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	254.382	270.421	284.037	302.419	336.232
Informasi dan Komunikasi	91.957	102.700	112.697	124.070	145.366
Jasa Keuangan dan Asuransi	333.652	348.945	362.871	383.295	407.252
Real Estate	85.569	91.186	94.743	99.192	105.521
Jasa Perusahaan	19.335	21.336	22.547	26.308	28.189
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	367.808	376.447	380.889	384.053	386.622
Jasa Pendidikan	264.568	313.253	365.529	423.906	486.880
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76.245	84.275	94.361	102.304	120.619
Jasa lainnya	167.816	171.970	174.863	188.600	206.282
PDRB	8.373.547	8.808.303	9.277.163	9.778.950	10.282.184

Sumber : Rembang Dalam Angka, 2015

Dalam rentang tahun yang sama, laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Rembang ADHK relatif berfluktuasi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan tertinggi tercapai di sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,90% diikuti sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 17,16% serta sektor Industri pengolahan sebesar 15,04%. Upaya pemerintah daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan dengan mendorong percepatan laju pertumbuhan sektor-sektor

dominan. Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Rembang
Tahun 2009-2013 (%)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,34	3,52	4,22	-5,65
Pertambangan dan penggalian	-2,82	4,22	5,58	6,51
Industri pengolahan	4,67	11,03	10,03	15,04
Pengadaan Listrik dan Gas	13,52	11,30	10,21	5,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,15	-0,16	-0,19	1,98
Konstruksi	6,59	6,15	-4,40	14,65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	0,85	3,14	4,05
Transportasi dan Pergudangan	4,44	6,66	10,54	10,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	5,03	6,47	11,18
Informasi dan Komunikasi	11,68	9,73	10,09	17,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,58	3,99	5,63	6,25
Real Estate	6,56	3,90	4,70	6,38
Jasa Perusahaan	10,35	5,68	16,68	7,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,35	1,18	0,83	0,67
Jasa Pendidikan	18,40	16,69	15,97	14,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	11,97	8,42	17,90
Jasa lainnya	2,48	1,68	7,86	9,38
PDRB	5,19	5,32	5,41	5,15

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2015

Struktur perekonomian Kabupaten Rembang didominasi oleh tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Rembang meliputi Sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun demikian kontribusi sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 33.64% pada tahun

2010 menjadi 29.10% pada tahun 2014. Sementara kontributor terbesar kedua, sektor Industri pengolahan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 17.40% meningkat menjadi 20.84% pada tahun 2014. Adapun kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai penyumbang terbesar ketiga mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2010 sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 14,60% dan menurun menjadi 13,68% pada tahun 2014. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Rembang menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.3.

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rembang
Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2010 (%)
Tahun 2010-2014**

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.64	33.37	32.80	32.43	29.10
Pertambangan dan penggalian	3.26	3.01	2.98	2.98	3.02
Industri pengolahan	17.40	17.31	18.25	19.05	20.84
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
Konstruksi	7.48	7.58	7.64	6.93	7.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.60	14.76	14.13	13.83	13.68
Transportasi dan Pergudangan	3.64	3.61	3.66	3.84	4.04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.04	3.07	3.06	3.09	3.27
Informasi dan Komunikasi	1.10	1.17	1.21	1.27	1.41
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.98	3.96	3.91	3.92	3.96
Real Estate	1.02	1.04	1.02	1.01	1.03
Jasa Perusahaan	0.23	0.24	0.24	0.27	0.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.39	4.27	4.11	3.93	3.76
Jasa Pendidikan	3.16	3.56	3.94	4.33	4.74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.91	0.96	1.02	1.05	1.17
Jasa lainnya	2.00	1.95	1.88	1.93	2.01
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2014

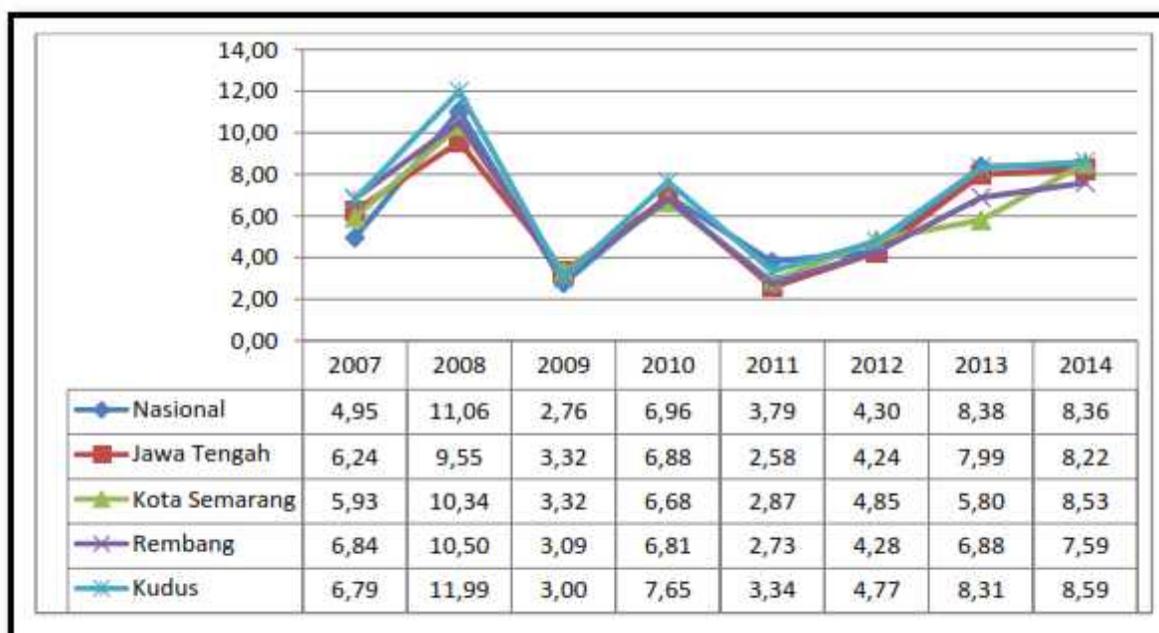
3.2.1.3 Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau *stagnan*. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat Inflasi di Rembang cenderung fluktuatif dari tahun 2010-2013. Tercatat inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,81 mengalami penurunan menjadi 2,73 pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 naik lagi menjadi 4,28, sedangkan di tahun 2013 naik menjadi 6,88 dan naik lagi menjadi 7,59 pada tahun 2014. Kondisi inflasi selama kurun waktu lima tahun dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah yaitu berada pada kisaran dibawah 10%. Angka inflasi di Kabupaten Rembang rata-rata masih berada di bawah Inflasi Propinsi Jawa Tengah namun masih di atas inflasi Nasional seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.

Laju inflasi Kabupaten Rembang , Nasional, Jawa Tengah dan Kota Semarang dan Kabupaten Kudus Tahun 2007-2014



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi Rembang, BPS 2014

Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kabupaten Rembang tahun 2014 yakni 2,35 persen, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,16 persen

dan kelompok Bahan makanan sebesar 1,48 persen. Sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga memberi andil sebesar 0,07 persen.

Tabel 3.5.

Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Tahun 2014

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)
U M U M	7,59
1. Bahan Makanan	1,48
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,16
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,16
4. Sandang	0,24
5. Kesehatan	0,12
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,07
7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,35

Sumber: Angka Inflasi, BPS Kabupaten Rembang, 2015

Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui instrumen kebijakan fiskal dengan mengenakan pajak untuk mengurangi permintaan agregat, menekan pengeluaran pemerintah untuk mendorong keandirian masyarakat serta mengurangi ekonomi biaya tinggi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

3.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Rembang saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian kabupaten Rembang 2016 dan 2017 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 3.6.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	2013	2014	2015*)	2016*)	2017*)
1.	PDRB ADHB (Juta Rp.)	11.435.457	12.807.181	13.703.684	14.868.497	15.909.292
	PDRB ADHK (Juta Rp.)	9.778.950	10.282.184	11.413.224	12.326.282	13.558.910
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,41	5,15	5,22	5,28	5,32

3.	Inflasi (%)	6,88	7,59	6,84	6,81	6,12
4.	PDRB per Kapita ADHK (juta Rp.)	16,1	16,7	17,24	17,88	18,02
5.	Kebutuhan Investasi (miliar Rp.)	3.926,00	4.259,33	551.940	6.941	7.107
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,98	5,23	5,01	4,87	4,50
7.	Kemiskinan (%)	20,97	19,5	18,02	17,54	16,92
8.	NTP	103,38	105,12	108	109	110

Keterangan : *) angka sementara

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Rembang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2016. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2017 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Rembang.

Selain itu, guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan

dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 diarahkan pada:

- a) Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk optimalisasi penarikan PBB yang sudah menjadi kewenangan Kabupaten, serta pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b) Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana bagi hasil;
- c) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
- d) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- e) Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
- f) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- g) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2017 menggunakan pendekatan proporsional, dimana asumsi kenaikan Pendapatan Daerah akan selaras dengan rencana kenaikan Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah pada Tahun 2017 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2017

NO	URAIAN	RKPD 2017
1	2	5
1	PENDAPATAN DAERAH	1,591,996,421,810
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180,807,678,500
1.1.1	Pajak Daerah	38,153,500,000
1.1.2	Retribusi Daerah	27,853,821,500

NO	URAIAN	RKPD 2017
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,340,000,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108,460,357,000
1.2	Dana Perimbangan	967,595,960,310
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28,052,000,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	939,543,960,310
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	443,592,783,000
1.3.1	Hibah	1,566,904,000
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	67,809,000,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	374,216,879,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.3.2.1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Arah Kebijakan belanja tidak langsung tahun 2017 meliputi :

- 1) Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai, yang sifatnya mengikat (*mandatory*).
- 2) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/ kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dalam pemberian belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- 4) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi

dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan kepada Desa

- 5) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Arah Kebijakan belanja langsung tahun 2017 meliputi:

- a) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.
- b) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif.
- c) Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan.
- d) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritas daerah pada tahun 2017.
- e) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- f) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- g) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, bahwa struktur

belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada RKPD Tahun Anggaran 2017, berdasarkan proyeksi pendapatan daerah maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2017

NO	URAIAN	RKPD 2017
1	2	5
2.	BELANJA DAERAH	1,875,171,421,810
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,186,838,623,200
2.1.1	Belanja Pegawai	800,108,844,169
2.1.2	Belanja Bunga	37,000,000
2.1.3	Belanja Subsidi	
2.1.4	Belanja Hibah	24,838,428,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18,985,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	6,455,961,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	335,413,390,031
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	688,332,798,610
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan dana pembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka ada kemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebanan belanja

pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehingga banyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnya pemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yang mengalami defisit. namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah. maka terjadi transaksi keuangan yang defisit. dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain, seperti : masyarakat, swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi. efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2017 diarahkan :

1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2017 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan ;
- c. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;

- f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
 - g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat;
2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- Sumber pengeluaran Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2016 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rembang Tahun 2017

NO	URAIAN	RKPD 2017
1	2	5
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	295,500,000,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	295,500,000,000
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	295,500,000,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,325,000,000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	12,270,000,000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55,000,000
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah	-
	Urusan Kas dan Perhitungan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12,325,000,000
	Pembiayaan Netto	283,175,000,000
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas

Terwujudnya SDM berkualitas ditandai dengan:

- a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif, produktif dan mandiri melalui perwujudan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
- c. Terwujudnya penduduk kabupaten Rembang yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
- d. Terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Terwujudnya tenaga kerja terampil yang berkualitas dan memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, melalui Peningkatan kualitas dan kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah maupun Swasta, sehingga mampu berkompetisi serta mengisi peluang pasar kerja, berkembangnya kesempatan kerja, berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kualitas keharmonisan hubungan industrial.
- f. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- g. Terwujudnya budaya membaca pada masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
- h. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak melalui peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak yang menjamin tumbuh kembang anak.
- i. Terwujudnya SDM yang berkarakter kebangsaan dan nasionalis melalui pembangunan jati diri bangsa, pengembangan karakter dan identitas bangsa dan aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.

- j. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
 - k. Terwujudnya Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (*nation building*) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan olahraga yang maju untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - l. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
 - m. Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitas dalam penyelenggaraan transmigrasi.
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing
- Terwujudnya Perekonomian Daerah yang maju dan berdaya saing ditandai oleh:
- a. Terwujudnya struktur perekonomian yang kuat melalui penguatan struktur ekonomi daerah berbasis primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier.
 - b. Terwujudnya agrobisnis yang maju dan berkembang peningkatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir, peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
 - c. Terwujudnya penyediaan sistem informasi pertanian melalui deseminasi inovasi teknologi dan pengembangan data pertanian yang berkelanjutan.
 - d. Terwujudnya SDM pertanian yang kompeten dalam peningkatan produktivitas pertanian.
 - e. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan yang mantap dan memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
 - f. Terwujudnya struktur industri yang kuat melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal (pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan), pengembangan kluster kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Rembang.
 - g. Terwujudnya perdagangan yang optimal melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
 - h. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang mandiri melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan,

peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

- i. Terwujudnya akses lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
 - j. Terwujudnya peningkatan investasi secara berkelanjutan melalui penguatan pelayanan penanaman modal, pengembangan kebijakan yang pro penanaman modal, membangun infrastruktur ekonomi yang baik, menekan *high cost economy* dan penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal.
 - k. Terwujudnya daya tarik kepariwisataan melalui pelestarian peninggalan budaya, tradisi, kesenian, pengembangan obyek wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata baik asing maupun domestik serta lama tinggalnya.
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai
- Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Memadai ditandai oleh:
- a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang memadai melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah.
 - b. Terwujudnya ketersediaan air bersih dan air baku yang mantap melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
 - c. Terwujudnya ketersediaan rumah yang memadai melalui pembangunan perumahan, rehabilitasi perumahan dan terpenuhinya kebutuhan rumah serta terbentuknya lingkungan perumahan yang sehat.
 - d. Terwujudnya pembangunan wilayah yang seimbang melalui percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah, percepatan pembangunan kawasan strategis, pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - e. Terwujudnya tata ruang harmonis melalui penegakan peraturan tata ruang, peningkatan kesadaran masyarakat akan tata ruang.
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh:
- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pelayanan publik dan peningkatan profesionalisme aparat.
 - b. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.

- c. Terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
 - d. Terwujudnya masyarakat sadar informasi melalui penyadaran hak masyarakat informasi yang luas dan transparan.
 - e. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang mantap melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
 - f. Terwujudnya Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
 - g. Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ditandai dengan :
- a. Terwujudnya pendayagunaan sumberdaya alam yang lestari melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
 - b. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam tak terbarukan secara bijaksana melalui peningkatan daya dukung alam dan kelestarian lingkungan hidup dan pertimbangan kepentingan penduduk sosial, kestabilan daya dukung alam.
 - c. Terwujudnya peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui peningkatan kualitas mitigasi bencana dan peningkatan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, penyadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta konservasi lahan kritis dan penghijauan.
 - d. Terwujudnya pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang berkelanjutan melalui diversifikasi atas energi utama dengan energi terbarukan.
 - e. Terwujudnya pemanfaatan bahan tambang yang optimal melalui pengelolaan pertambangan ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah hasil tambang
 - f. Terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari melalui konservasi hutan rakyat dan perhutani serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.

- g. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal melalui pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan teknologi.
- h. Terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan yang berkualitas, melalui penegakkan hukum dan administrasi agraria/pertanahan serta penanganan kasus-kasus sengketa tanah, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2016-2021, adalah :

1. TERWUJUDNYA SDM YANG BERKUALITAS

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
 - 1) Pengembangan sarana dan prasarana pibadatan
 - 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan
 - 3) Penguatan sikap toleransi antar umat beragama
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dan peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar, menengah serta non formal.
 - 2) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititik beratkan pada pendidikan dasar, menengah dan non formal.
 - 3) Pengembangan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi.
 - 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio 70:30.
 - 5) Pengembangan pendidikan tinggi.
 - 6) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang lebih bermutu.

- 2) Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 - 3) Pengembangan promosi dan kelembagaan dalam peningkatan kesehatan masyarakat.
 - 4) Penguatan sistem jaminan kesehatan daerah.
 - 5) Peningkatan mutu tenaga kesehatan.
 - 6) Penguatan program peningkatan gizi masyarakat.
 - 7) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- d. Peningkatan keluarga kecil, bahagia, sejahtera melalui pengendalian laju pertumbuhan, persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
- 1) Peningkatan pelayanan KB aktif dan mandiri.
 - 2) Penguatan kelompok prio utomo dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dalam berKB.
 - 3) Penguatan kelompok dalam perwujudan ketahanan keluarga.
- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja; pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
- 1) Penguatan sistem informasi ketenagakerjaan
 - 2) Pengembangan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 3) Pengembangan produktifitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja
 - 4) Peningkatan perlindungan pekerja
 - 5) Pengembangan kualitas hubungan industrial.
 - 6) Penurunan angka pengangguran
- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS melalui pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - 2) optimalisasi sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana
 - 3) Optimaslisasi kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial

- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
 - 1) Pengembangan minat baca masyarakat
 - 2) Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat.
 - 3) Pengembangan sarana/prasarana perpustakaan modern.

- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 1) Pemantapan sistem dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Penguatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan dan jaminan tumbuh kembang anak.
 - 3) Peningkatan jaringan kemitraan terhadap perlindungan anak dan jaminan tumbuh

- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
 - 1) Pemantapan nilai jati diri bangsa, kelembagaan dan pemantapan kader pembangunan dalam masyarakat.
 - 2) Pembudayaan nilai jati diri bangsa dalam sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
 - 1) Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin
 - 2) Stimulasi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
 - 3) Fasilitasi kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin non produktif
 - 4) Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro untuk mendorong pendirian lembaga ekonomi masyarakat miskin

- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - 1) Penguatan kompetensi dan kemandirian generasi muda

- 2) Penguatan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda
 - 3) Pengembangan prestasi olahraga pada semua cabang olah raga yang ada
 - 4) Pengembangan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
 - 5) Pengembangan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga
 - 6) peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
- 1) Penguatan nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat
 - 2) Penguatan Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional
 - 3) Perwujudan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya
 - 4) pengembangan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat
 - 5) pemberdayaan budaya lokal dan tradisional sebagai asset pendidikan dan ilmu pengetahuan
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran
- 1) Penguatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dengan titik berat transmigrasi non swakrsa
 - 2) Semakin tingginya jumlah Transmigran khususnya swakarsa mandiri.

2. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING.

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier
 - 1) Penguatan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis agrobisnis.
 - 2) Penguatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier
- b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar

- 1) Pengembangan kualitas produk dalam rangka peningkatan daya saing produk di pasar lokal dan regional dan ketahanan pangan.
 - 2) Pemantapan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
 - 3) Pemanfaatan hutan lestari untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan.
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan menuju pengembangan kawasan minapolitan
 - 5) Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive menuju pengembangan kawasan agropolitan
 - 6) Pengembangan Pasar Induk Agrobisnis.
- c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
- 1) Penguasaan system informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai ke wilayah kecamatan.
 - 2) Meningkatnya Penyebaran pemanfaatan teknologi tepat guna guna mendapatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
 - 3) Peningkatan usaha *off farm* untuk meningkatkan pendapatan petani.
- d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
- 1) Penguatan kelembagaan petani melalui fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani
 - 2) Peningkatan kualitas SDM dalam teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pengelolaan hasil
- e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
- 1) Optimalisasi kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan
 - 2) Peningkatan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
 - 3) Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat

- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang
- 1) Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .
 - 2) Pengembangan produk-produk inovatif industry kreatif berbasis sumberdaya lokal.
 - 3) Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha industri
- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
- 1) Penguatan kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
 - 2) Penguatan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.
- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
- 1) Penguatan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Penguatan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
 - 3) Penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
- 1) Penguatan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM.
 - 2) Penguatan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.

- 3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik, dan menekan *ekonomi biaya tinggi*.
- 1) Pengembangan Pelayanan investasi berbasis Teknologi informasi.
 - 2) Penguatan lembaga promosi investasi daerah
 - 3) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi
 - 4) Penataan dan pengembangan kawasan investasi
- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata
- 1) Peningkatan kualitas sarana aksesibilitas dan penunjang pariwisata guna meningkatkan lama tinggal wisatawan.
 - 2) Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.
 - 3) Penguatan jejaring dan pengembangan promosi pariwisata di tingkat kabupaten dan provinsi secara efektif dan efisien.
 - 4) Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor pariwisata.
 - 5) Peningkatan promosi wisata bahari terpadu dan wisata kota kuno (*heritage tourism*) di tingkat kabupaten, provinsi.

3. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI.

- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
- 1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan.
 - 2) Peningkatan dan pemeliharaan interkoneksi antar kawasan.
 - 3) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan sarana dan prasarana terminal.

- 4) Optimalisasi pembangunan pelabuhan dan manajemen kepelabuhanan.
 - 5) Optimalisasi pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.
- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air permukaan yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
- 1) Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan dan memelihara kualitas air.
 - 2) Optimalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
 - 3) Optimalisasi pengendalian erosi melalui penanganan pra bencana, darurat dan pasca bencana serta pengelolaan DAS.
 - 4) Optimalisasi penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
 - 5) Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
 - 6) Peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi.
 - 7) Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
- 1) Peningkatan pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
 - 2) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - 3) Peningkatan stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

- 4) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan perumahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara swadaya.
 - 5) Pengelolaan bangunan gedung/rumah negara.
 - 6) Pengembangan teknologi dan implemementasi tepat guna bidang permukiman.
 - 7) Penguatan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba
- d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- 1) Peningkatan pembangunan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
 - 3) Peningkatan pembangunan prasarana kawasan strategis.
 - 4) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.
 - 5) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
 - 6) Penetapan peraturan zonasi tata ruang wilayah
 - 7) Penguatan kelembagaan tata ruang daerah.
 - 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah
 - 9) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
- 1) Penetapan kawasan agropolitan
 - 2) Pengembangan prasarana dan sarana kawasan agropolitan
 - 3) Peningkatan usaha agrobisnis
 - 4) Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan
 - 5) Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan

4. TERWUJUDNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good governance*.

- 1) Peningkatan pelayanan publik melalui *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - 2) Terwujudnya pelayanan publik berdasarkan SPM.
 - 3) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - 4) Peningkatan kerja sama antar daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan promosi daerah.
- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
- 1) Optimalisasi manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien
 - 2) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah
 - 3) Pengembangan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar
- c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- 1) Optimalisasi peran partai politik dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.
 - 2) Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
- d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
- 1) Pengembangan tingkat kesadaran masyarakat terhadap terpenuhinya informasi pemerintahan secara luas dan transparan
 - 2) Peningkatan kualitas Pelayanan informasi multi media.
 - 3) Peningkatan akses jaringan dan layanan informasi seluruh wilayah.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
- 1) Optimalisasi sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan
 - 2) Pengembangan sistem deteksi dini dalam keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - 3) Pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat (*community policing*).

- f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
 - 1) Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip.
 - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kearsipan yang berkualitas.

- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
 - 1) Terwujudnya lembaga penyiaran yang mempunyai ijin penyelenggaraan penyiaran.
 - 2) Perwujudan kelembagaan keterbukaan informasi publik.

5. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
 - 1) Peningkatan pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
 - 2) Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.
 - 3) Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan
 - 4) Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan
 - 5) Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.

- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal
 - 1) Peningkatan pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya
 - 2) Peningkatan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.

- 3) Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan
 - 4) Peningkatan upaya Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan
 - 5) Diseminasi penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.
 - 6) Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar perusahaan kawasan SDA yang tak terbarukan
 - 7) Pelestarian sumber daya air tanah dengan mempertahankan fungsi daerah tangkapan air.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air
- 1) Pengembangan peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
 - 2) Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.
 - 3) Peningkatan partisipatif, peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.
 - 4) Pengembangan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.
 - 5) Peningkatan penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan
 - 6) Optimalisasi pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta Penertiban dan penegakan regulasi di kawasan sempadan pantai dan sungai.
 - 7) Pengembangan kearifan lokal dan keterpaduan dalam pencegahan dan penangan bencana dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
- 1) Pemantapan rasio elektrifikasi
 - 2) Peningkatan pengembangan dan pemerataan distribusi energi alternatif yang ramah lingkungan.
 - 3) Peningkatan upaya pemanfaatan bio energi yang ramah lingkungan.

- 4) Pengembangan upaya pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
- 1) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi yang ramah lingkungan.
 - 2) Pengendalian kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya mineral.
 - 3) Peningkatan penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - 4) Pengembangan upaya penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan
 - 5) Peningkatan manfaat sosial usaha pertambangan bagi masyarakat lokal.
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
- 1) Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mendukung pengelolaan hutan lestari.
 - 2) Optimalisasi jaringan kerja kemitraan pengelolaan hutan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan
 - 3) Optimalisasi upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia
 - 4) Optimalisasi peningkatan manajemen pengelolaan hutan secara lestari sesuai fungsinya
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
- 1) Pengembangan upaya peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
 - 2) Pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya rumput laut.
 - 3) Pengembangan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan

- 4) Peningkatan peran kelembagaan di bidang perikanan dan kelautan dalam pengelolaan pesisir dan laut sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir
 - 5) Pengembangan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
 - 6) Perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan pesisir dan zona perlindungan laut.
 - 7) Pengembangan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.
 - 8) Pengembangan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan.
 - 9) Pengembangan kawasan minapolitan dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan perikanan secara optimal.
 - 10) Pengembangan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
- 1) Pengembangan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam penegakkan hukum, dan administrasi pertanahan.
 - 2) Pengembangan penertiban sistem administrasi pelayanan pertanahan.
 - 3) Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

- a) Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD Kab. Rembang Tahun 2010-2015, target capaian kinerja Tahun 2016 dan isu strategis daerah Tahun 2017 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017 sebagaimana berikut:
- b) Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang sampai dengan akhir triwulan IV 2015 menunjukkan tren positif dimana salah satu indikatornya adalah transisi pemerintahan pada Desember 2015 relatif berjalan lancar dan kenaikan

belanja pemerintah serta kenaikan pengeluaran masyarakat. Meskipun demikian, dampak El Nino berpotensi meningkatkan harga pangan hingga 10% untuk tahun 2016 dan secara simultan akan mendorong kenaikan inflasi yang mencapai setidaknya 0,3-0,6%. Dampak tersebut setidaknya akan sangat dirasakan oleh rumah tangga miskin yang menggunakan sebagian besar pendapatannya hanya untuk makanan. Sementara itu, menghadapi volatilitas perekonomian nasional dan regional yang menghambat pertumbuhan, upaya pemerintah kabupaten yang akan terus didorong antara lain pemberian stimulus, reformasi kebijakan, dan peningkatan kualitas belanja pemkab dapat membantu Kabupaten Rembang tumbuh stagnan stabil perekonomiannya pada kisaran 5,5 % dan angka inflasi diperkirakan akan terjaga di kisaran 4,5%;

- c) Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah, (2) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok, (3) peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun, (4) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang 1 % per tahun (5) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah, (6) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi daerah, (7) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat dan (8) penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan;
- d) Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi: (1) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi, (2) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat, (3) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas, (4) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk, (5) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi), dan (6) pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- e) Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (1) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH, (2) penurunan emisi GRK), (3) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover)

- serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati, (4) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau, (5) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan (6) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f) Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang;
- g) Sektor pertanian: Pengembangan teknologi tepat guna dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan, menciptakan jaringan ekonomi ditingkat pedesaan guna memanfaatkan potensi sumber daya pertanian, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan SDM petani melalui program penyuluhan pertanian, menciptakan usaha pertanian yang berorientasi pada agribisnis, pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu, pengembangan program bantuan bagi lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) dan peningkatan pemanfaatan teknologi serta mutu hasil pertanian;
- h) Sektor industri: peningkatan pengembangan zona atau wilayah industri beserta sarana dan prasarananya, peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan modal kerja untuk mengembangkan potensi sektor industri, pelatihan peningkatan kualitas produksi dan perkuatan struktur modal, peningkatan segmen pasar dan bantuan pinjaman modal untuk sarana produksi, pengendalian pencemaran lingkungan dengan cara meminimalisir produksi limbah yang dihasilkan selama proses produksi, meningkatkan peluang pasar produk industri terutama industri kecil dengan sistem inovasi berteknologi industri, meningkatkan kualitas dan kompetensi pengusaha dalam rangka peningkatan daya saing produk industri, mengembangkan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien;
- i) Sektor perdagangan: peningkatan sarana prasarana, kualitas produk dan pemasaran, peningkatan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menengah (PKM), pemberian bantuan pinjaman modal bagi pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar, mengadakan kegiatan pasar murah di wilayah kecamatan, melaksanakan sosialisasi peijinan di bidang perdagangan, penerapan teknologi tepat guna di bidang perdagangan, peningkatan SDM dan kualitas di bidang perdagangan, pengembangan perdagangan dan sistem distribusi;
- j) Sektor Perikanan dan Kelautan: Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi

berorientasi pasar, mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen, optimalisasi Usaha Garam Rakyat;

- k) Harmonisasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar serta mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- l) Mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Kabupaten Rembang secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal;
- m) Penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya melalui: peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2017

SKPD	PROGRAM	PAGU
Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,674,632,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,118,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	185,000,000
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,920,000,000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28,320,000,000
	Program Pendidikan Non Formal	5,907,800,000
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,804,200,000
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4,987,500,000
Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,897,822,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	411,920,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	547,000,000
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	762,000,000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	8,778,500,000
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	860,000,000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	740,000,000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	861,803,000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	237,000,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,750,000,000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	655,000,000
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	8,545,000,000
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	132,500,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	370,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	70,000,000
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	660,000,000
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	100,000,000
RSUD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,000,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno	75,000,000,000
Dinas Pekerjaan Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,693,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	890,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	115,000,000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2,600,000,000
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7,358,000,000
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	42,300,000,000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	11,000,000,000
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19,500,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	8,325,000,000
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12,578,000,000
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	38,600,000,000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	58,297,500,000
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1,550,000,000
	Program pengelolaan areal pemakaman	4,000,000,000
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong	4,000,000,000
Bappeda	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	915,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,475,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,000,000
	Program Pengembangan Data/Informasi	670,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Kerjasama Pembangunan	900,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	85,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,136,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,600,000,000
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	695,000,000
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	560,000,000
	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	420,000,000
	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	50,000,000
Dinhubkominfo	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,867,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	856,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	210,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	562,200,000
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	500,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	160,000,000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,110,000,000
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3,126,000,000
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,615,000,000
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas	660,000,000
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	370,000,000
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	1,275,000,000
	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	180,000,000
Badan Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572,200,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206,330,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,700,000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	20,000,000
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1,125,000,000
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	755,000,000
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	56,000,000
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	40,000,000
	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	200,000,000
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem	250,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Pesisir dan Laut	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	30,000,000
Dindikcapil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520,145,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335,980,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19,200,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45,444,000
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	402,652,000
BPMPKB	Kualitas Hidup Perempuan	2,370,000,000
	Perlindungan Perempuan	180,000,000
	Kualitas Keluarga	300,000,000
	Pemenuhan Hak Anak	1,340,000,000
	Perlindungan Khusus Anak	500,000,000
	Program Sistem Informasi Gender dan Anak	135,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	564,950,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	558,020,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85,000,000
	Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2,797,752,000
	Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana	2,765,494,310
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	137,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	425,000,000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	80,000,000
	Pembinaan Pemerintah Desa dan Kerjasama Desa	2,445,000,000
	Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	795,000,000
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan	1,880,000,000
	Fasilitasi Kemandirian Ekonomi Perdesaan	330,000,000
	Pengelolaan Lingkungan Sosial	650,000,000
	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	650,000,000
	Pengelolaan Saran Air Minum dan Sanitasi	200,000,000
	Pembinaan Lingkungan Sosial	300,000,000
	Pembangunan Kawasan Perdesaan	800,000,000
Dinsosnakertrans	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	654,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	735,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,000,000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	865,000,000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	335,000,000
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	36,500,000
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	60,000,000
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	150,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	(Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,002,000,000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1,450,000,000
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	530,000,000
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	785,000,000
	Program Pengembangan Wilayah Transmigasi	200,000,000
Dinindagkop & UMKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,457,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,115,000,000
	Program Peningkatan Displin Aparatur	75,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	15,000,000
	Program Perencanaan Pengembangan Industri Dagang Koperasi (IDK) dan UMKM	40,000,000
	Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif	475,000,000
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	540,000,000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	190,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	450,000,000
	Program Peningkatan Kemetriologian dan perlindungan Konsumen	160,000,000
	Optimalisasi Penerimaan Retribusi	50,000,000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	270,000,000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	200,000,000
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	300,000,000
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	180,000,000
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	140,000,000
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	325,000,000
	Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	75,000,000
	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	20,000,000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi	900,000,000
	Program pembinaan pedagang	50,000,000
	Promosi Produk Unggulan Daerah	650,000,000
	Program Peningkatan kerjasama daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pemnangunan sarana perdagangan	50,000,000
	Peningkatan Kapastan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	670,000,000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,010,000,000
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	200,000,000
	Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri	100,000,000
	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	500,000,000
	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	625,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Pembinaan Industri	100,000,000
KesbangpolLinmas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	428,255,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	140,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,000,000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	250,000,000
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,415,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1,706,514,000
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	445,000,000
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	60,000,000
	Program Penegakan Peraturan Daerah	15,000,000
BPBD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	863,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	605,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,000,000
	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	890,000,000
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	160,000,000
	Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa	320,000,000
	Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	2,811,000,000
	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	1,790,000,000
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1,939,000,000
SATPOL PP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	290,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,305,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	140,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	535,000,000
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	166,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	656,000,000
	Program Penegakan Peraturan Daerah	1,225,000,000
	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	150,000,000
Sekretariat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,220,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,617,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100,000,000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	750,000,000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1,000,000,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	1,210,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	135,000,000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	1,867,000,000
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	150,000,000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	180,000,000
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,525,000,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	870,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	945,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	2,850,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	160,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	3,070,000,000
	Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah	620,000,000
	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	480,000,000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah	700,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan	100,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana	175,000,000
	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	100,000,000
	Program peningkatan fasilitasi pelayanan publik	215,000,000
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	150,000,000
	Program peningkatan sarana pemerintahan	60,000,000
	Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan	100,000,000
	Program Pemberdayaan Jasa konstruksi	75,000,000
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah	1,800,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	11,000,000,000
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	-
Sekretariat Dewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,003,625,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,817,369,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	702,817,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85,484,000
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	17,999,114,900
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	333,090,000
	Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan diluar Cakupan Jaminan Kesehatan BPJS	186,773,000
DPPKAD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,590,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	552,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	380,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	214,500,000
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10,300,467,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	55,000,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	150,000,000
	Program Pengembangan Rancangan Kebijaksanaan Pengelolaan Barang daerah	300,000,000
	Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang daerah	520,000,000
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah	446,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana	90,000,000
Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,033,800,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398,500,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,637,600,000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	223,700,000
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	409,650,000
Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	717,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	819,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,380,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	364,966,000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	160,000,000
	Program Pendidikan Kedinasan	1,100,000,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5,164,500,000
Kantor PPT	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351,950,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	451,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	330,000,000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	110,000,000
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	30,000,000
	Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan PM	280,500,000
	Program Pengendalian Perijinan	215,000,000
	Pelayanan Penanaman Modal	150,000,000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	120,000,000
Kec. Rembang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261,167,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322,724,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	75,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	135,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	20,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Kantor Kelurahan	1,800,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	40,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	130,000,000
Kec. Kaliori	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	248,584,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,400,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	120,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	120,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	25,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	30,000,000
Kec. Sulang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244,800,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	387,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	30,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	97,000,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	930,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
Kec. Sumber	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12,400,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	9,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	10,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197,944,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	277,965,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	384,395,500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12,400,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,600,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	58,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	10,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya	35,000,000
	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik	20,000,000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	20,000,000
Kec. Bulu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	157,890,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265,200,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,100,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	182,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarpras Pemuda, Olahraga dan Seni budaya	80,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	16,000,000
Kec. Lasem	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	9,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	254,231,600
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	203,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	40,000,000
Kec. Pancur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205,100,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	133,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	30,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	42,000,000
Kec. Sluke	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,400,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	173,500,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	130,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	359,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	30,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15,000,000
Kec. Pamotan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	270,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,000,000
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan	10,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	150,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	50,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	35,000,000
Kec. Gunem	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	232,958,500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,500,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	147,500,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana	20,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	25,000,000
Kec. Sale	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	373,800,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	478,987,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	5,000,000
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	25,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	160,000,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	23,100,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	50,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	72,800,000
Kec. Kragan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	332,213,800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	516,229,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	180,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	45,000,000
Kec. Sedan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,597,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27,450,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29,220,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15,300,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	168,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	35,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	121,910,000
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	18,625,000
Kec. Sarang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	243,400,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18,700,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,000,000
	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa	180,000,000
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya	50,000,000
	Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	20,000,000
BKP dan P4K	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	565,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	281,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	250,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,000,000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,450,000,000
	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	100,000,000
	Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	325,000,000
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,850,000,000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	35,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan	60,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
Kantor Pustasip	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	484,090,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	126,539,000
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	175,000,000
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	666,820,000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	82,250,000
	Program Pengkajian, Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan	887,500,000
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	720,000,000
Dintanhut	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,431,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	835,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	170,000,000
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	865,000,000
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3,090,000,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	230,000,000
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,550,000,000
	Peningkatan penerapan teknologi peternakan	300,000,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit dan Tanaman	800,000,000
	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan	315,000,000
	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	14,250,000,000
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	300,000,000
	Program Pengembangan Agribisnis	1,590,000,000
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	4,270,000,000
	Dinas ESDM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		93,800,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		30,000,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		50,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		4,525,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan		110,000,000
Pembinaan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas		50,000,000
Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan		50,000,000
Program Pengelolaan Bencana Geologi		50,000,000
Dinbudparpora		Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya
	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	115,000,000
	Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	120,130,000
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,825,000,000
	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	165,000,000
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	150,000,000

SKPD	PROGRAM	PAGU
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,690,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	900,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	709,970,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,120,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	260,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	280,000,000
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,582,500,000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8,669,000,000
	Program Pengembangan Kemitraan	457,500,000
Dinlutkan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	818,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	120,000,000
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	175,000,000
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	350,000,000
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	350,000,000
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,310,000,000
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	13,800,000,000
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	75,000,000
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	230,000,000
	Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan	200,000,000
	Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	250,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan	950,000,000
	Program Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Pesisir dan Perikanan	150,000,000
	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	500,000,000
	Program Pelestarian Sumberdaya Pesisir dan Perikanan	400,000,000

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2017



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2014–2019 dan RKP 2017 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan meningkatkan kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 akan menitikberatkan pada (1) Terwujudnya SDM yang berkualitas, (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing, (3) Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang memadai, (4) Terwujudnya kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan (5) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu **(1)** kewenangan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan dan masyarakat desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi dan informatika. **(2)** kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi. Adapun sasaran untuk tiap–tiap urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib

1. Pendidikan

Urusan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase guru yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswa penerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan. Adapun sasaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan dasar melalui sekolah gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar (9 tahun).
- b. Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar (9 tahun) melalui peningkatan daya tampung siswa di SD, MI, SMP, dan MTs.
- c. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansi pendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan non formal melalui :
 - 1) Peningkatan mutu pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA
 - 2) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal
 - 3) Peningkatan akses dan mutu lembaga pendidikan masyarakat
 - 4) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia di atas 15 tahun
- d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui program peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui program pembinaan manajemen organisasi sekolah berbasis sekolah.

2. Kesehatan

Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi kekurangan gizi, penurunan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*). Adapun sasaran untuk urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang melalui program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat dan Jamkesmas.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- c. Peningkatan perilaku hidup sehat melalui :

- 1) Peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Pusat Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan.
 - 2) Pengembangan lingkungan sehat.
 - 3) Perbaikan gizi kesehatan masyarakat.
 - 4) Pembinaan dan pengembangan SBH (Saka Bakti Husada) dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui
- 1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit
 - 2) Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan.
 - 3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - 4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
 - 5) Pengawasan keamanan, makanan dan Bahan Berbahaya.
 - 6) Penanggulangan HIV ADIS.
- e. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dari kurang mampu.

3. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan umum diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat - pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Adapun sasaran untuk urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatkan dan memelihara kapasitas jaringan irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perkotaan melalui pengembangan saluran drainase, pengelolaan air limbah dan sampah.
- c. Peningkatkan fungsi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya.
- d. Peningkatkan penyediaan air baku bagi masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan air baku.
- e. Peningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap banjir melalui pembangunan bangunan pengendali banjir.
- f. Peningkatkan kualitas lingkungan pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur pedesaan.
- g. Peningkatkan kualitas dan kuantitas kebinamargaan melalui :
 - 1) Pembangunan jalan dan jembatan.
 - 2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - 3) Tanggap darurat jalan dan jembatan.

- 4) Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan.
- 5) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
- 6) Pembangunan system informasi/database jalan dan jembatan.
- 7) Rehabilitasi dan pemeliharaan talud/bronjong.

4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasi pengembangan hutan kota, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan kawasan pesisir rusak. Adapun sasaran untuk urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui :
 - 1) Kampanye publik pelestarian LH.
 - 2) Perijinan pemanfaatan SDA.
 - 3) Penanganan limbah.
- b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui :
 - 1) Perlindungan dan Konservasi SDA.
 - 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.
 - 3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
 - 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.
- c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan melalui :
 - 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
 - 2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.
 - 3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.
 - 4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.
 - 5) Reklamasi bekas area pertambangan.
- d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui :
 - 1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - 2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau.
 - 3) Pembangunan Hutan Kota.
- e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada saat pra, tanggap darurat dan pasca bencana melalui :
 - 1) Pengembangan perencanaan penanggulangan bencana.
 - 2) Peningkatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
 - 3) Kedaruratan dan logistik bencana.
 - 4) Pembangunan daerah pasca bencana.

5. Penataan Ruang

- a. Perencanaan tata ruang melalui pengembangan pengaturan tata ruang.

- b. Pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring evaluasi, perijinan, sanksi dalam pemanfaatan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan.

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Membangun basis data perencanaan yang lengkap, faktual, dan terintegrasi melalui pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
- c. Menyusun rencana pembangunan daerah dan kawasan secara serasi dan terpadu melalui :
 - 1) Perencanaan pembangunan ekonomi.
 - 2) Perencanaan pembangunan sosial budaya.
 - 3) Kerjasama pembangunan.
 - 4) Pengembangan wilayah perbatasan.
 - 5) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
 - 6) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
- d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dan kualitas sarana/prasarana perencanaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- e. Melaksanakan evaluasi kinerja secara transparan, kemprehensif, analitis dan berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.

7. Perumahan

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara swadaya melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah secara swadaya.
- b. Peningkatan peran swasta (pengembang) dalam penyediaan rumah formal terutama rumah tipe kecil menengah melalui:
 - 1) Fasilitasi peningkatan peran pengembang dalam penyediaan rumah-rumah formal tipe kecil menengah.
 - 2) Pengembangan perumahan.
- c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemugaran, pemeliharaan, perbaikan rumah melalui :
 - 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan rumah.
 - 2) Hibah pemugaran perumahan tidak layak huni.
- d. Peningkatan kualitas perumahan permukiman melalui :
 - 1) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dengan derajat kekumuhan yang tinggi.
 - 2) Penanganan perumahan perdesaan.
 - 3) Penyediaan dan Peningkatan fasum dan fasos.

8. Kepemudaan dan olah raga

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda melalui :
 - 1) Peningkatan peran serta pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.
 - 2) Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Peningkatan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan melalui pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan pemuda.
- c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup.
- d. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kalangan masyarakat melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
- e. Peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen bidang keolahragaan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
- f. Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana olah raga melalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

9. Penanaman Modal

- a. Pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha melalui :
 - 1) Peningkatan Sistem informasi Investasi Daerah.
 - 2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
 - 3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
- b. Peningkatan kinerja BUMD sebagai pendukung peningkatan PAD melalui reorientasi peran dan fungsi BUMD.

10. Koperasi dan UKM

- a. Peningkatan kemampuan manajerial usaha koperasi dan UMKM melalui :
 - 1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - 2) Pengembangan klaster UMKM.
- b. Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui :
 - 1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi dan UMKM.

11. Kependudukan dan catatan sipil

1. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan.
3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

12. Ketenagakerjaan

- a. Mendorong terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja yang kompetitif melalui peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.
- b. Mendorong terwujudnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudah diakses pada pencari kerja maupun pemberi kerja melalui peningkatan kesempatan kerja.

13. Ketahanan Pangan

- a. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat wilayah kabupaten, kecamatan, desa dan tingkat rumah tangga yang cukup, terjangkau, aman melalui :
 - 1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan.
 - 2) Pengelolaan cadangan pangan.
 - 3) Perbaikan distribusi pangan.
 - 4) Pengembangan sistem kelembagaan pangan.
- b. Peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat melalui diversifikasi produk pangan.
- c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan akses pangan masyarakat

14. Pemberdayaan Perempuan

- a. Mewujudkan kesadaran, dan kesetaraan, gender pada penentu kebijakan dan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan melalui Pengembangan pengarusutamaan gender.
- b. Mendorong tercapainya kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak dengan lebih baik melalui peningkatan dan perlindungan kualitas hidup perempuan.
- c. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pengintegrasian kegiatan yang mampu mendorong semua pihak berpartisipasi dalam perlindungan anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- d. Penguatan lembaga-lembaga dalam masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan melalui :
 - 1) Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha.
 - 2) Penguatan keberdayaan ekonomi rumah tangga.
- e. Mendorong terbukanya akses informasi gender dan anak sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang responsif gender melalui pengembangan sistem informasi gender dan anak.
- f. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui :
 - 1) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - 2) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
 - 3) Pelayanan KB, KR.
 - 4) Advokasi dan KIE KBKR.
- b. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui :
 - 1) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja.
 - 2) Peningkatan KRR lintas sektor terkait.
- c. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - 1) Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - 2) Peningkatan keluarga berkualitas.
 - 3) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga terpadu.
- d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas melalui :
 - 1) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
 - 2) Penyusunan SIDUGA.
 - 3) Penyusunan data pilah.
- e. Meningkatkan pelayanan KB dan KR melalui :
 - 1) Peningkatan pelayanan KB & KR.
 - 2) Peningkatan KRR sesuai sasaran.

16. Perhubungan

Peningkatan pelayanan perhubungan melalui :

- a. Pembangunan sarana prasarana perhubungan darat dan laut.
- b. Peningkatan pelayanan angkutan darat.
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
- d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
- e. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- f. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- g. Peningkatan keamanan dan keselamatan laut.

17. Komunikasi dan informasi

- a. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa melalui pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa.
- b. Peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi melalui kerjasama informasi dengan media massa.
- c. Peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi melalui :
 - 1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
 - 2) Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.

18. Pertanahan

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan
- b. Peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan .

19. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui :
 - 1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - 3) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 - 4) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT).
 - 5) Peningkatan stabilitas daerah yang kondusif.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsa melalui :
 - 1) Pengembangan wawasan kebangsaan.
 - 2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat kebangsaan.
- c. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui Peningkatan partisipasi politik masyarakat.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Otonomi Daerah

- 1) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

b. Pemerintahan Umum

- 1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan KDH melalui peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- 3) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
- 4) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara bertahap.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan peraturan - peraturan yang berlaku melalui penataan peraturan perundang - undangan.
- 6) Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan TRANTIBUM.
 - b) Pengamanan dan perlindungan masyarakat.
 - c) Penegakan hukum.
- 7) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui :
- a) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.
 - b) Pengembangan daerah - daerah perbatasan.
 - c) Pengembangan wilayah.

c. Keuangan Daerah

- 1) Peningkatan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah baru melalui ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
- 4) Peningkatan pendayagunaan aset daerah secara produktif melalui pendayagunaan aset daerah secara produktif.

d. Aparatur Daerah

- 1) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan.
- 2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui :
 - a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
 - b) Peningkatan kualitas SDM aparatur.

e. Kepegawaian

- 1) Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah melalui :
 - a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - b) Pendidikan Kedinasan.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Daerah.

f. Persandian

Pengembangan dan peningkatan pengadaan sistem sandi dan penyelenggaraan protap sistem sandi melalui pengembangan dan pengadaan Sistem Sandi (SISSAN) serta penyelenggaraan Protap Sissan.

g. Pengawasan

Menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan melalui :

- 1) Peningkatan pengawasan.
- 2) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Peningkatan fungsi dan memperkuat lembaga pemerintah dan kemasyarakatan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
- b. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana desa melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi desa melalui pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan melalui program peningkatan fungsi pemerintahan desa.

22. Sosial

- a. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin dan PMKS lainnya melalui pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- b. Penguatan fungsi dan kinerja kelembagaan keluarga dan UEP KUBE fakir miskin melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan anak melalui pembinaan anak terlantar.
- d. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.
- e. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS melalui pembinaan panti sosial/panti asuhan/panti jompo.
- f. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, penyalahguna dan korban narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- g. Memperkuat fungsi dan kinerja kelembagaan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial eks penyandang penyakit sosial.
- h. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

23. Kebudayaan

- a. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah melalui pengembangan nilai budaya.
- b. Peningkatan dan pengembangan potensi seni dan budaya daerah melalui pengelolaan kekayaan budaya.
- c. Peningkatan dan pengembangan keragaman seni dan budaya daerah melalui pengelolaan keragaman budaya.

- d. Peningkatan dan pengembangan serta pelestarian tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman melalui pengembangan dan pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman.

24. Statistik

- a. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik daerah melalui peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam mengembangkan statistik daerah.
- b. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerah.
- c. Meningkatkan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah diakses oleh pihak - pihak yang membutuhkan melalui peningkatan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah dan cepat diakses.

25. Kearsipan

- a. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui :
 - 1) Peningkatan pengelolaan korespondensi untuk menunjang kinerja Instansi.
 - 2) Pengembangan dan pengawasan sistem kearsipan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelamatan arsip bernilai guna sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan bukti kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan melalui :
 - 1) Penyelamatan arsip bernilai guna tinggi yang ada di instansi pemerintah;
 - 2) Pembangunan pusat arsip yang representatif.
- c. Peningkatan SDM pengelola arsip melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip.

26. Perpustakaan

- a. Perluasan cakupan dan pemerataan layanan perpustakaan melalui peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan perpustakaan.
- b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.
- d. Peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat baca masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidang perpustakaan.
- f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan.

5.2. Urusan Pilihan

27. Kelautan dan Perikanan

- a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui:
 - 1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
 - 2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui :
 - 1) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
 - 2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.
- c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar melalui :
 - 1) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
 - 2) Pengembangan perikanan tangkap.
- d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan perikanan dan kelautan melalui :
 - 1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan perikanan
 - 2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha perikanan dan kelautan
 - 3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan
- e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui :
 - 1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
 - 2) Pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

28. Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panen melalui :
 - 1) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian
 - 2) Pengembangan komoditas pertanian
- b. Pengembangan kawasan agribisnis pertanian melalui pengembangan sentra agribisnis
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui :
 - 1) Peningkatan produksi pertanian
 - 2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian
 - 3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - 4) Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit (tanaman dan ternak)
 - 5) Peningkatan produksi peternakan
- d. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui :
 - 1) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan petani.
 - 2) Penguatan kelembagaan pertanian
- e. Peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditas pertanian melalui :
 - 1) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

- 2) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

29. Kehutanan

- a. Revitalisasi sumberdaya kehutanan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- b. Pengembangan hutan rakyat melalui :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi;
 - 2) Pembinaan dan penertiban industri primer hasil hutan.
- c. Peningkatan produksi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu melalui rehabilitasi hutan dan lahan
- d. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi masyarakat di sekitar hutan melalui :
 - 1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 - 2) Pemberdayaan kelembagaan Kehutanan.

30. Energi Sumberdaya Mineral

- a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan , pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan dan ABT melalui :
 - 1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral;
 - 2) Peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan dan ABT;
 - 3) peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan dan ABT;
 - 4) peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan dan ABT.
- b. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri melalui peningkatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.
- c. Peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerah lain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasi pertambangan dengan daerah sekitar.

31. Pariwisata

- a. Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah melalui :
 - 1) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) Pengembangan event dan paket wisata;
 - 3) Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana wisata.
- b. Peningkatan dan pengembangan SDM dan peran serta masyarakat. serta dunia usaha pariwisata melalui :
 - 1) Pengembangan kemitraan;
 - 2) Gerakan sadar wisata.

32. Perindustrian

- a. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada sumberdaya lokal.
- b. Peningkatan sinergi program pengembangan dan perkuatan struktur industri melalui pengembangan SDM, kelembagaan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing industri melalui :

- 1) Penataan struktur industri;
 - 2) Pengembangan sentra-sentra/klaster industri potensial.
- c. Peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas dan keragaman produk, efisiensi proses produksi dan akses pasar produk IKM melalui :
- 1) Peningkatan kemampuan teknologi industri;
 - 2) Pelatihan dan bantuan peralatan industri.

33. Perdagangan

- a. Pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdagangan melalui :
- 1) Peningkatan kemetriologian dan perlindungan konsumen;
 - 2) Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan;
 - 3) Peningkatan dan pengembangan ekspor;
 - 4) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- b. Penataan lembaga pendukung UMKM terkait distribusi melalui perluasan dan penguatan lembaga pendukung usaha perdagangan kecil dan menengah.
- c. Peningkatan kesadaran hukum, tertib niaga, kepastian berusaha, perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui :
- 1) Penguatan institusi pendukung pasar;
 - 2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

34. Transmigrasi

Peningkatan program transmigrasi bagi upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan pengangguran melalui transmigrasi regional.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan Kabupaten Rembang tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam buku Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang per bidang dan per SKPD.

BAB VI PENUTUP



BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Dokumen RKPD Kabupaten Rembang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil - hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonal baik melalui forum regular yang telah terprogram maupun forum terfokus antar pelaku pembangunan (*Stakeholders*).

Pada akhirnya tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 ini, dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya, sehingga visi Pemerintah Kabupaten Rembang **“Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”** dapat tercapai.

Ditetapkan Di Rembang
pada tanggal Juni 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan daerah untuk periode Tahun 2017 perlu menyusun Raperbup RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Juni 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 02 Juni 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 18

